



# Ringkasan Hasil Penelitian Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Mataram Tahun 2021

Balitbang Kota Mataram  
Jalan Pejangik Nomor 16 Mataram



**BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**  
**RESEARCH AND DEVELOPMENT AGENCY**  
**KOTA MATARAM**

**Penelitian dan Inovasi untuk Mataram Harum**

## KATA PENGANTAR

***Assalammu'alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh,***

Alhamdulillah Robbil 'Alamin, puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah subhanahuwatala, yang tidak henti-hentinya telah memberikan beribu-ribu nikmat kepada kita semua, dan lebih khususnya rasa syukur yang tak terhingga atas terselesaikannya Buku Ringkasan Hasil Penelitian Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Mataram Tahun Anggaran 2021.

Penyusunan Buku Ringkasan Hasil Penelitian Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Mataram Tahun Anggaran 2021 ini merupakan upaya-upaya untuk memperkaya khasanah hasil kajian/penelitian dan dapat dijadikan referensi dalam proses perumusan kebijakan berbasis penelitian (*evidence-based policy*) oleh para pemangku kepentingan (*stakeholders*) lingkup pemerintah Kota Mataram.

Buku ringkasan ini diharapkan menjadi langkah awal untuk mencapai tujuan dalam rangka peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Akhirnya, Saya sampaikan penghargaan dan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berpartisipasi dan berkontribusi dalam penyusunan Buku ini.

***Assalammu'alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh,***

Mataram, Desember 2021

Kepala Badan Penelitian dan  
Pengembangan Kota Mataram

Dr. MANSUR SH., MH

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	ii
<b>Bagian I Hasil-Hasil Penelitian Bidang Ekonomi Sosial dan Budaya .....</b>	<b>1</b>
1. Kajian Pemetaan Peluang Pengembangan Ekonomi Kreatif Kota Mataram di Era 4 titik nol (4.0) .....	2
2. Kajian Penelitian Model Pengembangan Wisata Kota sebagai Pusat Destinasi Wisata Kota Mataram.....	14
3. Kajian Pemberian Dana Jaringan Pengaman Sosial (JPS) terhadap sasaran Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Sosial.....	22
<b>Bagian II Hasil-Hasil Penelitian Bidang Sumber Daya Alam dan Pengembangan Wilayah.....</b>	<b>31</b>
1. Kajian Penataan Kecamatan di Kota Mataram Melalui penyesuaian (Perubahan Batas Wilayah) Kecamatan Sekarbela Tahun 2021.....	32
2. Kajian Identifikasi Pemanfaatan Ruang Pesisir di Sepanjang Garis Pantai Sebagai Tujuan Destinasi Wisata di Wilayah Kota Mataram.....	42
3. Kajian Kajian Efektifitas Program 1 Rumah 1 Jumantik dan Pemanfaatan Foging Dalam Rangka Mengurangi Penyebaran Demam Berdarah Guna Meningkatkan Kesehatan Masyarakat.....	58
4. Kajian Ketersediaan Sumber Daya Air dalam Mendukung Kebutuhan Air Bersih Masyarakat Kota Mataram.....	70
5. Kajian Identifikasi Sarana dan Prasarana Penanganan Kebakaran pada Wilayah Padat Penduduk di Kota Mataram.....	79
6. Kajian Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Ketersediaan Infrastruktur dan Pelayanan Puskesmas di Kota Mataram.....	89
7. Kajian Kajian Identifikasi Kawasan yang Berpotensi sebagai Destinasi Wisata Baru di Wilayah Kota Mataram .....	95
<b>Penutup .....</b>	



# Bagian I

## Hasil-Hasil Penelitian

### Bidang Ekonomi Sosial dan Budaya

# Penelitian Peluang Pengembangan Ekonomi Kreatif Kota Mataram Di Era 4.0

## Abstrak

Kota Mataram hingga saat ini belum mempunyai gambaran yang menyeluruh mengenai kondisi ekonomi kreatif yang ada, minimnya kajian-kajian yang dapat dijadikan sebagai rujukan dan bahan pertimbangan pembuatan kebijakan pengembangan ekonomi kreatif, apalagi masih banyak masyarakat yang belum mengetahui apakah sektor ekonomi kreatif ini serta bagaimana prospek perkembangannya. dan banyak lagi pertanyaan-pertanyaan lainnya mengenai sektor ekonomi kreatif. Oleh karena itu Pemerintah Kota Mataram melakukan kajian untuk mengetahui gambaran tentang industri ekonomi kreatif di Kota Mataram dan melakukan pemetaan industri ekonomi kreatif berdasarkan kualifikasi yang ada. Berdasarkan hasil analisa SWOT terhadap faktor internal dan eksternal industri kreatif Kota Mataram, maka peta pengembangan subsektor ekonomi kreatif diklasifikasi dalam 5 (lima) tingkatan yaitu tingkat pengembangan sangat tinggi dan unggul, pengembangan tinggi, pengembangan sedang, pengembangan rendah, dan pengembangan sangat rendah. Selain itu dijumpai sejumlah kendala yang menghambat pengembangan industri kreatif di Kota Mataram seperti pengembangan industri kreatif, konten, kreasi, dan teknologi kreatif belum optimal, kurangnya perluasan dan penetrasi pasar, lemahnya institusi industri kreatif, minimnya akses pembiayaan, dan pengembangan sumber daya yang belum optimal. Oleh karena itu diperlukan update dan validasi data, penyusunan roadmap pengembangan industri kreatif, meningkatkan infrastruktur layanan industri kreatif, mengembangkan jejaring dan kerjasama, peningkatan kapasitas industri kreatif di Kota Mataram di era 4.0.

*Kata kunci: Kota Mataram, industry kreatif, ekonomi kreatif*

## A. Latar Belakang

Penyelenggaraan otonomi daerah mengharuskan tiap daerah untuk selalu mengembangkan potensi-potensi ekonomi yang dimilikinya, tidak terkecuali Kota Mataram sebagai Ibukota Provinsi Nusa Tenggara Barat, terus berupaya membenahi pertumbuhan ekonomi daerahnya, khususnya saat ini ditengah situasi pandemi Covid-19 dengan terus mendorong menciptakan aktifitas ekonomi yang mampu menjawab tantangan permasalahan pembangunan, diantaranya pertumbuhan ekonomi yang cenderung rendah sebagai dampak Covid-19, tingkat kemiskinan dan pengangguran yang masih tinggi.

Salah satu upaya untuk mencapai itu perlu mengidentifikasi potensi-potensi industry kreatif yang ada. Untuk itu perlumendorong peran ekonomi kreatif di era revolusi industri 4.0, terutama sektor-sektor yang memiliki peluang cepat berkembang, mengingat adanya arus pertumbuhan yang tinggi menyebabkan ekonomi dikawasan urban berkembang

sangat kompetitif. Ketidakmampuan kawasan urban untuk beradaptasi dengan tantangan ekonomi di era revolusi industri 4.0 akan mematikan aktivitas ekonomi di kawasan ini

Kota Mataram sebagai kota yang sedang berkembang perlu mengidentifikasi potensi-potensi ekonomi kreatif yang ada, untuk memastikan adaptasi kawasan perkotaan akibat adanya tantangan ekonomi global serta mendorong reposisi identitas ekonomi yang lebih inovatif dan unik yang memanfaatkan teknologi dan internet kedalam unsur manajemen usaha ekonomi kreatif, sehingga industri kreatif di Kota Mataram dapat bersaing dengan daerah lain.

## **B. Permasalahan**

Sektor ekonomi kreatif Kota Mataram saat ini mulai terlihat berkembang, kontribusinya terhadap PDRB pada tahun 2020 mencapai 585 milyar rupiah (3,13%) dan mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 8.503 orang (3,47%). Meskipun demikian, hingga saat ini belum ada gambaran yang menyeluruh mengenai kondisi ekonomi kreatif yang ada, minimnya kajian-kajian yang dapat dijadikan sebagai rujukan dan bahan pertimbangan pembuatan kebijakan pengembangan ekonomi kreatif, apalagi masih banyak masyarakat yang belum mengetahui apakah sektor ekonomi kreatif ini serta bagaimana prospek perkembangannya. dan banyak lagi pertanyaan-pertanyaan lainnya mengenai sektor ekonomi kreatif. Pertanyaan-pertanyaan tersebutlah yang kemudian mendorong pemerintah daerah berupaya untuk melakukan kajian memetakan peluang pengembangan ekonomi kreatif di Kota Mataram di era 4.0.

## **C. Tujuan**

Tujuan dilakukannya kajian pemetaan peluang pengembangan ekonomi kreatif di Kota Mataram di era 4.0, untuk:

1. Mengetahui gambaran tentang industri ekonomi kreatif di Kota Mataram;
2. Melakukan pemetaan industri ekonomi kreatif berdasarkan kualifikasi yang ada;
3. Merumuskan strategi pengembangan ekonomi kreatif Kota Mataram.

## **D. Metode Penelitian**

Data yang digunakan untuk mendukung penelitian ini adalah data sekunder dan primer dengan menggunakan analisis deskriptif dan SWOT analisis.

## **E. Pokok-Pokok Hasil Analisa**

Berdasarkan hasil Analisa yang telah dilakukan, disimpulkan bahwa:

- I. Berdasarkan data Dinas Perindustrian Koperasi dan UMKM Kota Mataram, Dinas Pariwisata Kota Mataram pada tahun 2020 dan dari sumber-sumber terkait lainnya,

jumlah industri kreatif Kota Mataram mencapai 1.886 industri kreatif atau 37,62% dari jumlah IKM, dengan rincian Kecamatan Sekarbela 505 (27%), kecamatan Mataram 338 (18%), kecamatan Selaparang 318 (17%), kecamatan Cakranegara 315 (17%), kecamatan Ampenan 248 (13%), dan kecamatan Sandubaya sebanyak 162 (9%).

- II. Jenis ekonomi kreatif di Kota Mataram ( sesuai dengan Peraturan Presiden RI No.72/2015 tentang Badan Ekonomi Kreatif)
- a. Aplikasi dan Game Developer
  - b. Arsitektur
  - c. Desain Interior
  - d. Desain Komunikasi Visual
  - e. Desain Produk
  - f. Fashion
  - g. Film, Animasi dan Video
  - h. Fotografi
  - i. Musik
  - j. Televisi dan Radio
  - k. Seni Pertunjukan
  - l. Seni Rupa
  - m. Kriya
  - n. Kuliner
  - o. Penerbitan
  - p. Periklanan
- III. Potensi ekonomi kreatif yang terdapat di Kota Mataram dan profilnya dapat didiskripsikan berdasarkan sub-sektor masing-masing, sebagai berikut

No.	Jenis Ekonomi Kreatif	Nilai Produksi Pertahun (Rp)	Serapan Tenaga Kerja (orang)
1.	Aplikasi dan Game Developer	3.000.000.000	-
	Arsitektur	180.000.000.000	300
3	Desain Interior	1.680.000.000	42
4	Desain Komunikasi Visual	630.000.000	123
5	Desain Produk	432.000.000	12
6	Fashion	2.385.000.000	159
7	Film, Animasi dan Video	3.240.000.000	90
8	Fotografi	2.007.500.000	66
9	Musik	2.700.000.000	64
10	Televisi dan Radio	3.542.500.000	194
11	Seni Pertunjukan	4.440.000.000	2.998
12	Seni Rupa	28.800.000	3
13	Kriya	17.188.200.000	1.065
14	Kuliner	237.961.750.000	2.636
15	Penerbitan	6.582.000.000	630
16	Periklanan	1.440.000.000	48

#### IV. Kendala Pengembangan Ekonomi Kreatif di Kota Mataram

Kendala-kendala yang dihadapi, ekonomi kreatif di Kota Mataram, antara lain:

1. Pengembangan industri kreatif belum optimal, terutama disebabkan:
    - a. kurangnya daya tarik industri
    - b. adanya posisi dominan usaha kreatif
    - c. model bisnis industri kreatif yang belum matang
    - d. serta risiko usaha yang harus dihadapi cukup tinggi
  2. Pengembangan konten, kreasi, dan teknologi kreatif belum optimal, terutama disebabkan:
    - a. infrastruktur internet belum memadai
    - b. infrastruktur gedung pertunjukan/pameran belum tersedia
    - c. mahalnya mesin produksi
    - d. mahalnya piranti lunak penghasil produk dan jasa kreatif
    - e. kurangnya riset konten
    - f. kurangnya aktivitas pengarsipan Konten
  3. Kurangnya perluasan dan penetrasi pasar bagi produk dan jasa kreatif, terutama disebabkan oleh:
    - a. kurangnya apresiasi terhadap kreativitas lokal
    - b. kurangnya konektivitas jalur distribusi, serta adanya larangan ekspor produk kayu ke negara tertentu;
    - c. terkonsentrasinya pasar lokal
    - d. tingginya biaya promosi
    - e. belum diterapkannya sistem pembayaran online
    - f. rendahnya monitoring terhadap royalti, lisensi, hak cipta
  4. Lemahnya institusi industri kreatif, terutama disebabkan oleh:
    - a. belum adanya payung hukum yang mengatur tata kelola masing-masing subsektor industri kreatif
    - b. perlindungan hak cipta belum diperhatikan,
    - c. iklim usaha belum cukup kondusif,
    - d. wadah kreatif sebagai induk subsektor industri kreatif
  5. Minimnya akses pembiayaan pelaku sektor ekonomi kreatif, terutama disebabkan:
    - a. belum sesuai skema pembiayaan dengan karakteristik
    - b. risiko pengembalian pinjaman tinggi industri kreatif yang umumnya belum bankable
    - c. cash flow yang fluktuatif
    - d. aset yang bersifat intangible (semu)
  6. Pengembangan sumber daya ekonomi kreatif belum optimal, baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia, antara lain:
    - a. kelangkaan bahan baku
-



- b. standarisasi dan sertifikasi yang belum baik
- c. kesenjangan antara Pendidikan dan kemajuan industry
- d. kurangnya riset bahan baku
- e. adaptasi terhadap teknologi informasi masih lemah.

## V. Best Practise Pelaksanaan Ekonomi Kreatif Di Indonesia

Provinsi Jawa Barat adalah salah satu provinsi yang dinilai berhasil dan siap mengembangkan ekonomi kreatif dibandingkan provinsi lain. Hal tersebut tercermin dari tingginya kontribusi ekonomi kreatif Jawa Barat terhadap PDB Nasional. Prestasi tersebut tidak terlepas dari masifnya upaya pengembangan ekonomi kreatif disemua kabupaten/kota.

Pada umumnya wilayah kabupaten/kota di provinsi Jawa Barat telah berupaya mengembangkan ekonomi kreatif melalui berbagai inovasi dan kebijakan. Salah satu daerah yang paling menonjol dalam pelaksanaan ekonomi kreatif adalah Kota Bandung yang dalam beberapa waktu terakhir telah mengambil berapa terobosan penting untuk memajukan ekonomi daerah melalui pengembangan ekonomi kreatif, antara lain:

1. Memiliki roadmap pengembangan ekonomi kreatif dan model pembinaan yang diselenggarakan secara berkala;
2. Memiliki agenda even dan pameran hasil ekonomi kreatif;
3. Kota Bandung memiliki Gedung Creative Centre sebagai sarana prasarana bagi masyarakat kreatif bisa menyalurkan kreativitasnya;
4. Sementara secara regional Provinsi Jawa Barat memiliki kelebihan juga, antara lain:
  - a. Pemerintah provinsi Jawa Barat telah memiliki Gedung Gedung Creative Centre;
  - b. Pemprov Jabar gencar membangun Gedung Creative Center di sejumlah kabupaten/kota sebagai bagian dari proyek strategis pada 2019, di antaranya Creative Center di Kota Bandung, Kota Bekasi, Kota Bogor, Kota Cirebon, Kota Tasikmalaya, dan Kab. Purwakarta;
  - c. Rencana dalam lima tahun kedepan akan terbangun di setiap kabupaten/kota Provinsi Jawa Barat;
  - d. Jawa Barat menjadi role model dari implementasi Rindekraf nasional;
  - e. Berbagai komoditas ekraf yang berkembang di Jawa Barat antara lain game developer, seni pertunjukan, film, musik, fotografi, desain komunikasi visual, kriya keramik, kerajinan rotan, kerajinan tangan, fashion, batik, hingga bambu;
  - f. Program pembangunan digitalisasi di kurang lebih 5.000 desa, masyarakat Jawa Barat juga didorong memanfaatkan platform digital untuk memasarkan produk kreatif;

- g. Disparbud Jawa Barat melaksanakan kajian dan pendataan, serta berkolaborasi dalam berbagai program dengan KREASI Jabar, di antaranya
- h. program pengembangan kapasitas (GEKRAF, Virtual Talksho pengembangan jaringan ekosistem ekonomi kreatif Jawa Barat (KREATI FORUM), peningkatan akses pembiayaan (UDUNAN) dan persiapan aktivasi Creative Center;
- i. Komitmen Pemdaprov Jawa Barat dalam pengembangan ekraf terwujud dengan Pusat Ekraf (Creative Hub), dan Badan Ekonomi Kreatif Daerah yang hadir di 27 Kabupaten/Kota se-Jawa Barat. Hal tersebut sebagai upaya penggalan potensi ekraf di setiap Kabupaten/Kota. "Jawa Barat, Provinsi terdepan dalam mengembangkan Ekonomi Kreatif;
- j. Kabupaten Majalengka menjadi sentra berkembangnya kreativitas nasional.

## VI. Strategi Pengembangan Industri Kreatif Kota Mataram

Dengan memperhatikan berbagai permasalahan dan kendala yang menghambat pengembangan ekonomi kreatif Kota Mataram serta dengan mengacu pada hasil analisis faktor internal dan eksternal ekonomi kreatif, maka dalam kajian ini telah merumuskan strategi pengembangan industri kreatif kota mataram, sebagai berikut:

**Tabel 1**  
**Strategi, tujuan dan sasaran pengembangan industri kreatif Kota Mataram**

<b>Strategi Pengembangan</b>	<b>Tujuan dan sasaran pengembangan</b>
Pendataan industri kreatif	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ tersedianya data industri kreatif yang valid</li> <li>✓ tersusunnya portal/data base pusat informasi ekonomi kreatif (SIM, website dan sosial media)</li> <li>✓ mudahnya publik mengakses informasi ekonomi kreatif</li> </ul>
Penyusunan roadmap pengembangan industry kreatif	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ terpetakannya potensi dan permasalahan industri kreatif daerah</li> <li>✓ tersedianya dokumen rencana strategis pengembangan ekonomi kreatif daerah (jangka pendek, menengah dan panjang)</li> <li>✓ dirumuskannya model dan skala prioritas pembinaan industri kreatif daerah</li> <li>✓ tersusunnya rencana aksi pengembangan industry ikreatif.</li> </ul>

Strategi Pengembangan	Tujuan dan sasaran pengembangan
Meningkatkan infrastruktur layanan industri kreatif	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ pembentukan Badan Ekonomi Kreatif Daerah</li> <li>✓ tersedianya internet cepat</li> <li>✓ memfasilitasi pelaku industry memanfaatkan platform digital untuk memasarkan produk kreatif</li> <li>✓ tersedianya gedung creative center sebagai sarana prasarana bagi masyarakat kreatif untuk menyalurkan kreativitasnya</li> <li>✓ terselenggaranya even dan pameran produk industry kreatif daerah.</li> </ul>
Pengembangan jejaring dan kerjasama	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ terjalannya MoU dengan Perguruan Tinggi (KKN Mahasiswa, seminar, dll)</li> <li>✓ terselenggaranya kontak temu pengusaha</li> <li>✓ fasilitasi kerjasama penyediaan skema pembiayaan bagi pelaku ekonomi kreatif dengan lembaga pembiayaan</li> </ul>
Peningkatan kapasitas industry kreatif	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ terselenggaranya pendidikan dan latihan, penyuluhan, transfer teknologi</li> <li>✓ program studi banding, magang, dll</li> <li>✓ pembinaan pengembangan produk, peningkatan mutu dan pemasaran produk</li> <li>✓ standarisasi dan sertifikasi produk</li> <li>✓ meningkatkan sarana dan prasarana produksi melalui bantuan mesin/peralatan, dan membangun loss kerja</li> <li>✓ terselenggaranya program kajian, seminar dll.</li> <li>✓ pembentukan forum pengembangan ekonomi kreatif Kota Mataram.</li> <li>✓ pembinaan komunitas kreatif</li> <li>✓ meningkatkan apresiasi terhadap kreativitas lokal (payung regulasi)</li> <li>✓ meningkatkan monitoring terhadap royalti, lisensi, hak cipta.</li> </ul>

**Tabel 2**  
**Matrik Pentahapan Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif Kota Mataram**  
**Tahun 2021-2025**

No	Rencana Aksi (Indikasi Kegiatan)	2021 - 2022	2023	2024	2025	Penanggungjawab
1	Validasi data industri kreatif	√	√	√	√	√ Dispar
2	Pembuatan portal/data base industri kreatif Kota Mataram	√	√			√ Dispar √ Diskominfo
3	Penyusunan roadmap pengembangan industri kreatif	√				√ Dispar
4	Peningkatan status Sub Bidang Ekonomi Kreatif menjadi Bidang Ekonomi Kreatif pada Dinas Pariwisata	√				√ Walikota
5	Pembentukan Badan Ekonomi Kreatif Daerah		√			√ Walikota
6	Penyediaan internet cepat	√	√	√	√	√ Diskominfo
7	Pelatihan platform digital pelaku industri kreatif untuk pemasaran produk	√	√			√ Dispar √ Disperin,kop,UKM √ Diskominfo
8	Pembangunan gedung creative centre Kota Mataram	√	√	√		√ Dispar √ Dinas PU-PR
9	Penyelenggaraan even dan pameran produk industri kreatif daerah	√	√	√	√	√ Dispar √ Disperin,kop,UKM
10	MoU dengan Perguruan Tinggi (KKN Mahasiswa, seminar, dll)	√				√ Dispar √ Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga √ Perguruan Tinggi
11	Kontak temu pengusaha	√	√			√ Dispar √ Disperin,kop,UKM

12	Fasilitasi penyediaan skema pembiayaan dengan lembaga pembiayaan	√	√			√ Dispar √ Disperin,kop,UKM
13	Penyelenggaraan pendidikan dan latihan, penyuluhan, transfer teknologi	√	√	√	√	√ Dispar √ Disperin,kop,UKM √ Diskominfo
14	Program studi banding, magang, dll	√	√	√	√	√ Dispar √ Disperin,kop,UKM
15	Pembinaan pengembangan produk, peningkatan mutu dan pemasaran produk	√	√	√	√	√ Dispar √ Disperin,kop,UKM
16	Standarisasi dan sertifikasi produk		√	√	√	√ Dispar √ Disperin,kop,UKM
17	Bantuan mesin/peralatan, dan membangun loss kerja	√	√	√	√	√ Dispar √ Disperin,kop,UKM
18	Kajian,seminar, peningkatan kapasitas lainnya	√	√	√	√	√ Balitbang √ Perguruan Tinggi √ Dispar √ Disperin,kop,UKM
19	Pembentukan forum Pengembangan ekonomi kreatif Kota Mataram.	√	√			√ Dispar √ Disperin,kop,UKM
20	Pembinaan komunitas kreatif	√	√	√	√	√ Dispar √ Disperin,kop,UKM √ Diskominfo
21	Perlindungan produk (royalti, lisensi, hak cipta)	√	√	√	√	√ Dispar √ Disperin,kop,UKM
22	Fasilitasi partisipasi insan kreatif berprestasi pada lomba tingkat provinsi, nasional dan internasional	√	√	√	√	√ Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga √ Dispar

23	Penyelenggaraan lomba ekonomi kreatif Kota Mataram (Sayembara desain arsitektur, desain produk, desain fashion, film, musik, kesenian, permainan interaktif, dll)	√	√	√	√	√ Dispar
24	Sosialisasi peningkatan wirausaha baru	√	√	√	√	√ Disperin,kop,UKM √ Dispar √ DPMPSTP
25	Sosialisasi regulasi dibidang perijinan IKM dan industri kreatif.	√	√			√ Disperin,kop,UKM √ Dispar √ DPMPSTP
26	Sosialisasi HAKI kepada masyarakat	√	√	√	√	√ Disperin,kop,UKM √ Dispar
27	Pengembangan jurusan SMK berbasis ekonomi kreatif (misalnya computer, Desain Grafis, fotografi, dll).	√	√	√	√	√ Dinas Pendidikan, pemuda dan Olah Raga
28	Pengembangan ekstrakurikuler sekolah yang telah ada (misalnya seni pertunjukan, musik) dan penyediaan ekstrakurikuler baru (misalnya pengembangan desain, fotografi, kerajinan, permainan interaktif).	√	√	√	√	√ Dinas Pendidikan, pemuda dan Olah Raga
29	Fasilitasi promosi produk IKM dan industri kreatif Kota Mataram secara online.	√	√	√	√	√ Dispar √ Disperin,kop,UKM
30	Fasilitasi IKM dan industri kreatif pada pameran di luar daerah.	√	√	√	√	√ Dispar √ Disperin,kop,UKM
31	Penyelenggaraan pameran produk ekonomi kreatif Kota Mataram	√	√	√	√	√ Dispar
32	Pengembangan cluster industri kreatif Kota Mataram.	√	√	√	√	√ Dispar
33	Penataan sentra industri kreatif Kota Mataram.	√				√ Dispar

34	Kajian tentang basis teknologi pendukung ekonomi kreatif Kota Mataram	√	√			√ Balitbang
35	Fasilitasi kerjasama pengembangan teknologi pendukung industry ekonomi kreatif.	√	√	√	√	√ Dispar √ Diskominfo

## F. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisa SWOT terhadap faktor internal dan eksternal industri kreatif Kota Mataram, maka peta pengembangan subsektor ekonomi kreatif diklasifikasi dalam 5 (lima) kelompok dengan tingkat :

1. Pengembangan sangat tinggi dan unggul terdiri dari kuliner, fashion dan kriya.
2. Pengembangan tinggi terdiri dari, Desain Komunikasi Visual; TV dan Radio dan Penerbitan.
3. Pengembangan sedang terdiri dari Musik; Arsitektur dan Desain Interior.
4. Pengembangan rendah terdiri dari Aaplikasi dan game developeri; Periklanan; Desain produk; dan Fotografi.
5. Pengembangan sangat rendah terdiri dari film, animasi dan video, seni pertunjukan dan seni rupa.

Penghambat pengembangan industri kreatif di Kota Mataram, antara lain:

- a. Pengembangan industri kreatif belum optimal,
- b. Pengembangan konten, kreasi, dan teknologi kreatif belum optimal,
- c. Kurangnya perluasan dan penetrasi pasar bagi produk dan jasa kreatif:
  - Lemahnya institusi industri kreatif,
  - Minimnya akses pembiayaan
  - Pengembangan sumber daya ekonomi kreatif belum optimal.

## G. Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan tersebut diatas, maka dirumuskanlah beberapa rekomendasi, sebagai berikut:

- 1 Update dan validasi data
- 2 Penyusunan roadmap pengembangan industri kreatif
- 3 Meningkatkan infrastruktur layanan industri kreatif

- 4 Mengembangkan jejaring dan kerjasama
- 5 Peningkatan Kapasitas Industri kreatif

### Daftar Pustaka

Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Mataram, 2021, Laporan Akhir Pemetaan  
Peluang Pengembangan Ekonomi Kreatif Kota Mataram di Era 4 titik nol (4.0 ).  
Mataram



# Kajian Model Pengembangan Wisata Kota Sebagai Pusat Destinasi Wisata Kota Mataram

## Abstrak

Berkembangnya sektor pariwisata di kawasan pulau Lombok menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah daerah Kota Mataram. Pemerintah Kota Mataram melalui terus berupaya mencari terobosan, baik dalam bentuk program maupun kebijakan yang mampu mendorong kemajuan pariwisata atau meningkatnya kontribusi sektor pariwisata dalam membangun citra daerah, pertumbuhan ekonomi, mendorong tumbuhnya investasi, terbukanya kesempatan kerja dan meningkatnya pendapatan masyarakat. Kajian Model Pengembangan Wisata Kota Sebagai Pusat Destinasi Wisata Kota Mataram dimaksudkan untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan mengkaji mengenai potensi, kondisi eksisting pariwisata Kota Mataram serta merumuskan strategi pengembangan pariwisata Kota Mataram. Dari hasil identifikasi di temukan bahwa sebanyak 22 obyek wisata tersebar di Kota Mataram. Pengembangan pariwisata di Kota Mataram secara bertahap dengan memperhatikan urutan prioritas variabel yaitu Kebijakan, Kelembagaan, Transportasi, Jumlah Wisatawan, Atraksi Wisata, Linkage System, Promosi, dan Fasilitas. Sementara itu, model yang tepat dalam Pengembangan pariwisata Kota Mataram mengusung model gabungan (mix model) yaitu: "Pariwisata budaya (heritage tourism), kreatif (new urban tourism), berwawasan lingkungan (Urban ecotourism).

*Kata kunci: Kota Mataram, Pariwisata, Wisatawan*

### A. Latar Belakang

Kota merupakan salahsatu destinasi wisata yang paling penting didunia sejak tahun 1980-an (Law, 1996). Kota Mataram sebagai ibukota Provinsi Nusa Tenggara Barat juga sebagai pusat pemerintahan, pusat pendidikan, pusat prekonomian, pusat seni dan budaya, serta jasa, menjadi salahsatu destinasi wisata di Pulau Lombok dan salahsatu destinasi wisata unggulan Indonesia, secara geografis letaknya dekat dengan kawasan KEK Mandalika yang berada di selatan pulau Lombok dimana terdapat kawasan resort wisata bertaraf internasional di lengkapi pula sirkuit balapan MotoGP jalan raya pertama didunia dimana event tahunan tersebut akan dihadiri oleh wisatawan dari berbagai penjuru dunia, tentu akan menjadi kawasan urban yang menjadi barometer kemajuan pariwisata dikawasan regional Nusa Tenggara Barat.

Berkembangnya sektor pariwisata di kawasan pulau Lombok menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah daerah Kota Mataram untuk terus berkreasi dan berinovasi mengembangkan pariwisata daerahnya demi terciptanya daya saing daerah dan menciptakan peningkatan peranan sektor pariwisata dalam menunjang kemajuan daerah. Pemerintah Kota Mataram melalui Dinas Pariwisata Kota Mataram terus berupaya mencari terobosan, baik dalam bentuk program maupun kebijakan yang mampu mendorong kemajuan pariwisata atau meningkatnya kontribusi sektor pariwisata dalam membangun

citra daerah, pertumbuhan ekonomi, mendorong tumbuhnya investasi, terbukanya kesempatan kerja dan meningkatnya pendapatan masyarakat, sehingga secara makro terciptanya kemajuan Kota Mataram secara khusus serta kemajuan kawasan Pulau Lombok pada umumnya.

## B. Permasalahan

Sejumlah potensi yang ada belum mampu menjadi yang terdepan sebagai pusat destinasi dan masih berada dibawah Kabupaten Lombok Barat dan Kabupaten Lombok Utara dalam hal jumlah kunjungan wisatawan. Tahun 2020, jumlah wisatawan yang berkunjung di NTB sebanyak 1.033.575 orang terdiri dari Wisatawan mancanegara sebanyak 70.995 orang dan wisatawan nusantara sebanyak 962.580 orang. Jumlah wisatawan yang berkunjung di Kota Mataram pada tahun 2020 ditargetkan sebanyak 823.000 orang, baik wisatawan mancanegara, lokal dan wisatawan nusantara, namun akibat pandemi Covid- 19 target tersebut tidak mampu dicapai, mengingat realisasi kunjungan pada tahun 2020 yang semakin menurun, hanya mencapai 42.213 orang dibanding tahun sebelumnya 2019 sebanyak 154.395 orang, dan tahun 2018 sebanyak 671.587 orang.

## C. Tujuan

Tujuan dilakukannya Kajian Model Pengembangan Wisata Kota Sebagai Pusat Destinasi Wisata Kota Mataram, untuk:

1. Mengidentifikasi, menganalisis, dan mengkaji mengenai potensi, kondisi eksisting pariwisata Kota Mataram;
2. Merumuskan strategi pengembangan pariwisata Kota Mataram.

## D. Metode Penelitian

Metode analisis dalam penelitian ini menggunakan paradigma interpretative (pendekatan utama) pada dasarnya bertujuan untuk menggambarkan sifat dan pola pada suatu fenomena sosial, sebagai suatu upaya ilmiah untuk dapat memberikan pemahaman sesuai dengan realitas di lapangan. Dengan demikian, menjadi signifikan dari suatu deskripsi sebagai suatu jawaban atas permasalahan sosial yang sedang diteliti.

## E. Pokok-Pokok Hasil Analisa

Kota Mataram memiliki beberapa obyek wisata yang dapat dikembangkan. Dalam kajian ini terdapat 22 obyek wisata yang dikaji merupakan obyek wisata yang tersebar disuluruh wilayah Kecamatan, antara lain:

- a. kawasan Kecamatan Cakranegara
  1. Taman Mayura
  2. Pusat Kuliner Taliwang

3. Pasar Seni Sayang-Sayang
4. Pusat Kuliner Sayang-Sayang
5. Pura Meru
6. Mataram Mall
- b. kawasan Kecamatan Sandubaya
  1. Taman Selagalas
- c. kawasan Kecamatan Ampenan
  1. Kota Tua Ampenan
  2. Pantai Ampenan
  3. Museum Negeri NTB
  4. Taman Malomba
- d. kawasan Kecamatan Sekarbela
  1. Pusat Kerajinan Mutiara Sekarbela
  2. Makam Loang Baloq
  3. Taman Loang Baloq
  4. Pantai Tanjung Karang
  5. Pantai Mapak Gading
- e. kawasan Kecamatan Mataram
  1. Taman Sangkareang
  2. MCC Pagesangan
  3. Epicentrum Mall
- a. kawasan Kecamatan Mataram
  1. Islamic Center
  2. Taman Udayana
  3. Pusat Kuliner Rembiga

#### 1. Jumlah Kunjungan Wisatawan Ke Kota Mataram

Kunjungan wisatawan tahun 2020 menurun dan hanya mencapai 42.213 orang, hal ini merupakan pengaruh gempa bumi yang melanda pulau Lombok, pada tahun sebelumnya 2019 jumlah kunjungan wisatawan sebanyak 154.395 orang, dan tahun 2018 sebanyak 671.587 orang. capaian tertinggi tahun 2017 dengan jumlah wisatawan sebanyak 714.291 orang. Kondisi pariwisata pada tahun 2021 pun mengalami tingkat penurunan terparah akibat terjadinya pandemi covid-19 yang melanda hampir seluruh dunia termasuk Kota Mataram.

Jika dilihat dari persentase wisatawan mancanegara dengan wisatawan nusantara, probabilitasnya mencapai 7% wisatawan mancanegara bernading 93% wisatawan nusantara, kondisi ini terjadi pada tahun 2020.

Sementara itu secara umum persepsi responden terhadap daya tarik wisata perkotaan (urban tourism) di Kota Mataram dengan nilai rata-rata 2,89. Nilai tersebut menunjukkan bahwa daya tarik wisata perkotaan (urban tourism) di Kota Mataram cukup menarik, sedangkan persepsi publik terhadap kinerja sebesar 3,02, nilai tersebut menunjukkan bahwa kinerja pariwisata Kota Mataram berkinerja bagus. Dari kedua indikator membentuk

nilai rata-rata kepentingan obyek wisata Kota Mataram sebesar 3,00, artinya pengelolaan obyek wisata perkotaan (urban tourism) di Kota Mataram dikategorikan BAIK. Tentu saja hasil tersebut dicapai dari penilaian terhadap atraksi yang disajikan obyek wisata dan kinerja atas ketersediaan fasilitas, kemudahan akses untuk mencapai obyek wisata, serta dukungan lainnya seperti promosi dan agen perjalanan. Nilai daya tarik wisata tertinggi yaitu Masjid Raya Hubbul Wathan Islamic Centre sebesar 3,98 sedangkan terendah yaitu Pantai Tanjung Karang sebesar 2,04.

## 2. Alternatif Strategi Pengembangan Pariwisata di Kota Mataram

Strategi pengembangan mutlak harus dirumuskan setelah melihat kondisi pertumbuhan kebutuhan pasar terhadap pariwisata di Kota Mataram yang meningkat lebih besar dari pada potensi pariwisata yang dimiliki oleh Kota Mataram. Strategi pengembangan dilakukan secara bertahap dan target disesuaikan dengan kondisi. Pengembangan secara bertahap dilakukan berdasarkan dengan urutan prioritas variabel yang didapatkan dari pendapat stakeholder. Beberapa alternatif strategi pariwisata perkotaan di Kota Mataram diuraikan sebagai berikut ini.

### Alternatif Strategi pariwisata perkotaan Kota Mataram

Variabel	Alternatif Strategi
Kebijakan	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ merumuskan kebijakan pengembangan pariwisata berkelanjutan, ramah lingkungan, terintegrasi dan mensosialisasikan kebijakan pariwisata Kota Mataram secara umum pada masyarakat melalui media (cetak, on-line);</li> <li>✓ mensosialisasikan kebijakan setiap obyek wisata melalui penerapan kebijakan program.</li> </ul>
Kelembagaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ pembagian kerja yang jelas antara tugas organisasi perangkat daerah (OPD) Kota Mataram dan swasta dalam mengelola obyek wisata di Kota Mataram serta tindakan pemeliharaan fasilitas umum obyek wisata;</li> <li>✓ menggandeng lebih banyak lembaga swasta untuk saling bekerjasama mengembangkan pariwisata Kota Mataram.</li> </ul>
Transportasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ mendorong peremajaan moda transportasi umum yang layak sehingga menarik untuk ditumpangi;</li> <li>✓ mengalokasikan moda angkutan umum yang modern (bus tingkat) untuk mendukung angkutan publik penunjang pariwisata;</li> <li>✓ membuat kebijakan penentuan rute angkutan umum yang melintasi seluruh obyek wisata Kota Mataram.</li> </ul>
Jumlah Wisatawan	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ meningkatkan jumlah wisatawan melalui peningkatan kualitas pariwisata perkotaan Kota Mataram;</li> <li>✓ membuat inovasi baru kegiatan wisata di Kota Mataram untuk menarik minat wisatawan.</li> </ul>

Atraksi Wisata	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ mengembangkan atraksi wisata di Kota Mataram dengan mengemas atraksi lebih menarik berupa paket perjalanan wisata, festival, pameran, even-even;</li> <li>✓ menambah atraksi wisata berupa wisata buatan.</li> </ul>
Linkage System	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ menghubungkan daya tarik wisata melalui pengadaan kegiatan yang spesifik dan saling melengkapi antar obyek wisata;</li> <li>✓ mengadakan agenda kegiatan secara bergantian dan berkelanjutan untuk menjaga hubungan antar obyek wisata.</li> </ul>
Promosi	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ mengadakan kegiatan promosi melalui berbagai media (cetak, berbasis digital);</li> <li>✓ menggandeng lebih banyak para youtuber-youtuber sebagai duta pariwisata Kota Mataram;</li> <li>✓ memberikan apresiasi dan penghargaan terhadap pegiat wisata yang telah mempromosikan pariwisata Kota Mataram.</li> </ul>
Fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ memperbaiki dan merawat fasilitas wisata pada setiap obyek wisata Kota Mataram;</li> <li>✓ membuat inovasi baru terhadap fasilitas wisata agar terus menarik secara berkelanjutan.</li> </ul>

### 3. Analisa Evaluasi Setiap Alternatif

Hasil akhir evaluasi alternatif strategi potensi pariwisata perkotaan di Kota Mataram

Variabel	Alternatif Strategi	Keberhasilan Kebijakan
Kebijakan	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ mensosialisasikan kebijakan pariwisata Kota Mataram secara umum pada masyarakat melalui media promosi langsung dan tidak langsung</li> </ul>	sedang
	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ mensosialisasikan kebijakan daya tarik wisata melalui penerapan program kebijakan</li> </ul>	sedang
Kelembagaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ pembagian kerja yang jelas antara tugas organisasi perangkat daerah (OPD) Kota Mataram dengan pihak swasta dalam mengelola setiap obyek wisata Kota Mataram serta tindakan pemeliharaan fasilitas umum wisata</li> </ul>	sedang
	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ menggandeng lebih banyak lembaga swasta untuk saling bekerjasama mengembangkan pariwisata Kota Mataram</li> </ul>	rendah
Transportasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ mengalokasikan moda angkutan umum untuk mendukung angkutan wisata</li> </ul>	sedang
	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ membuat rute angkutan umum yang melintasi seluruh obyek wisata Kota Mataram</li> </ul>	rendah

Jumlah Wisatawan	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ meningkatkan jumlah wisatawan melalui peningkatan kualitas pariwisata perkotaan Kota Mataram</li> <li>✓ membuat inovasi baru kegiatan wisata di Kota Mataram untuk menambah jumlah wisatawan</li> </ul>	sedang  rendah
Atraksi Wisata	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ mengembangkan atraksi wisata di Kota Mataram dengan mengemas atraksi lebih menarik berupa paket perjalanan wisata, festival, pameran</li> <li>✓ menambah atraksi wisata berupa wisata buatan</li> </ul>	sedang  rendah
Linkage System	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ menghubungkan daya tarik wisata melalui pengadaan kegiatan yang saling melengkapi antar lokasi wisata Kota Mataram</li> <li>✓ mengadakan agenda kegiatan secara bergantian dan berkelanjutan untuk menjaga hubungan antar obyek wisata Kota Mataram</li> </ul>	sedang  rendah
Promosi	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ mengadakan kegiatan promosi melalui berbagai media</li> <li>✓ mengadakan promosi melalui agenda kegiatan duta pariwisata Kota Mataram</li> </ul>	sedang  rendah
Fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ memperbaiki dan merawat fasilitas wisata pada setiap obyek wisata Kota Mataram</li> <li>✓ membuat inovasi baru terhadap fasilitas wisata agar lebih berkelanjutan</li> </ul>	rendah  rendah

#### 4. Model Pengembangan Pariwisata Kota Mataram

Dengan memperhatikan potensi, kendala yang terjadi terkait pariwisata Kota Mataram yang berlangsung selama ini, dan hasil analisis dan temuan kajian ini, serta dengan memperhatikan konsep dan teori pariwisata perkotaan yang dikemukakan oleh para ahli, maka dirumuskan model pengembangan pariwisata Kota Mataram agar diharapkan mampu bersaing dengan pariwisata daerah lain dan menjadi terdepan sebagai pusat destinasi wisata unggul di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Pengembangan pariwisata Kota Mataram mengusung model gabungan (mix model) yaitu: "Pariwisata budaya (heritage tourism), kreatif (new urban tourism), berwawasan lingkungan (Urban ecotourism), deskripsi dari model tersebut, yaitu:

- a. budaya: dimaknai sebagai upaya mengusung serta mendukung pengembangan wisata religi, budaya (heritage tourism yang selama ini telah ada sehingga terus ditingkatkan dan dikembangkan demi keberlanjutannya);
- b. kreatif: konsep menyatukan, memadukan wisata religi, budaya, alam, buatan dengan wisata belanja, wisata kuliner (wisatawan harus terbangun imagenya, bahwa "belum

datang ke Kota Mataram jika belum berbelanja produk ekonomi kreatif kriya emas/perak/mutiara, dan cukli, serta menikmati kuliner khas Kota Mataram);

- c. berwawasan lingkungan: mengembangkan wisata alam dan buatan (mengutamakan pemanfaatan lingkungan perkotaan yang terbatas sumberdaya wisata alamnya untuk terus berinovasi menciptakan wisata buatan yang ramah lingkungan. Dalam skala yang lebih luas terus meningkatkan dukungan infrastruktur dan tatakelola agar Kota Mataram menjadi pusat MICE terkemuka di Indonesia.

Untuk itu pemerintah daerah dan stakeholder terkait harus memperhatikan dan menetapkan tindakan kongkret untuk mengusung model pengembangan Pariwisata budaya (*heritage tourism*), kreatif (*new urban tourism*), berwawasan lingkungan (*Urban ecotourism*) dimaksud berupa Pariwisata budaya (*heritage tourism*), kreatif (*new urban tourism*), dan berwawasan lingkungan (*Urban ecotourism*):

## F. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan analisis yang telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya, maka hasil penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Persepsi publik terhadap daya tarik wisata perkotaan (*urban tourism*) Kota Mataram masuk dalam kategori cukup menarik dengan nilai rata-rata 2,89, dan persepsi terhadap kinerja bagus dengan nilai rata-rata 3,02, sehingga penilai publik terhadap kepentingan kinerja pariwisata Kota Mataram baik dengan nilai rata-rata 3,00.
2. Obyek wisata di Kota Mataram turut berkontribusi terhadap peningkatan Aktifitas ekonomi.
3. Kondisi pariwisata Kota Mataram cukup berkembang, meskipun ada beberapa hal perlu ditingkat.
4. Untuk menjadikan pariwisata Kota Mataram mampu bersaing dengan pariwisata daerah lain dan menjadi terdepan sebagai pusat destinasi wisata unggul di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Pengembangan pariwisata Kota Mataram mengusung model gabungan (*mix model*), yaitu: "Pariwisata budaya (*heritage tourism*), kreatif (*new urban tourism*), berwawasan lingkungan (*Urban ecotourism*).

## G. Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka dapat dirumuskan beberapa rekomendasi sebagai berikut:

- a) Pariwisata budaya (*heritage tourism*):
  - ✓ menyelenggarakan kalender even atraksi religi, budaya spesifik yang ikonik secara konsisten dan berkelanjutan, misal kalender tahunan Islam seperti zikir akbar, tabliq akbar, kalender tahunan Hindu seperti perayaan piodalan yaitu perayaan mengingat lahir kembalinya pura Meru dan perayaan pujawali yang terjadi di pura Meru dan taman Mayura, serta kegiatan budaya lainnya seperti jiarah makam di loang Baloq;

- ✓ meningkatkan penyelenggaraan even seni budaya lokal (koordinasi pemanfaatan taman budaya NTB).
- b) kreatif (*new urban tourism*):
- ✓ mempertahankan citra wisata kuliner yang sudah berkembang (kawasan Rembiga, kawasan Sayang-Sayang, kawasan Karang Taliwang);
  - ✓ mengembangkan kawasan kuliner baru di kawasan pantai dan kawasan selatan jalan lingkar);
  - ✓ mempertahankan citra wisata belanja kerajinan emas, perak, mutiara kawasan Sekarbela;
  - ✓ mengembangkan fungsi MCC sebagai pusat pedagang produk-produk ekonomi produktif lokal selain kerajinan mutiara;
  - ✓ mengembangkan sentra kerajinan mutiara Pagutan & sentra kerajinan emas, perak Kamasan;
  - ✓ mempertahankan citra belanja kerajinan Cukli Sayang-Sayang yang saat ini telah berkembang;
  - ✓ mengembangkan pasar seni Sayang-Sayang menjadi bale kreatif center;
  - ✓ kebijakan care Free Night tiap malam minggu di Jalan Langko;
  - ✓ menyediakan papan informasi, deskripsi sejarah singkat di tiap obyek wisata;
- c) berwawasan lingkungan (*Urban ecotourism*):
- ✓ pemanfaatan eks bandara Selaparang untuk wisata kuliner dan MICE;
  - ✓ pengembangan wisata air jeram kali Jangkok;
  - ✓ pengembangan kawasan wisata sempadan sungai Jangkok;
  - ✓ mengembangkan atraksi wisata yang spesifik dimasing-masing obyek wisata serta mengadakan kegiatan yang saling melengkapi;
  - ✓ mengembangkan kawasan atraksi wisata permainan anak yang moderen dan lengkap;
  - ✓ mengkampanyekan gerakan bersih dan sehat lingkungan obyek wisata.
  - ✓ mengembangkan sistim tatakelola obyek wisata berbasis digital;
  - ✓ membuka trayek angkutan umum yang menghubungkan antar destinasi wisata dengan destinasi wisata yang lainnya;
  - ✓ menyediakan moda angkutan umum yang modern dan ramah lingkungan berpengerak listrik (bus tingkat city tour) untuk mendukung angkutan publik penunjang pariwisata.

## Daftar Pustaka

Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Mataram, 2021, Laporan Akhir Penelitian Model Pengembangan Wisata Kota sebagai Pusat Destinasi Wisata Kota Mataram. Mataram



# Kajian Pemberian Dana Jaring Pengaman Sosial (Jps) Terhadap Sasaran Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Sosial Di Kota Mataram

## Abstrak

Di Kota Mataram, dampak Covid-19 masuk pada semua sektor, bukan hanya persoalan kesehatan, melainkan juga persoalan sosial, politik, terlebih yang paling dirasakan adalah pada sektor ekonomi. Salah satu upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota Mataram dalam penanganan dampak covid-19 yaitu dengan mengeluarkan kebijakan pemberian bantuan senilai RP. 21 Milyar untuk program Jaring Pengaman Sosial (JPS). Dengan menggunakan metode deskriptif yaitu gabungan antara kualitatif dengan kuantitatif. Penelitian ini menemukan Implementasi program jaring pengaman sosial (JPS) dari APBD Kota Mataram Tahun 2020 meringankan beban 34.160 kepala keluarga (KK) atau 27,57% dari total kepala keluarga (KK) Kota Mataram, dan mengcover seluruh kepala keluarga (KK) miskin yang mencapai 10.496 KK, serta masyarakat yang rentan miskin, pekerja yang dirumahkan atau korban pemutusan hubungan kerja (PHK), dan UMKM mengalami hambatan berusaha akibat kehabisan modal usaha. Hambatan dalam pelaksanaan program adalah Sistem informasi belum terpadu menyebabkan pengambilan keputusan menjadi lamban, pihak Kelurahan tidak memiliki operator yang bisa menghendel sistem layanan informasi yang berkaitan dengan bantuan sosial yang ada di Dinas Sosial. Oleh karenanya perlu dilakukan digitalisasi bantuan sosial dan membuat basis data terpadu yang berada di tingkat kelurahan yang terintegrasi dengan kecamatan, Dinas Sosial, dan Organisasi Perangkat Daerah terkait lainnya.

*Kata kunci: Jaring Pengaman Sosial, Kota Mataram, Dinas Sosial*

### A. Latar belakang

Di Kota Mataram, dampak Covid-19 masuk pada semua sektor, bukan hanya persoalan kesehatan, melainkan juga persoalan sosial, politik, terlebih yang paling dirasakan adalah pada sektor ekonomi. Dilansir dari Lombokpost.com, Pertumbuhan ekonomi Kota Mataram awal Maret 2021 merosot hingga minus 5,5 persen. Artinya, secara agregat nilai tambah ekonomi secara ril mengalami penurunan sebesar -5,50 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Ditambah, kunjungan tamu hingga wisatawan dari luar daerah dan luar negeri menurun drastis. Mengakibatkan roda perekonomian sulit berputar. Perekonomian Kota Mataram yang biasanya mengalami pertumbuhan ekonomi di atas rata-rata nasional, selama tahun 2020 ternyata merosot drastis bahkan minus. Padahal, sepuluh tahun terakhir capaian indikator pertumbuhan ekonomi Kota Mataram sangat membanggakan. Namun tahun 2020 ekonomi sangat terpuruk akibat Korona. Bahkan negara mengalami resesi. Hal ini kemudian berdampak pada pertumbuhan ekonomi yang mengalami minus.

Salah satu upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota Mataram dalam penanganan dampak covid-19 yaitu dengan mengeluarkan kebijakan pemberian bantuan senilai RP. 21 Milyar untuk program Jaring Pengaman Sosial (JPS), pendistribusian bantuan

JPS di kota Mataram diperuntukan bagi sekitar 32.548 Kepala Keluarga (KK) pada tahap pertama, yaitu juli (Lombok Post, 2020). Ampenan merupakan salah satu Kecamatan dengan jumlah penerima bantuan JPS Kota Mataram terbesar, yaitu sebanyak 8962 KK. Sedangkan Sekarbela merupakan kecamatan dengan jumlah penerima terkecil, yaitu sebanyak 2.345 KK. Hal ini tentu dipengaruhi oleh jumlah penyebaran kasus serta jumlah penduduk pada kecamatan penerima bantuan. Selanjutnya, pemberian bantuan JPS ini perlu dilihat lebih jauh untuk mengukur ketepatan, pendistribusi, dan manfaat bantuan sehingga dapat memberi dampak positif terhadap kehidupan masyarakat kota Mataram khususnya di tengah dampak wabah Covid-19.

Untuk menilai lebih jauh bagaimana pelaksanaan pemberian bantuan JPS oleh Pemerintah Kota Mataram tersebut, dipandang perlu dilakukannya penelitian dan kajian secara mendalam guna menganalisa dampak dan kebermanfaatannya implementasi pemberian program jaring pengaman sosial (JPS) yang telah dilakukan oleh pemerintah Kota Mataram terhadap masyarakat terdampak Covid- 19. Penilaian yang dimaksud adalah terkait efektivitas program, pelaksanaan program dilapangan serta ketepatan sasaran dari program ini.

## **B. Rumusan Masalah**

Rumusan masalah yang diangkat dalam kajian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah implementasi Pemberian dana Jaringan Pengaman Sosial (JPS) terhadap sasaran keluarga penerima manfaat bantuan sosial di Kota Mataram Tahun 2020?
2. Bagaimanakah dampak dan manfaat Pemberian dana Jaringan Pengaman Sosial (JPS) terhadap sasaran keluarga penerima manfaat bantuan sosial di Kota Mataram Tahun 2020?

## **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. mengetahui dan mendeskripsikan bagaimanakah implementasi pemberian dana Jaringan Pengaman Sosial (JPS) di lapangan terhadap sasaran keluarga penerima manfaat bantuan sosial di Kota Mataram Tahun 2020;
2. mengetahui dan menggambarkan bagaimana dampak dan manfaat Pemberian dana Jaringan Pengaman Sosial (JPS) terhadap sasaran keluarga penerima manfaat bantuan sosial di kota Mataram Tahun 2020.

## D. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif yaitu gabungan antara kualitatif dengan kuantitatif. Penelitian deskriptif merupakan salah satu bentuk metode penelitian yang berfungsi untuk menyajikan gambaran lengkap mengenai setting sosial atau untuk eksplorasi dan klarifikasi, yang terbentuk dengan cara mendeskripsikan suatu fenomena peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam kehidupan manusia.

## E. Pokok-pokok Hasil Analisa

### 1. Implementasi Kebijakan Pemberian Bantuan Jaring Pengaman Sosial (JPS)

Berdasarkan temuan peneliti dilapangan, mekanisme pelaksanaan pendataan calon penerima jaring pengaman sosial (JPS) dampak Covid-19 oleh Dinas Sosial Kota Mataram, yaitu:

- a. menggunakan data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS), serta data dari sektor formal dan informal;
- b. data yang berasal dari stakeholder terkait yang ditugaskan menangani dampak Covid-19;
- c. pendataan dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Mataram dan diverifikasi oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk memastikan bahwa data yang ada itu benar-benar warga Kota Mataram.

Proses pendataan diatas dinilai cukup lemah, karena tidak melibatkan unsur Kelurahan, dan Kecamatan sebagai perangkat pemerintah yang langsung bersentuhan dengan masyarakat, yang dapat menjamin validitas dan akurasi data calon penerima.

Sementara itu, penyediaan data pekerja sektor formal dan informal bersumber langsung dari Dinas Sosial Kota Mataram dimana telah terekam data pekerja yang terdampak pandemi Covid-19. Penentuan kebijakan model pendataan ini berdasarkan kondisi saat ini, dimana dianggap mendesak untuk segera didistribusikan bantuan program JPS kepada calon penerima. Hal ini mengingat wabah Covid-19 yang terus berlangung dan berkembang begitu pesat, yang berdampak pada aktifitas sosial dan ekonomi masyarakat dimana banyak sektor publik dan bisnis ditutup ataupun dibuka secara terbatas. Kondisi lain yang menyebabkan proses pendataan dipercepat karena situasi dan tekanan masyarakat yang juga membutuhkan bantuan dari pemerintah sebagai aktualisasi dari penyelenggaraan Negara. Dimana pemerintah wajib melindungi kehidupan ditengah kondisi kedarurat yang cukup tinggi, sebagai akibat dari kebijakan pendataan cepat ini, memunculkan beberapa persoalan seperti:

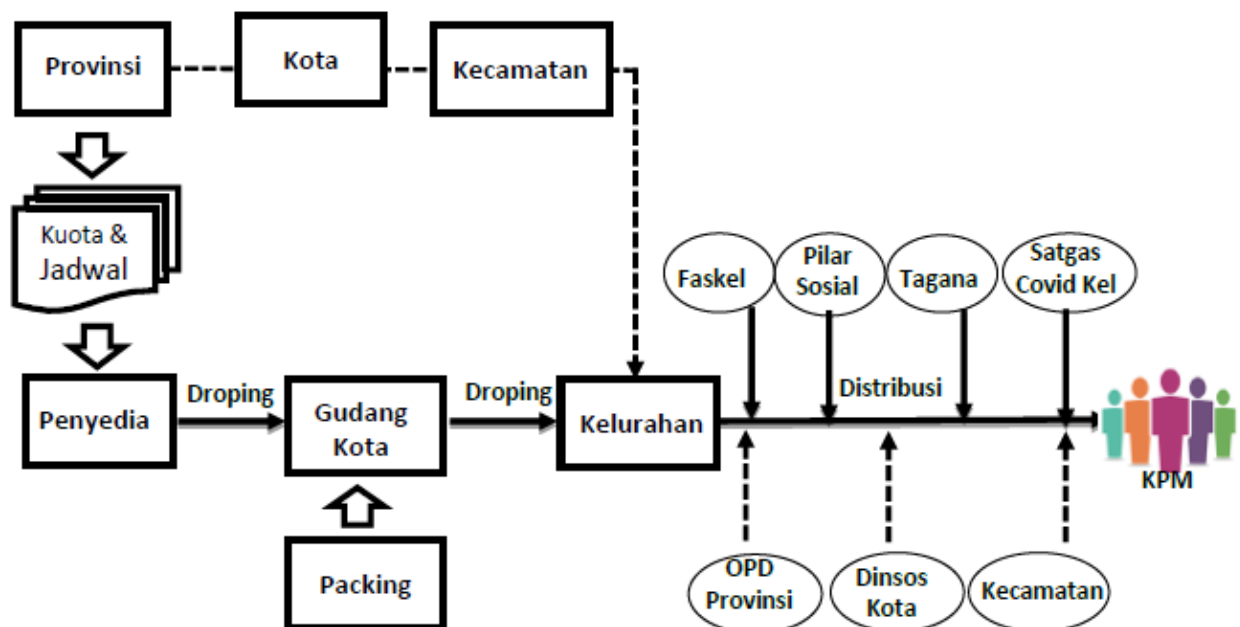
- a) adanya data ganda, ditemukan sekitar 1.700 KK atau (4,98%) data ganda penerima jaring pengaman sosial (JPS) Kota Mataram;
- b) munculnya data pekerja sektor formal yang informal yang datanya sangat incidental. Idealnya, data pekerja formal dan informal telah diverifikasi terlebih dahulu di tingkat

Kelurahan sebelum diserahkan pada tingkat lebih atas. Sehingga tidak muncul kasus data ganda atau tidak tepat sasaran;

- c) Pada beberapa wilayah, masih ditemukan kasus orang yang menerima bantuan dengan KTP Kota Mataram, namun berdomisili di luar Kota Mataram.

Pada proses pendistribusian bantuan program jaring pengaman sosial (JPS), berdasarkan temuan peneliti dilapangan, pada dasarnya telah dilakukan dengan proses yang terstruktur, meskipun disana sini masih terdapat hal-hal yang perlu diperbaiki kedepan jika terdapat kegiatan yang serupa yang memerlukan penanganan secara komprehensif, teliti dan terukur. Dinas Sosial sebagai sentral yang mengkoordinir dengan berbasiskan pada data yang sudah ada, telah memastikan persiapan bahan bantuan hingga distribusi telah melalui tahapan-tahapan yang semestinya, sebagaimana yang diatur dalam gambar 1 mengenai skema distribusi paket JPS.

Gambar 1. Skema Distribusi Paket JPS



Proses pembagian bantuan paket jaring pengaman sosial (JPS) dibagikan secara langsung, dimana para penerima mendatangi pusat pembagian dalam satu kawasan terbatas untuk agenda seremoni yang diwakili oleh berapa orang warga dari masing-masing kelurahan, selanjutnya untuk penerima bantuan paket jaring pengaman sosial (JPS) yang lain ditindaklanjuti oleh masing-masing pihak di tiap-tiap lingkungannya agar bantuan yang dimaksud tersebar secara merata, prinsip penyaluran secara merata inilah terkadang diartikan oleh oknum panitia sebagai dasar untuk menyalurkan paket bantuan pada penerima lain yang semestinya tidak berhak menerima, makanya tidak heran pula terjadi overlapping sasaran penerima.

Dari segi kualitas dan kuantitas bantuan program jaring pengaman sosial (JPS) berupa paket sembako, dalam rangka penanganan kedaruratan masyarakat akibat wabah Covid-19 yang terjadi di Kota Mataram, namun, di lapangan ditemukan banyak keluhan masyarakat atas implementasi kebijakan program jaring pengaman sosial (JPS), antara lain:

- a) program jaring pengaman sosial (JPS) dinilai kurang efektif
- b) nominal bantuan program jaring pengaman sosial (JPS) terlalu kecil
- c) paket sembako program jaring pengaman sosial (JPS) jauh dibawah garis kemiskinan per kapita
- d) nominal insentif hanya meliputi sebagian kecil total pengeluaran
- e) Durasi program jaringan pengaman sosial (JPS) yang diberikan tidak berkesinambungan
- f) bantuan JPS dari pemerintah bersifat sementara

## **2. Hambatan Hambatan Pelaksanaan Kebijakan Pemberian Bantuan Jaring Pengaman Sosial di Lapangan**

Dari temuan peneliti di lapangan, dalam pelaksanaan pemberian bantuan program jaring pengaman sosial (JPS), antara lain:

- 1) terdapat kondisi yang membuat pelaksanaan kebijakan di level bawah seperti kelurahan kesulitan untuk memutuskan dimana terdapat temuan kasus calon penerima tidak berhak mendapat bantuan diakibatkan oleh domisili yang tidak sesuai dengan data pada pelaporan. Sementara, data temuan tidak bisa serta merta langsung dicabut melainkan harus melewati tahapan musyawarah kelurahan (Muskel) yang pelaksanaannya tidak bisa secara tiba-tiba, harus melibatkan semua elemen yang ada di kelurahan seperti pihak lingkungan dan RT.
- 2) Muskel ini juga pelaksanaannya di kelurahan sangat jarang dilakukan karena problem anggaran yang terbatas dan beresiko terhadap penerima kalau lingkungan tidak mengkomunikasikan secara baik.

Dinas Sosial merupakan organisasi perangkat daerah (OPD) yang sangat dinamis, dimana tingkat keluhan masyarakat terhadap permasalahan sosial cukup tinggi. Hal ini harus direspon secara cepat melalui inovasi yang terkini. Namun, Dinas Sosial pun masih menghadapi berbagai kendala, diantaranya:

- 1) di tubuh Dinas Sosial sendiri, proses penyampaian keluhan masih terfokus pada cara-cara manual yang seharusnya bisa dimaksimalkan secara online;
- 2) penanganan masalah sosial harusnya tidak terpusat pada Dinas Sosial saja (secara langsung), melainkan bisa dibagi juga pada tingkat kelurahan. Pada kenyataannya, saat ini, kelurahan hanya mengeluarkan surat yang bersifat administrasi ketika ada permasalahan sosial berkaitan dengan bantuan dan lainnya;
- 3) proses penyampaian keluhan belum terintegrasi yang berdampak pada keluhan yang disampaikan tidak mendapat respon yang cepat. Seharusnya, setiap keluhan tidak perlu melalui proses administrasi yang panjang dan dapat mendorong munculnya

- kebijakan yang final, sehingga masyarakat tidak perlu diputar dari Kelurahan – Kecamatan – Dinas Sosial Kota Mataram;
- 4) untuk mendukung itu perlu adanya sinergisitas dengan perangkat dibawahnya, mengingat saat ini tidak ada operator yang mengolah data bencana atau data sosial di tempatkan pada kelurahan-kelurahan.
  - 5) kesan yang muncul adalah semua permasalahan sosial menjadi terpusat di Dinas Sosial saja (Dinas Sosial centris).

Masalah lainnya antara lain:

- 1) di Kota Mataram, belum terbentuk satu sistem terpadu dalam proses penanganan bantuan sosial dari level kelurahan, kecamatan, dan Dinas-Dinas terkait;
- 2) proses birokrasi menjadi lamban sehingga sangat mengganggu pelaksanaan program Jaring Pengaman Sosial (JPS) Tahun 2020 yang membutuhkan senergi yang cepat, tepat, dan memberi efek langsung pada basis-basis masyarakat yang terdampak Covid-19;
- 3) ketiadaan sistem yang terpadu yang bisa diakses secara cepat oleh masyarakat secara terintegrasi dari kelurahan hingga ke Dinas Sosial menyebabkan proses penyampaian keluhan menjadi panjang;
- 4) Dinas Sosial yang harusnya berposisi sebagai sentral pelaksana kebijakan yang seharusnya tidak lagi disibukan dengan hal-hal yang bersifat administratif. Namun, pada kenyataannya masih berkuat dengan hal demikian, dimana pada dasarnya hal tersebut harusnya cukup selesai di tingkat kelurahan;
- 5) Keberadaan sistem informasi layanan terpadu yang teritegrasi akan memangkas banyak proses birokrasi panjang, sehingga memudahkan masyarakat untuk mengurus proses administrasi terkait bantuan;
- 6) Sistem informasi yang ada di Dinas Sosial Kota Mataram saat ini masih merupakan turunan dari sistem yang diusung oleh Kemensos, dimana notabenenya memiliki pengoperasian yang belum maksimal. Sistem yang ada juga belum terintegrasi pada system dibawahnya, masih terfokus pada Dinas Sosial.
- 7) pihak Kelurahan tidak memiliki operator yang bisa menghendel sistem layanan informasi yang berkaitan dengan bantuan sosial yang ada di Dinas Sosial. Karena keberadaan operator akan memudahkan kelurahan dalam rangkat memverifikasi data secara cepat dan tepat.

Berbagai kendala terkait Sistem Informasi yang belum terpadu tersebut bisa dilakukan melalui kebijakan turunan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Mataram. Kebijakan ini akan menjadi satu inovasi penting pemerintah dengan membangun satu sistem yang terpadu di tengah kondisi kedarurat covid-19.

### 3. Dampak Pemberian Bantuan Jaring Pengaman Sosial (Jps) Terhadap Sasaran Keluarga Penerima Dampak

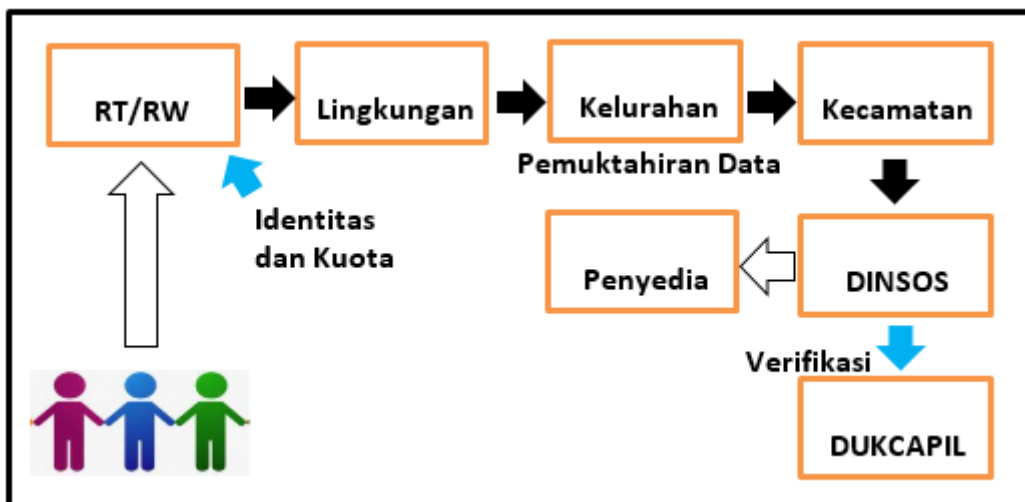
Dampak pemberian bantuan jaring pengaman sosial (JPS) terhadap sasaran keluarga penerima manfaat, baik dampak positif maupun dampak negatifnya dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Dampak Positif
  - a) program jaring pengaman sosial (JPS) bermanfaat bagi mengatasi kebutuhan pangan jangka pendek
  - b) cakupan layanan bantuan mengcover banyak kepala keluarga dan elemen dalam masyarakat
  - c) membentuk citra positif pemerintah
  - d) masyarakat terbantu dalam memenuhi asupan vitamin untuk meningkatkan imunitas tubuh
  - e) mendukung keberlangsungan usaha IKM dan UMKK
2. Dampak Negatif
  - a) membentuk sikap ketergantungan masyarakat pada bantuan pemerintah
  - b) bantuan paket sembako JPS, mengabaikan kebutuhan lain

### 4. Langkah Strategis Pelaksanaan Jaring Pengaman Sosial (Jps) Kedepannya

Skema pendataan yang bisa diterapkan untuk memastikan terjadinya validitas data adalah skema usulan secara desentralisasi sebagaimana pada Gambar dibawah ini.

**Skema Usulan Pendataan**



Sinkronisasi data hendaknya dilakukan mulai level kelurahan, kecamatan dan kota. Di level kelurahan, tim pendataan desa dan kelurahan melakukan pendataan sesuai dengan kriteria yang menjadi indikator penerima manfaat JPS, kemudian di tingkat kecamatan melakukan rekapitulasi data menurut kelurahan diwilayahnya masing-masing. Disamping itu, masyarakat

juga dapat mengusulkan atau mendaftarkan diri kepada pemerintah setempat. Pada saat bersamaan, Dinas Sosial melakukan sinkronisasi data di level kota. Mereka mengumpulkan data, melakukan verifikasi, serta validasi DTKS. Pendataan dilakukan secara berkala minimal setahun sekali. Setiap Kelurahan di Kota Mataram harus memiliki basis data terpadu yang selalu terupdate agar dapat diakses kapanpun oleh pihak Dinsos jika terjadi kondisi kedaruratan.

Sementara itu, penyesuaian nominal wajar pemberian sembako dengan menaikkan setidaknya 25% dari garis kemiskinan perkapita perbulan, yaitu adanya penambahan sekitar setidaknya Rp. 125.000 untuk setiap pakatnya. Sehingga ditemukan jumlah ideal nominal bantuan sembako yang diberikan adalah paling tidak bernilai Rp. 275.000, yaitu mencapai 55,00% dari garis kemiskinan perkapita perbulan, atau setara 80,35% dari pengeluaran makanan perbulan. Dengan adanya kebijakan penyesuaian kembali besarnya nominal pemberian bantuan ini diharapkan mampu menanggulangi bahaya terburuk yaitu kelaparan akibat kedaruratan Covid-19.

## F. Kesimpulan

- 1) Implementasi program jaring pengaman sosial (JPS) dari APBD Kota Mataram Tahun 2020 meringankan beban 34.160 kepala keluarga (KK) atau 27,57% dari total kepala keluarga (KK) Kota Mataram, dan mengcover seluruh kepala keluarga (KK) miskin yang mencapai 10.496 KK, serta masyarakat yang rentan miskin, pekerja yang dirumahkan atau korban pemutusan hubungan kerja (PHK), dan UMKM mengalami hambatan berusaha akibat kehabisan modal usaha;
- 2) Penerima JPS terbesar yaitu Kecamatan Ampenan sebanyak 8.962 KK atau 26,24% dan terkecil yaitu Kecamatan Sekarbela sebanyak 2.345 KK atau 6,86% dari total keseluruhan penerima JPS;
- 3) Penentuan penerima mengacu data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS), serta data dari sektor formal dan informal. Proses pendataan diatas dinilai lemah, karena tidak melibatkan unsur Kelurahan dan Kecamatan yang mengetahui validitas dan akurasi data calon penerima;
- 4) Kriteria penerima yang bersumber dari data Non-TKS, pekerja formal, dan informal belum terverifikasi secara tepat dan terintegrasi dari level kelurahan;
- 5) Masih ditemukan kasus penerima bantuan dengan KTP Kota Mataram, namun berdomisili di luar Kota Mataram;
- 6) Perbedaan antara data sumber (Dinas Sosial) dengan data lapangan (kelurahan) menyebabkan pengalihan sasaran penerima, sehingga berdampak terjadinya data ganda. Terdapat data ganda mencapai 1.700 KK atau (4,98%) dari total penerima jaring pengaman sosial (JPS) Kota Mataram;
- 7) Respon petugas terhadap keluhan masyarakat berjalan lambat dan kurang akurat, disebabkan oleh proses administrasi yang relatif panjang dan berbelit;
- 8) Dari segi kualitas dan kuantitas bantuan berupa paket sembako program jaring pengaman sosial (JPS), perlu ditingkatkan
- 9) Sistem informasi belum terpadu menyebabkan pengambilan keputusan menjadi lamban, pihak Kelurahan tidak memiliki operator yang bisa menghendel sistem layanan informasi yang berkaitan dengan bantuan sosial yang ada di Dinas Sosial;



- 10) Secara umum pemberian bantuan jaring pengaman sosial (JPS) memberi dampak positif maupun dampak negatif

## G. Rekomendasi

- 1) Nominal pemberian sembako dinaikan setidaknya 25 persen dari garis kemiskinan perkapita perbulan, yaitu adanya penambahan sekitar setidaknya Rp. 125.000 untuk setiap pakatnya. Sehingga ditemukan jumlah ideal nominal bantuan sembako yang diberikan adalah paling tidak bernilai Rp. 275.000 yaitu mencapai 55,00% dari garis kemiskinan perkapita perbulan, atau setara 80,35% dari pengeluaran makanan perbulan. Dengan adanya kebijakan penyesuaian kembali besarnya nominal pemberian bantuan ini diharapkan mampu menanggulangi bahaya terburuk yaitu kelaparan akibat kedaruratan Covid-19;
- 2) Perlu dibuatkan SOP yang mengatur proses pelaksanaan pendataan, penetapan, dan penyaluran masyarakat kategori penerima bantuan, yang merujuk pada aturan kemensos;
- 3) Proses penyusunan SOP harus melibatkan kelurahan, kecamatan, dan dinas terkait;
- 4) Perlu dilakukan digitalisasi bantuan sosial dan membuat basis data terpadu yang berada di tingkat kelurahan yang terintegrasi dengan kecamatan, Dinas Sosial, dan Organisasi Perangkat Daerah terkait lainnya;
- 5) Pemerintah Kota Mataram perlu merekrut dan menetapkan 1 (satu) orang admin/operator khusus yang mengurus bantuan sosial di tingkat kelurahan. Agar penyelesaian proses pendataan, penetapan, dan penyaluran masyarakat penerima bantuan bisa langsung di selesaikan pada level kelurahan, sehingga semua tidak tersentral di Dinas Sosial;
- 6) Perlu adanya pemetaan masyarakat terdampak covid-19 secara ekonomi yang dapat dilihat dari pekerjaan masyarakat dengan merujuk pada peta kelurahan, yang bisa di integrasi melalui peta digital;
- 7) Kebijakan pemberian sembako bagi masyarakat terdampak perlu dikaji kembali agar bisa terus dilaksanakan secara berkesenambungan, serta perlu dikombinasikan dengan skema yang lain, semisal bantuan biaya listrik, pulsa, dll (dana tunai).

## Daftar Pustaka

Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Mataram, 2021, Laporan Akhir Kajian Pemberian Dana Jaring Pengaman Sosial (Jps) Terhadap Sasaran Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Sosial Di Kota Mataram. Mataram



## **Bagian II**

### **Hasil-Hasil Penelitian**

### **Bidang Sumber Daya Alam dan**

### **Pengembangan Wilayah**

# Kajian Penataan Kecamatan Di Kota Mataram Melalui Penyesuaian (Perubahan Batas Wilayah) Kec. Sekarbela Tahun 2021

## Abstrak

Kota Mataram terdiri dari 6 Kecamatan dengan 5 tipologi A dan 1 Tipologi B yakni Kecamatan Sekarbela. Perbedaan typelogi tersebut, berdampak pada tidak adanya keseimbangan kelembagaan pada tingkatan kecamatan yang ada di lingkup Pemerintahan Kota Mataram. Tujuan penelitian ini yakni menganalisis pengaruh Kebijakan, Rencana, dan/atau Program, Perumusan alternatif penyempurnaan Kebijakan serta rekomendasi untuk pengambilan keputusan. Metode penelitian dengan kombinasi (*mixed method*) metode kuantitatif dengan metode kualitatif. Analisis digunakan menggunakan 5 pendekatan diantaranya ; Analisa Tetangga Terdekat (*Nearest Neighbour Analysis*), *Analisa Interaksi Wilayah*, *Analisa Space Syntax*, *Analisa Indikator Wilayah*, *Analisa Batas Wilayah Dengan Kartometrik*. Hasil analisis tersebut bahwa pemekaran bisa terjadi diwilayah jempong baru dan dimekarkan menjadi dua kelurahan berdasarkan pada dengan potensi kependudukan, kewilayahan, antarkoneksi wilayah. Dalam penentuan batas perwilayahan baru dengan adanya pemekaran wilayah Kelurahan Jempong Baru, harus didasarkan dengan penentuan batas dengan pendekatan fisik. Hasil rekomendasi terhadap kondisi ini penyesuaian batas wilayah kelurahan yang didorong perubahannya adalah perubahan batas perwilayahan pada wilayah Kelurahan Jempong Baru, menjadi 2 (dua) wilayah kelurahan pemekaran; perlu dilakukan penetapan pusat pelayanan baru dengan Pemekaran Wilayah di bagian selatan.

*Kata Kunci : Penataan Kecamatan, Perubahan Batas Wilayah, Sekarbela*

## A. Latar Belakang

Adanya pemekaran wilayah diharapkan dapat lebih memaksimalkan pemerataan pembangunan daerah dan pengembangan wilayah. Pemekaran daerah di Indonesia merupakan pembentukan wilayah administratif baru di tingkat provinsi maupun kota dan kabupaten dari induknya. Pemekaran wilayah pada prinsipnya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dengan meningkatkan serta mempercepat pelayanan, kehidupan demokrasi, perekonomian daerah, pengelolaan potensi daerah, keamanan dan ketertiban, dan hubungan yang serasi antar daerah.

Guna mempercepat peningkatan pembangunan di Kota Mataram, dalam hal meningkatkan dan mempermudah pelayanan masyarakat, maka diperlukan adanya pemekaran wilayah kelurahan yang ada di Kecamatan Sekarbela. Dengan dimekarkannya jumlah kelurahan di Kecamatan Sekarbela akan lebih mendekatkan pelayanan kepada masyarakat karena semakin pendeknya rentang kendali pemerintahan. Juga mendekatkan jangkauan pelayanan kepada masyarakat karena jarak yang tidak lagi menjadi persoalan, karena

seperti yang kita ketahui kelurahan – kelurahan di Kecamatan Sekarbela yang wilayahnya sangat luas menyebabkan jarak pelayanan kepada masyarakat menjadi agak jauh dan sulit untuk dijangkau masyarakat.

## B. Permasalahan

Pemerintah Kota Mataram memiliki 6 (enam) kecamatan. Dari keenam kecamatan tersebut, lima diantaranya adalah kecamatan tipe A, yaitu Kecamatan Mataram, Selaparang, Cakranegara, Sandubaya, dan Kecamatan Ampenan; dan satu kecamatan tipe B, yaitu Kecamatan Sekarbela. Dari sisi cakupan luas wilayah dan jumlah penduduk, Kecamatan Selaparang merupakan kecamatan dengan luas wilayah terbesar (10,77 Km<sup>2</sup>) sementara Kecamatan Cakranegara merupakan kecamatan dengan jumlah penduduk terkecil (68.719 jiwa). Adapun dari sisi kepadatan, tingkat kepadatan penduduk tertinggi terdapat di Kecamatan Ampenan (10.142 jiwa/Km<sup>2</sup>) dan terendah terdapat di Kecamatan Selaparang (7.017 jiwa/Km<sup>2</sup>). Berdasarkan typelogi tersebut, Sekarbela secara kewilayahan mencapai 10,32 Km<sup>2</sup> sehingga potensi pemekaran kecamatan sekarbela memiliki peluang dan keharusan untuk menunjang rencana letak lokasi baru terhadap wilayah administrasi Walikota Mataram.

No.	Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Luas Wilayah (Km <sup>2</sup> )	Kepadatan Pendudukan (Jiwa/Km <sup>2</sup> )
1	Sandubaya	7	83.936	10,32	8.133
2	Cakranegara	10	68.719	9,67	7.106
3	Mataram	9	93.562	10,76	8.695
4	Selaparang	9	75.569	10,77	7.017
5	Ampenan	10	95.941	9,46	10.142
6	Sekarbela	5	77.954	10,32	7.554
<b>Jumlah Total</b>		<b>50</b>	<b>495.681</b>	<b>61,30</b>	

Berdasarkan data pada Tabel sebelumnya, terlihat bahwa pembagian jumlah kelurahan antar kecamatan belum sepenuhnya proporsional, terutama pada Kecamatan Sekarbela yang memiliki jumlah kelurahan yaitu 5 (lima) kelurahan. Hal ini mengakibatkan terjadinya perbedaan typelogi kelembagaan Kecamatan Sekarbela dibandingkan dengan 5 (lima) kecamatan lainnya. Dengan adanya perbedaan typelogi tersebut, dikhawatirkan berdampak pada tidak adanya keseimbangan kelembagaan pada tingkatan kecamatan yang ada di lingkup Pemerintahan Kota Mataram.

## C. Tujuan

1. Pengkajian pengaruh Kebijakan, Rencana, dan/atau Program terhadap kondisi perkembangan kecamatan Sekarbela

2. Perumusan alternatif penyempurnaan Kebijakan, Rencana, dan/atau Program, terkait perubahan batas perwilayahan di dalam kecamatan.
3. Menggambarkan, potensi kewilayahan di Kecamatan Sekarbela, gambaran prediksi dan kajian wilayah, sebagai dasar ilmiah dalam upaya optimalisasi pelayanan kepada masyarakat;
4. Rekomendasi untuk pengambilan keputusan, terkait Kebijakan, Rencana, dan/atau Program yang mengintegrasikan pelayanan antar wilayah dalam prinsip pengembangan wilayah

#### D. Metode Penelitian

Melakukan penataan di Kec. Sekarbela yang merupakan kajian dengan metode kombinasi (*mixed method*) yang merupakan gabungan antara metode kuantitatif dengan metode kualitatif untuk digunakan secara bersama – sama dalam suatu kegiatan penelitian, sehingga diperoleh data yang lebih komprehensif, valid, *reliable*, dan obyektif.

#### E. Pokok – Pokok Hasil Analisa

Berikut hasil indentifikasi wilayah Kec. Sekarbela, sebagai gambaran terkait eksistensi keberadaan kecamatan ini dalam konteks regional, maupun lokal dalam mendukung analisa, perlu dijabarkan pokok-pokok kondisi eksisting Sekarbela diantaranya ;

##### 1. Identifikasi Kewilayahan Meliputi Identifikasi Terhadap :

###### 1.1 Identifikasi Prekonomian

Kontribusi PDRB Kecamatan Terhadap PDRB Kota Mataram

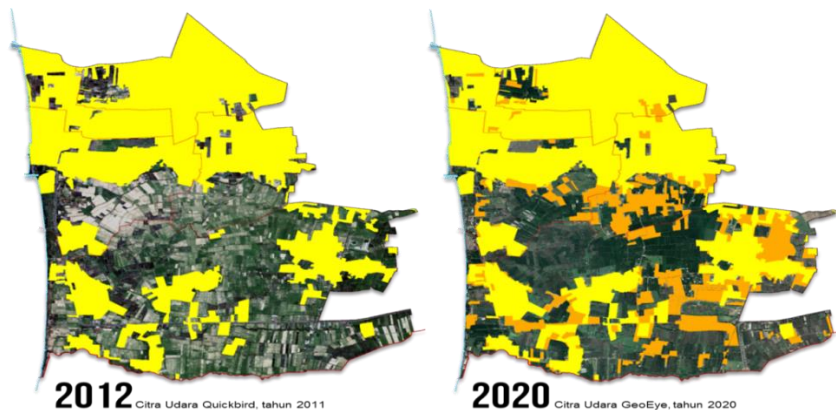
Kecamatan	PDRB Kecamatan (Juta Rupiah)	PDRB Kota Mataram (Juta Rupiah)	Kontribusi PDRB Kecamatan terhadap PDRB Kota Mataram (b/c)
(a)	(b)	(c)	(d)
Sandubaya	2.317.783	13.084.710	0,18
Selaparang	2.684.417		0,21
Cakranegara	3.320.662		0,25
Mataram	2.018.062		0,16
Sekarbela	1.074.600		0,08
Ampenan	1.579.431		0,12

Sumber : Hasil Analisa Tahun 2021

Nilai kontribusi total, dan dibandingkan dengan kontribusi kecamatan lain yang tersaji pada tabel diatas, maka presentase nilai kontribusi Kecamatan Sekarbela paling rendah dari kecamatan lain yaitu 0,08 menunjukkan kurangnya gerak berbagai sektor pembangunan.

## 1.2 Kecenderungan Perkembangan

Perkembangan kawasan terbangun di Kecamatan Sekarbela membentuk kombinasi pola linier dan pola Terpecah, ditandai dengan adanya perkembangan kawasan-kawasan terbangun yang hanya mengekspansi kawasan di jalur-jalur utama, dan gejala perkembangan sebaran permukiman dengan kelompok-kelompok. Bentuk pola perkembangan kawasan terbangun terbagi menjadi 2 bentuk dasar yaitu wilayah/kawasan utara kecenderungannya padat, dan pada wilayah/kawasan selatan kecenderungannya renggang dengan membentuk kelompok (*cluster*).



Sumber : Hasil Identifikasi dan Digitasi peta tahun 2012 & 2020, dilakukan Tahun 2021

Pada gambar diatas terkait simulasi permodelan di kecamatan Sekarbela, pola kelompok ini cenderung terjadi akibat tidak adanya keterkaitan antar kawasan terbangun, sehingga berdiri sendiri pertumbuhannya, yang mengakibatkan kerenggangan pola pemanfaatan lahan di wilayah yang didominasi pola berkelompok ini. Sedangkan untuk wilayah utara yang cenderung padat, mengalami “kejenuhan” perkembangan, karena keterbatasan akan ketersediaan lahan yang ada.

## 1.3 Ketersediaan Lahan

Ketersediaan lahan pengembangan Sekarbela hingga tahun 2020, berdasarkan hasil perhitungan dengan perbandingan kawasan terbangun dan kawasan tidak terbangun, dengan menggunakan kalkulasi digital pada software Arc.GIS, seluas 1.590,95 Ha, meliputi beberapa jenis peruntukan lahan seperti :

1. Lahan Kosong belum termanfaatkan
2. Lahan Perkebunan
3. Lahan Vegetasi non Budidaya
4. Lahan Pertanian (termasuk juga lahan peruntukan KP2B / LP2B).

#### **1.4 Interkoneksi Wilayah Dalam Konstelasi Eksternal**

Interkoneksi antar wilayah ini menunjukkan bahwa secara simultan pusat pertumbuhan wilayah (di Kecamatan Sekarbela) dan daerah pendukungnya mengalami kenaikan pertumbuhan ekonomi. Wilayah / Kawasan Sekarbela menjadi salah satu interkoneksi dalam pengembangan wilayah secara eksternal baik eksternal kota maupun internal kota. Dengan wilayahnya yang langsung berbatasan dengan wilayah administrasi kabupaten Lombok Barat, dan menjadi salah satu pintu terbang utama Kota Mataram di bagian selatan, Kecamatan Sekarbela memiliki nilai strategis dari aspek konektivitas regional. Sebagai akses utama transportasi, pola pergerakan di kecamatan Sekarbela dapat dikelompokkan dalam penentuan jenis moda, baik berdasarkan ukuran, jenis moda, layanan moda dan motivasi pergerakan.

#### **2. Pemindahan Pusat Pemerintahan Kota Mataram**

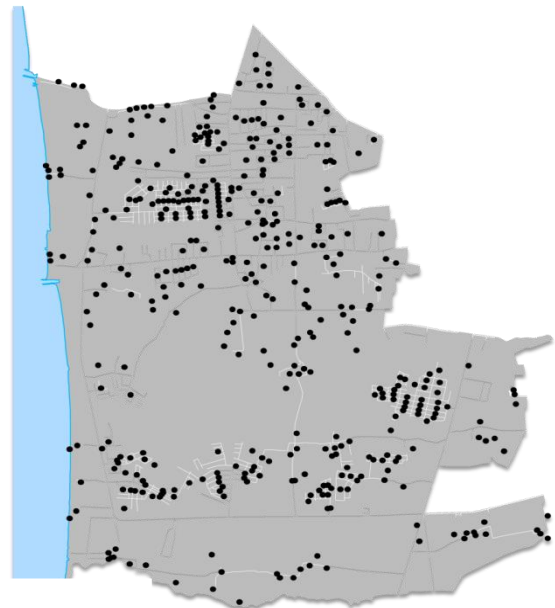
Dari berbagai pertimbangan yang telah dikaji oleh pemerintah Kota Mataram, tentu saja terdapat implikasi dari adanya pemindahan ini, dari berbagai pengaruh. Implikasi tersebut tidak dapat dihindari dan tentu saja tetap bertujuan dalam aspek pelayanan kepada masyarakat secara lingkup internal di dalam kota maupun secara eksternal. Secara internal, dengan adanya pemindahan ini, akan mempengaruhi kondisi fisik dan sosial pada kawasan. Pemindahan pusat pemerintahan, akan mendorong hadirnya perkembangan kawasan secara fisik sebagai pendukung pusat pemerintahan yang baru, baik itu perkembangan fisik dari bidang ekonomi, sosial budaya maupun perkembangan fisik pada bidang lingkungan binaan. Pusat pemerintahan di lokasi yang baru akan menjadi *“Trigger”* bagi perkembangan kegiatan masyarakat yang mendukung kehadiran pusat pemerintahan yang baru tersebut. Begitu juga pengaruh implikasi sosial yang akan terjadi di kawasan lokasi tempat pemindahan pusat pemerintahan ini. Secara demografi, hal ini akan mendorong penduduk untuk memiliki kecenderungan pergerakan ke arah pusat layanan baru, sehingga mendorong juga hadirnya kegiatan-kegiatan ikutan lainnya yang berorientasi pada aspek kependudukan.

#### **3. Analisis**

##### **3.1 Analisa Tetangga Terdekat (*Nearest Neighbour Analysis*)**

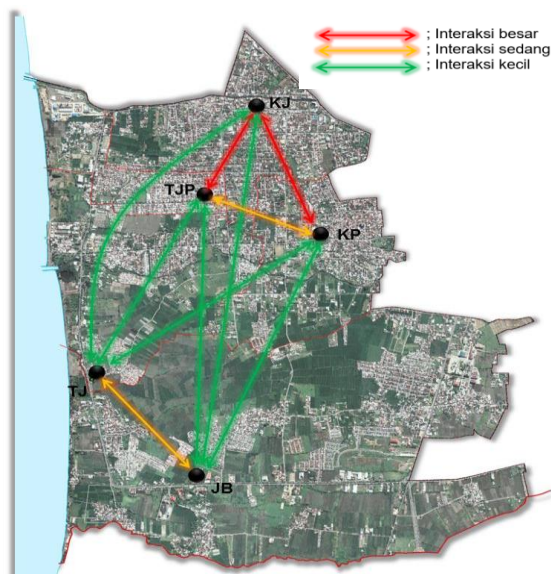
Analisis tetangga terdekat merupakan salah satu analisis yang digunakan untuk menjelaskan pola persebaran dari titik-titik lokasi tempat dengan menggunakan perhitungan yang mempertimbangkan ; jarak, Jumlah titik lokasi, dan luas wilayah. Dari hasil analisa tetangga terdekat yang dilakukan di masing-masing Kelurahan di Kecamatan Sekarbela didapatkan hasil bahwa Nilai rata-rata Analisis Tetangga Terdekat, untuk sebaran titik-tik permukiman yang ada di Kecamatan Sekarbela, menunjukkan pola permukiman menunjukkan rata-rata (*Expected Mean Distance*) dan nilai T diperoleh adalah 0,76 dan z-score -9,83, dengan makna bahwa, sebaran titik-titik permukiman yang ada di kecamatan ini, tersebar secara (*dispered pattern*)/seragam/cluster/mengelompok), sebagai mana pada gambar berikut ;

Average Nearest Neighbor Summary	
Observed Mean Distance:	69,1654 Meters
Expected Mean Distance:	91,3924 Meters
Nearest Neighbor Ratio:	0,756796
z-score:	-9,825819
p-value:	0,000000
Dataset Information	
Input Feature Class:	Titik_Permukiman_PT
Distance Method:	EUCLIDEAN
Study Area:	14900972,077080
Selection Set:	False



Gambar 1.  
Titik-titik Pola Permukiman  
(Sumber : Hasil Analisis Tahun 2021)

### 3.2 Analisa Interaksi Wilayah Dengan Model Gravitasi Ruang



Gambar 3.12.  
Permodelan Interaksi Ruang Kec. Sekarbela  
(Sumber : Hasil Analisis Tahun 2021)

Hasil analisis gravitasi ini nantinya digunakan sebagai gambaran bagaimana pola interaksi antar sistem perkotaan yang ada dan dapat menjadi faktor perkembangan dan kemunduran suatu wilayah, sehingga dengan latar belakang tersebut perlu kiranya mengeksplorasi berbagai hal yang berkaitan dengan fenomena-fenomena interaksi ruang pada Kecamatan Sekarbela dengan analisis Gravitasi sebagai berikut ;

Dapat dilihat pada tabel matriks nilai interaksi wilayah, nilai tertinggi berada di Kelurahan Kekalik Jaya yang berarti interaksi wilayahnya besar yang sehingga memiliki daya tarik yang lebih tinggi dari

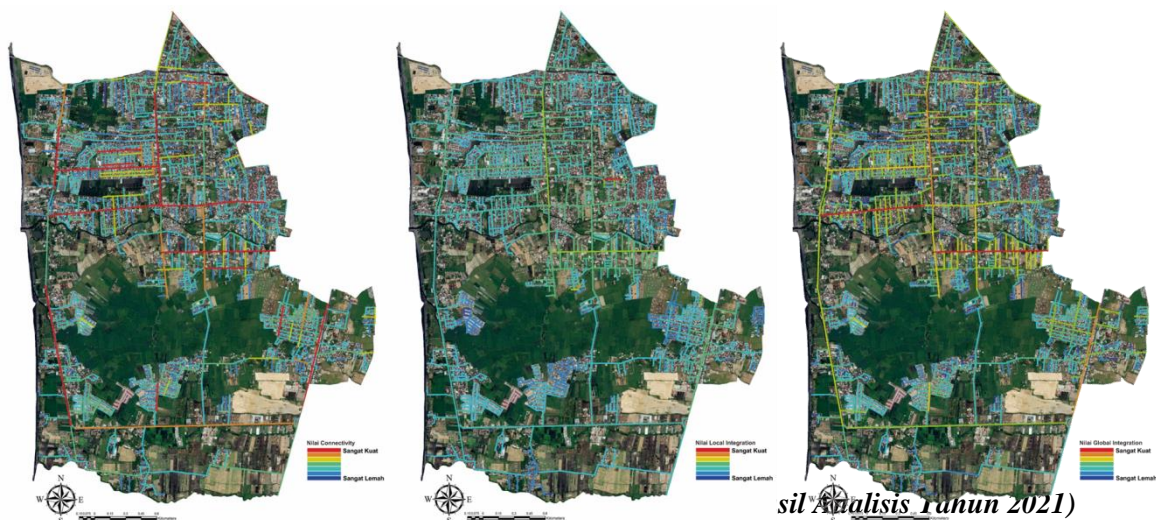
rata-rata wilayah. Dan nilai terendah berada pada Kelurahan Tanjung Karang dan kelurahan Jempong Baru yang berarti interaksi wilayahnya kecil. Berdasarkan gambar permodelan interaksi antar wilayah yang terjadi di Kecamatan Sekarbela yaitu tingkat interaksi besar, sedang, sampai kecil. Tingkat interaksi antar wilayah yang besar terdapat di Kelurahan Kekalik Jaya dengan Kelurahan Karang Pule dan juga Kelurahan Kekalik Jaya dengan Kelurahan Tanjung Karang Permai. Kemudian tingkat interaksi antar wilayah sedang terdapat pada Kelurahan Tanjung Karang Permai dengan Kelurahan Karang Pule dan juga Kelurahan Tanjung Karang dengan Kelurahan Jempong Baru. Selanjutnya, kelurahan yang



memiliki tingkat interaksi antar wilayah yang kecil yaitu, Kelurahan Tanjung Karang Permai dengan Tanjung Karang, Kelurahan Kekalik Jaya dengan Kelurahan Tanjung Karang, Kelurahan Karang Pule dengan Tanjung Karang, Kelurahan Tanjung Karang Permai dengan Jempong Baru, Kelurahan Kekalik Jaya dengan Kelurahan Jempong Baru.

### 3.3 Analisa Space Syntax

Dari hasil permodelan *space syntax* dengan aplikasi *depthMapX*, diperoleh hasil, bahwa, nilai connectivity konfigurasi ruang di Kecamatan Sekarbela didominasi oleh konfigurasi dengan tingkat sedang, sedangkan nilai integrity pada level lemah, baik integrity local maupun global. Nilai konektifitas terlihat kuat, dikarenakan adanya pertemuan dari beberapa ruas-ruas jalur utama, sistem aksesibilitas dalam skala ruang di lingkup kecamatan. Untuk nilai integritas lokal, dengan mempertimbangkan bentukan ruas jalan dengan banyaknya pola-pola cluster yang terputus, nilainya sangat lemah. Khusus untuk nilai interitas global yang menganalisa juga factor eksternal di sekitar kecamatan, diperoleh hasil, bahwa nilai integritas global untuk aksesibilitas dengan skala layanan kota, terlihat kuat sedangkan untuk layanan kecamatan cenderung dengan nilai lemah. Permodelan *space syntax* berdasarkan penilaian konektivitas dan integritas ruang di Kecamatan Sekarbela, dapat dilihat pada gambar dihalaman selanjutnya.



### 3.4 Analisa Indikator Wilayah

Secara umum aspek yang dikaji pada kegiatan penilaian indikator wilayah ini mencakup konseptual dari metode MCDM. **Multi Criteria Decision Making (MCDM)** adalah suatu metode pengambilan keputusan untuk menetapkan pilihan terbaik dari sejumlah alternatif pilihan berdasarkan beberapa kriteria tertentu. Secara lengkap substansi kajian implementasi MCDM Kecamatan Sekarbela sebagai berikut:

**Tabel 1**  
**Penilaian Indikator Wilayah di Kecamatan Sekarbela**

Faktor Indikator	Nilai Indikator	Bobot	Skor	Nilai Faktor	
<b>Kependudukan</b>				<b>20</b>	
1. Jumlah Penduduk	10	3	30	50	
2. Kepadatan Penduduk	5	1	5		
3. Kecenderungan Pergerakan Penduduk	5	3	15		
<b>Kemampuan Ekonomi</b>				<b>20</b>	
4. PDRB	5	3	15	40	
5. Pertumbuhan Ekonomi	5	3	15		
6. Kontribusi PDRB	10	1	10		
<b>Potensi Daerah</b>				<b>25</b>	
7. Ratio Lembaga Keuangan	1	3	3	75	
8. Ratio Pusat dan Sarana ekonomi	2	3	6		
9. Ratio Sarana Pendidikan	2	3	6		
10. Ratio Sarana Kesehatan	2	3	6		
11. Ratio Sarana Pemerintahan	2	3	6		
12. Ratio Kebutuhan Energy Listrik	2	5	10		
13. Ratio Panjang Jalan	3	5	15		
14. Ratio Kepemilikan Kendaraan Bermotor	2	3	6		
15. Ratio Angkatan Kerja	2	3	6		
16. Ratio Tingkat Pendidikan	2	1	2		
17. Ratio Mata Pencaharian	2	3	6		
18. Indeks Pembangunan Manusia	3	1	3		
<b>Sosial Politik Budaya &amp; Hankam</b>					<b>12</b>
19. Sarana Peribadatan	3	3	9		24
20. Sarana Rekreasi	3	3	9		
21. Sarana Pertahanan & Keamanan	3	1	3		
22. Karakteristik Wilayah dari sudut Hankam	3	1	3		
<b>Perwilayahan</b>					<b>23</b>
23. Tata Guna Lahan	8	3	24	75	
24. Pertumbuhan Fisik Kawasan	8	3	24		
25. Luas Wilayah	3	5	15		
26. Orbitrasi	2	3	6		
27. Faktor Eksternal Wilayah	2	3	6		
<b>JUMLAH TOTAL</b>				<b>364</b>	

Sumber : Hasil Analisa 2021

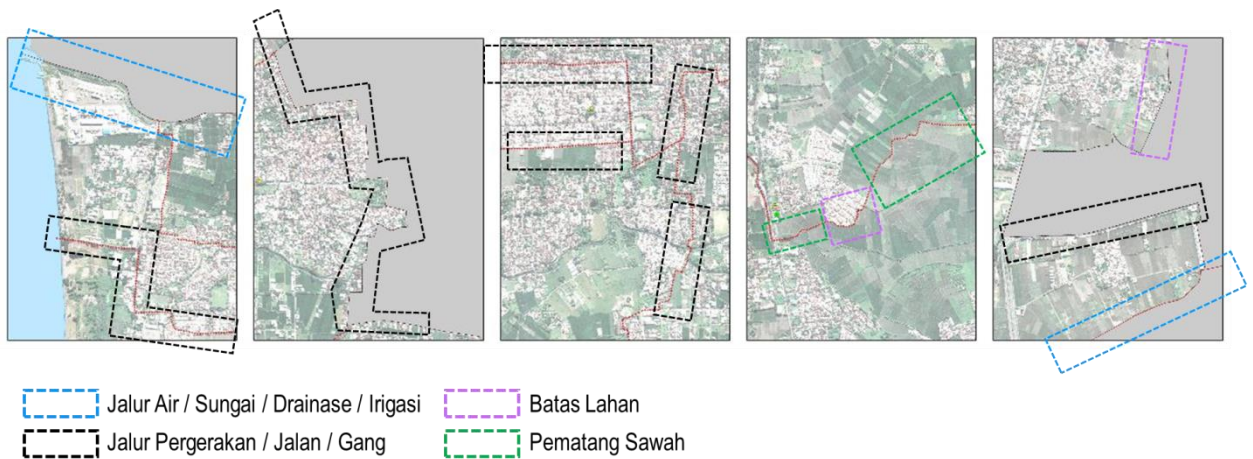
Kategori	Total Nilai Seluruh Indikator	Keterangan
Sangat Mampu	420 s/d 500	Perubahan
Mampu	340 s/d 419	Perubahan
Kurang Mampu	260 s/d 339	Nihil
Tidak Mampu	180 s/d 259	Nihil
Sangat Tidak Mampu	100 s/d 179	Nihil

**Gambar 3.13.**

**Gambaran Nilai Elemen Space Syntax (Sumber : Hasil Analisis Tahun 2021)**

### 3.5 Analisa Batas Wilayah Dengan Kartometrik

Analisis Kartometrik diatas menunjukkan bahwa batas wilayah Kecamatan Sekarbela ditunjukkan dengan segmen garis batas dengan warna yang berbeda dan fungsi yang berbeda juga. Jalur air pada garis berwarna biru, jalur pergerakan pada garis berwarna hitam, batas lahan dengan warna ungu, serta batas pematang sawah pada garis berwarna hijau. Dimana garis-garis tersebut menunjukkan bahwa Pelacakan batas wilayah Kecamatan Sekarbela maupun batas kelurahan dengan menggunakan metode kartometrik cukup efektif untuk digunakan. Dengan menggunakan metode kartometrik dapat meminimalisir terjadinya konflik batas wilayah.



**Gambar 3.15.**

***Sampel Batas-batas kewilayahan Dengan Kartometrik (Sumber : Hasil Analisis Tahun 2021)***

Dengan adanya penetapan yang telah dilakukan tersebut, maka jika terjadi perubahan batas, baik itu penambahan, perubahan atau penyesuaian batas-batas kewilayahan, maka teknik atau pendekatan yang digunakan adalah tetap dengan penetapan batas dengan metode penggunaan unsur-unsur fisik.

### F. Kesimpulan

1. Secara normative Kelurahan jempong baru sesuai dengan PP No. 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan pada dasarnya mendekati ketentuan dan syarat yang telah ditetapkan, terkendala pada luasan wilayah.
2. Hasil penilaian indikator pemekaran wilayah, Kelurahan Jempong paling tinggi dibandingkan dengan wilayah kelurahan lain di Kec. Sekarbela, sehingga kelurahan Jempong Baru ditetapkan sebagai wilayah yang akan dimekarkan;
3. Berdasarkan Analisis Tetangga Terdekat, Pola persebaran kawasan permukiman sebagai salah satu indikator penyesuaian batas wilayah, menunjukkan pola persebaran mengelompok. Pola persebaran menyebabkan layanan publik tidak merata, tidak seimbang dan tidak efektif.;

4. Indeks Nilai Interaksi Wilayah, didalam kecamatan Sekarbela, didominasi oleh nilai yang kecil, sehingga perlu ditetapkan pusat pelayanan baru yang dapat mengurangi jarak jangkauan dan waktu tempuh dalam layanan publik;
5. Permodelan Ruang, dengan pendekatan *Space Syntax*, menunjukkan bahwa konfigurasi antar ruang yang ada di kecamatan Sekarbela relatif lemah.
6. Penilaian Indikator Wilayah, menunjukkan bahwa Kecamatan Sekarbela mampu untuk melakukan perubahan batas wilayah, berdasarkan bobot-bobot indikator yang telah dihitung sesuai kriteria yang telah ditetapkan

## **G. Rekomendasi**

1. Dengan kondisi visual analisis dan kondidi eksisting yang ada, Konsep penataan Kecamatan Sekarbela melalui perubahan batas wilayah, dilakukan dengan melakukan penambahan jumlah kelurahan berdasarkan aspek-aspek pendukung dari pemekaran wilayah tersebut, perubahan batas perwilayahan pada wilayah Kelurahan Jempong Baru, menjadi 2 (dua) wilayah kelurahan pemekaran.
2. Dalam penentuan batas perwilayahan baru dengan adanya pemekaran wilayah Kelurahan Jempong Baru, harus didasarkan dengan penentuan batas dengan pendekatan fisik.
3. Wilayah yang memiliki gejala mengelompok dimana pola ini terdapat pada wilayah bagian selatan Kecamatan Sekarbela, jika dilihat dari aspek keruangan, dinilai kurang menguntungkan dari aspek pengembangan wilayah. Maka perlu dilakukan penetapan pusat pelayanan baru dengan Pemekaran Wilayah di bagian selatan. Bagian selatan yang merupakan wilayah Kelurahan Jempong Baru, memiliki peluang cukup besar jika dilakukan pemekaran mengingat wilayah kelurahan ini memiliki dimensi wilayah yang luas dan membutuhkan penanganan terhadap “gejala” pertumbuhan kelompok/cluster;
4. Hasil analisis permodelan interaksi ruang kelurahan Jempong Baru memiliki nilai interaksi yang kecil. Oleh karena itu, untuk menyeimbangkan penilaian interaksi wilayahnya, di kelurahan Jempong Baru memungkinkan ditambah pusat pelayanan baru, dapat berupa penetapan pusat layanan masyarakat baru berdasarkan kriteria layanan publik maupun dilakukan pemekaran dengan penetapan pusat kelurahan yang baru.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Mataram, 2021, Penataan Kecamatan di Kota Mataram Melalui Penyesuaian (Perubahan Batas Wilayah) Kecamatan Sekarbela Tahun 2021. Mataram

# IDENTIFIKASI PEMANFAATAN RUANG PESISIR DI SEPANJANG GARIS PANTAI SEBAGAI TUJUAN DESTINASI WISATA DI WILAYAH KOTA MATARAM

## Abstrak

Dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Mataram, kawasan sempadan pantai ditetapkan paling rendah 100 m dihitung dari titik pasang air laut tertinggi ke arah darat secara proporsional sesuai bentuk, letak dan kondisi fisik pantai di Kecamatan Ampenan dan Kecamatan Sekarbela. Tujuan Penelitian menganalisis, mengidentifikasi serta menyusun rekomendasi atas pemanfaatan ruang pesisir disepanjang garis pantai di Kota Mataram. Metode penelitian digunakan pendekatan penanganan pekerjaan dilakukan melalui kegiatan pengumpulan data di lapangan dan kegiatan analisis terhadap lokasi berupa data fisik dan data non-fisik. Hasil penelitian menunjukkan kondisi kawasan pesisir pantai Kota Mataram saat ini sudah tidak dapat dikembangkan lebih lanjut sebagai area wisata karena kepemilikan lahan pribadi lebih banyak dimiliki masyarakat yang sudah bermukim. Jika kawasan ini tetap ingin dikembangkan sebagai area wisata, membutuhkan biaya pembebasan lahan besar dan butuh waktu panjang. Kepemilikan lahan milik pribadi di area pesisir pantai ini merupakan salah satu dampak dari abrasi pantai. Abrasi yang terus terjadi selama bertahun-tahun di area pesisir, semakin lama semakin menggerus area daratan. Sebagai rekomendasi terkait kondisi ini maka perlu dibuat pemecah gelombang di area pantai, dapat berupa *jetty*, untuk mereduksi laju abrasi di kawasan pesisir. Terkait potensi wisata, hasil identifikasi dan analisa juga menunjukkan bahwa sebagian besar area wisata pesisir yang sudah ada sekarang belum dioptimalkan potensinya.

*Kata Kunci : Ruang Pesisir, Garis Pantai, Destinasi Wisata, Pengembangan Wisata.*

## A. Latar Belakang

Tata ruang pesisir pantai yang baik dan benar adalah pengaturan wilayah pemanfaatan pesisir dimana semua aktifitas manusia dan fungsi ekologis lingkungan perairan berjalan dengan alamiah, serasi dan tidak saling mengganggu dalam interaksinya. Tata ruang ini dihasilkan melalui perencanaan tata ruang yang tepat melalui proses dan prosedur yang benar menurut perundangan yang berlaku. Dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Mataram, kawasan sempadan pantai ditetapkan paling rendah 100 m dihitung dari titik pasang air laut tertinggi ke arah darat secara proporsional sesuai bentuk, letak dan kondisi fisik pantai di Kecamatan Ampenan dan Kecamatan Sekarbela. Rencana pemanfaatan kawasan sempadan pantai dalam Rencana Pola Ruang dilakukan melalui peningkatan keanekaragaman jenis tanaman keras sesuai dengan morfologi pesisir, pengaturan ruang di kawasan sempadan pantai sebagai area wisata alam dan rekreasi

publik tanpa merubah fungsi ekologis kawasan, pengaturan penempatan bangunan-bangunan perlindungan terhadap bencana gempa bumi dan/atau gelombang pasang/tsunami, dan pengembangan untuk selain kegiatan wisata dan rekreasi publik ditentukan berdasarkan hasil studi kelayakan. Selain itu dalam rencana pengembangan Ruang Terbuka Hijau (RTH), sempadan pantai juga termasuk sebagai RTH Publik.

Dalam pengelolaannya, strategi terhadap kawasan sempadan pantai adalah dengan menetapkan garis sempadan pantai, mewujudkan lahan-lahan sempadan pantai, memperkuat status penguasaan kawasan, mengendalikan perkembangan bangunan baru di dalam kawasan sempadan pantai, memberikan perlindungan pada sempadan pantai, dan menyediakan bangunan perlindungan bencana di sekitar kawasan sempadan pantai. Terhadap strategi pengembangan kawasan pada kawasan sempadan pantai adalah dengan menerapkan ketentuan-ketentuan teknis pembangunan perumahan terutama menyangkut intensitas tata bangunan dan lingkungan.

## B. Permasalahan

Sebagai ibukota provinsi, alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan non-pertanian terus terjadi. Terjadi konversi lahan yang cukup besar, yaitu mencapai sekitar  $\pm 4.80$  ha/tahun untuk fungsi perumahan, perkantoran, pendidikan serta untuk pertokoan. Hal ini tentunya terjadi dengan semakin pesatnya dinamika perkembangan dan pertumbuhan kota yang berimplikasi pada penyesuaian terhadap kebutuhan lahan untuk pengembangannya. Permasalahan lain yang dihadapi oleh Kota Mataram terkait tata guna lahan adalah munculnya pemukiman padat, kumuh, dan miskin di sepanjang sungai terutama Sungai Jangkok. Penggunaan lahan mengalami alih fungsi yang cukup signifikan dari lahan pertanian, kawasan hijau dan daerah tangkapan air (catchment area) menjadi kawasan permukiman, perdagangan dan perkantoran. Alih fungsi lahan tersebut membawa dampak terhadap struktur tata ruang kota serta daya dukung lahan dan lingkungan hidup lainnya. Disisi lain juga perlu dicermati kepemilikan lahan yang berada disempadan pantai, karena sampai saat ini banyak penduduk yang mengklaim kepemilikan hak atas tanah tersebut sehingga kegiatan pembangunan pemerintah untuk pengelolaan wilayah pantai terutama untuk kegiatan wisata menjadi terhambat.

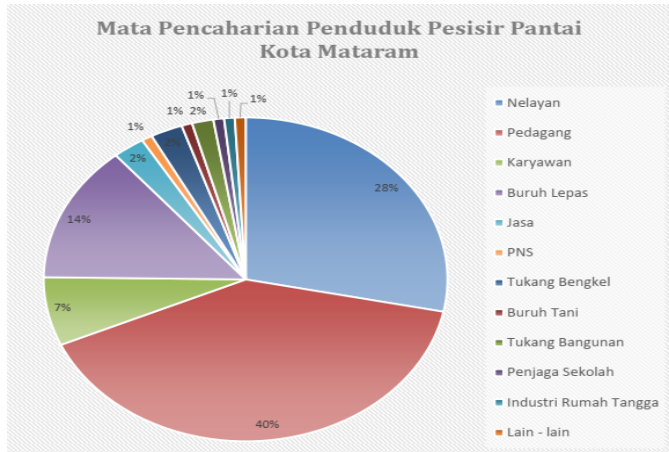
## C. Tujuan

Tujuan dilakukannya kajian Identifikasi Pemanfaatan Ruang Pesisir di Sepanjang Garis Pantai Sebagai Tujuan Destinasi Wisata di Wilayah Kota Mataram, bertujuan untuk ;

1. Mengidentifikasi, menganalisis kondisi eksisting dan potensi Sumberdaya Alam, Sosekbud dan kelembagaan serta permasalahan disepanjang pesisir pantai Kota Mataram.
2. Identifikasi dan inventarisasi kepemilikan lahan di kawasan pesisir Kota Mataram.

- Menyusun rekomendasi dan arahan pengembangan kawasan pesisir Kota Mataram dengan konsep pembangunan berkelanjutan.

#### D. METODE PENELITIAN



Pendekatan penanganan pekerjaan dilakukan melalui kegiatan pengumpulan data di lapangan dan kegiatan analisis terhadap lokasi berupa data fisik dan data non-fisik. Metode pembahasan pada kegiatan ini dilakukan melalui penyusunan identifikasi wilayah pesisir pantai Kota Mataram yang dimulai dari tahap awal pencarian data sampai dengan tahap penyusunan program

pengembangan destinasi wisata pesisir pantai Kota Mataram.

#### E. Pokok –Pokok Hasil Analisa

##### 1. Kondisi Fisik Eksisting Pesisir Pantai Kota Mataram

###### a. Laju Abrasi Pesisir Pantai

Berdasarkan Laporan Pengelolaan Garis Pantai Kota Mataram Sebagai Upaya Adaptasi dan Mitigasi Bencana Pantai dan Kenaikan Muka Air Laut pada tahun 2019, diketahui bahwa dalam rentang waktu 2002-2018, area pesisir pantai Kota Mataram sepanjang 9 km mengalami laju abrasi yang bervariasi, mulai dari 0,5 hingga 6,5 m/tahun. Sebagaimana pada tabel berikut ;

No.	Lokasi Pengukuran	Laju Abrasi Terendah (m/tahun)	Laju Abrasi Tertinggi (m/tahun)
1.	Garis Sel Pantai Bintaro	0,5	5,0
2.	Garis Sel Pantai Penghulu Agung-Gatep	Tidak disebutkan	3,0
3.	Garis Sel Pantai Tanjung Karang	0,5	5,0
4.	Garis Sel Pantai Mapak-Gading	Tidak disebutkan	6,5
5.	<b>Rata-Rata</b>	<b>0,5</b>	<b>4,875</b>

Sumber: Laporan Pengelolaan Garis Pantai Kota Mataram Sebagai Upaya Adaptasi dan Mitigasi Bencana Pantai dan Kenaikan Muka Air Laut (2019)



## b. Sempadan pantai



Gambar disamping menunjukkan bahwa pada praktik di lapangan, saat ini sudah tidak ditemukan pengaplikasian aturan sempadan pantai sejauh 100 (seratus) m dari titik pasang tertinggi ke arah darat. Kondisi kawasan permukiman di sepanjang 9 km pantai Kota Mataram juga sangat mengkhawatirkan. Hal ini disebabkan karena area-area permukiman ini terletak sangat dekat dengan garis bibir pantai. Hasil pemetaan menunjukkan bahwa jarak permukiman penduduk dengan garis pantai bervariasi antara 18-58 meter. Hasil identifikasi kawasan sepanjang 9 km menunjukkan bahwa Kelurahan Ampenan Tengah menjadi daerah dengan jarak terdekat ke bibir pantai, yaitu sejauh 18,3 meter. Kelurahan Banjar menjadi daerah dengan jarak terjauh ke bibir pantai, yaitu sejauh 58,2 meter. Meskipun demikian, jarak tersebut masih jauh dari aturan sempadan pantai sejauh 100 (seratus) meter.

Penelitian kawasan pesisir pantai Kota Mataram ini dimulai dari Kecamatan Ampenan sampai dengan Kecamatan Sekarbela atau sepanjang 9,0 Km. Penelitian ini dilakukan untuk mengidentifikasi pemanfaatan Kawasan pesisir pantai sebagai salah satu destinasi wisata di Kota Mataram. Untuk mendapat gambaran terkait kondisi sosial dan ekonomi penduduk sekitar kawasan pesisir, maka dilakukan survey dalam bentuk kuesioner penelitian, adapun hasilnya pada gambar disamping menunjukkan Pada diagram disamping di atas dapat dilihat mata pencaharian masyarakat pesisir pantai sebagian besar adalah sebagai pedagang dan nelayan, hal ini dikarenakan letak laut yang sangat dekat dengan pemukiman masyarakat yang menjadi salah satu faktor tingginya persentase pedagang dan nelayan, hal ini membuktikan bahwa pedagang dan nelayan adalah mata pencaharian utama masyarakat pesisir pantai Kota Mataram.

## 2. Identifikasi Pemanfaatan Ruang Pesisir Pantai Kota Mataram

### a. Lahan Eksisting

Gambar disamping menunjukkan pemanfaatan lahan di pesisir Kota Mataram didominasi oleh lahan permukiman dengan luas 117,49 ha. Posisi kedua dan ketiga

No.	Penggunaan Lahan	Luas (Ha)
1.	Badan Air	8,32
2.	Badan Jalan	8,06
3.	Hankam	2,77
4.	Industri	5,29
5.	PLN	16,40
6.	Keagamaan	1,10
7.	Kebun	2,25
8.	Lahan Kosong	21,56
9.	Pantai	23,23
10.	Pariwisata	2,06
11.	Pemukaman	15,75
12.	Pendidikan	3,73
13.	Perdagangan dan Jasa	14,47
14.	Perkantoran	1,97
15.	Permukiman	117,49
16.	Pertanian	42,00
17.	Ruang Terbuka Hijau	4,49
18.	TPS	0,20
19.	Vegetasi Non Budidaya	22,52
20.	<b>Jumlah</b>	<b>313,68</b>

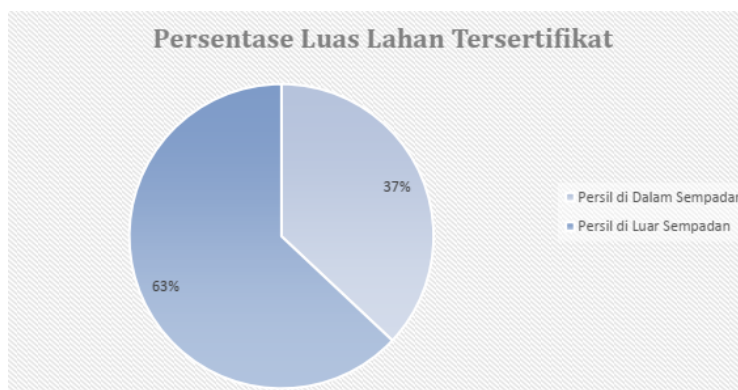
Sumber : RTRW Kota Mataram dan Hasil Pengolahan Data, 2021



masing-masing ditempati oleh lahan pertanian dan pantai dengan luas masing-masing sebesar 42,0 ha dan 23,23 ha.

### b. Survey Kepemilikan Lahan

Hasil pemetaan menunjukkan bahwa luas lahan yang sudah bersertifikat adalah sebesar 110,14 Ha. Dari total lahan bersertifikat milik pribadi tersebut, sebanyak 40,24 Ha atau sebesar 37% berada di dalam area sempadan pantai dengan jarak 100 meter. Adapun sisanya sebesar 69,90 Ha atau sebesar 63% berada di luar area sempadan. Kondisi di lapangan ini tentunya sudah sangat tidak sesuai dengan dasar hukum, kebijakan maupun aturan-aturan terkait RTRW yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Untuk lebih detailnya dibuat dalam bentuk diagram sebagai berikut;



Hal ini juga menunjukkan bahwa kondisi eksisting pesisir pantai Kota Mataram saat ini sangat mengkhawatirkan. Jarak antara garis bibir pantai ke area permukiman tentunya rentan terhadap abrasi. Oleh karena itu, perlu dilakukan penataan sekaligus pembangunan pemecah gelombang untuk

mereduksi dan memperlambat laju abrasi di kawasan pesisir pantai Kota Mataram.

### c. Permukiman Penduduk

Seperti yang dijelaskan sebelumnya, luas lahan yang sudah bersertifikat di area pesisir pantai Kota Mataram adalah sebesar 110,14 Ha. Dari total lahan bersertifikat milik pribadi tersebut, sebanyak 40,24 Ha atau sebesar 37% berada di dalam area sempadan pantai dengan jarak 100 meter. Lahan-lahan tersebut selain dimanfaatkan sebagai area industri, seperti PLN, Pertamina, dan PLTMGU Lombok Peaker, juga difungsikan sebagai area permukiman penduduk.

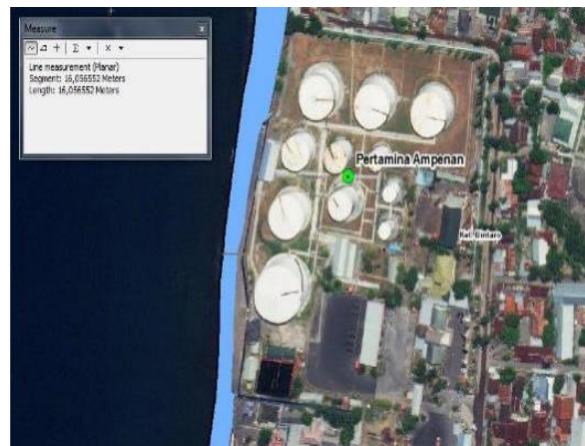


Dari hasil pengamatan di lapangan, jenis permukiman di kawasan pesisir pantai Kota Mataram bervariasi mulai dari bangunan non-permanen, semi-permanen, dan permanen. Area permukiman di sepanjang 9 km garis pantai Kota Mataram memiliki karakter yang hamper sama. Kesamaan karakter tersebut tercermin dari kawasan yang kurang tertata dan padat penduduk, seperti yang terlihat pada Gambar diatas.

### 3. KONDISI EKSISTING INFRASTRUKTUR DI PESISIR PANTAI KOTA MATARAM

#### a. Integrated Terminal PT. Pertamina Ampenan

Laporan Pengelolaan Garis Pantai Kota Mataram Sebagai Upaya Adaptasi dan Mitigasi Bencana Pantai dan Kenaikan Muka Air Laut pada tahun 2019 menunjukkan bahwa saat ini Terminal BBM Pertamina ini telah memiliki infrastruktur pelindung pantai berupa dinding pantai yang terdiri atas konstruksi turap (*sheet pile*) epanjang 200 m. Selain itu, di sekitar area ini juga telah terdapat dinding pantai berupa konstruksi turap sepanjang 490 m dari Taman Ampenan hingga muara Sungai Jangkok. Adapun di muara Sungai Jangkok juga telah terdapat 2 (dua) unit jetty yang berupa konstruksi timbunan tetrapod dengan panjang 60 m dan 150 m.



## b. Kompleks Brimob Ampenan

Kompleks Brimob Polda NTB terletak di garis Pantai Penghulu Agung, serta berada tepat di samping muara Sungai Ancar. Berdasarkan hasil pengukuran, saat ini jarak dari titik pasang tertinggi ke dinding terluar bangunan adalah sejauh 105 meter, seperti yang terlihat pada Gambar disamping. Jarak ini masih sesuai dengan ketentuan garis sempadan pantai. Namun, karena dekatnya jarak bangunan dengan pantai dan sungai, kawasan ini perlu mendapat perhatian khusus terkait konstruksi pelindung pantai.



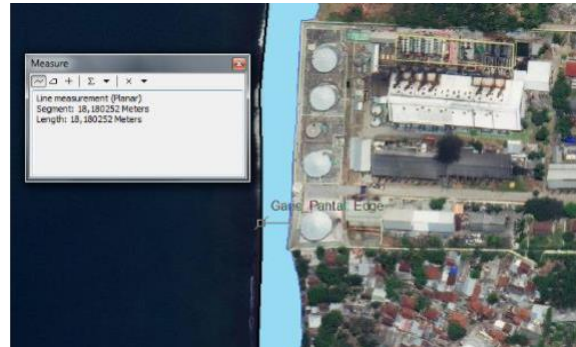
## c. PLTGU Lombok Peaker Tanjung Karang

Saat ini, kawasan PLTGU Lombok Peaker belum dilengkapi oleh infrastruktur pelindung pantai. Ke depannya, hal ini tentunya perlu direncanakan berkaitan dengan kondisi eksisting bangunan yang sudah dekat dengan garis pantai. Laporan Pengelolaan Garis Pantai Kota Mataram Sebagai Upaya Adaptasi dan Mitigasi Bencana Pantai dan Kenaikan Muka Air Laut pada tahun 2019 menunjukkan bahwa saat ini pelindung pantai hanya terdapat di muara Sungai Ancar yang berlokasi di sisi utara kawasan. Muara Sungai Ancar telah dilengkapi dengan pelindung pantai dalam bentuk 2 (dua) unit jetty berupa konstruksi timbunan batu alam dengan panjang 105 m dan 112 m.



#### d. PLTD Ampenan

Berdasarkan hasil pengukuran, saat ini jarak dari titik pasang tertinggi ke dinding terluar bangunan adalah sejauh 18 meter, seperti yang terlihat pada Gambar disamping. Kondisi ini tentunya sangat mengkhawatirkan karena sangat dekat dari garis pantai. Laporan Pengelolaan Garis Pantai Kota Mataram Sebagai Upaya Adaptasi dan Mitigasi



Bencana Pantai dan Kenaikan Muka Air Laut pada tahun 2019 menunjukkan bahwa saat ini PLTD Ampenan memiliki pelindung pantai dalam bentuk pemecah gelombang bentuk-T (*breakwater*) sebanyak 2 (dua) unit.

#### 4. Kondisi Eksisting Destinasi Wisata Pantai Kota Mataram

Daerah pesisir pantai Kota Mataram telah memiliki beberapa titik lokasi wisata pantai yang ramai dikunjungi. Lokasi tersebut meliputi Pantai Ampenan, Pantai Tanjung Karang, Pantai Loang Baloq, Pantai Gading, dan Pantai Batas Senja. Secara umum, karakteristik wisatawan yang berkunjung ke kawasan-kawasan wisata pantai tersebut berasal dari 3 (tiga) kategori umur utama, yaitu pengunjung anak-anak (usia <12 tahun), pengunjung remaja (usia 12 – 18 tahun), dan pengunjung dewasa (usia >18 tahun).

##### 4.1 Pantai Ampenan

###### a. Infrastruktur & Aktifitas Pada Pantai Ampenan

Kondisi eksisting Pantai Ampenan beserta keberadaan berbagai infrastruktur maupun fasilitas penunjang yang ada. Maka aktifitas di Kawasan Pantai Ampenan secara umum dikelompokkan menjadi :

- Aktifitas wisata

Wisata kuliner menjadi aktifitas wisata yang paling mendominasi di kawasan Pantai Ampenan. Hal ini dikarenakan daerah Pantai Ampenan sudah tidak memiliki daerah berpasir yang luas. Sehingga pengunjung yang datang lebih senang menghabiskan waktu untuk melakukan aktifitas-aktifitas diluar wisata pantai. Namun, pengunjung tetap dapat menikmati view laut dan berjalan-jalan di sekitar area plaza.

- Aktifitas servis

Kegiatan servis yang berlangsung di kawasan Pantai Ampenan adalah keberadaan lapak-lapak yang menawarkan berbagai menu kuliner, seperti nasi peleceng, nasi campur, sate bulayak, ikan bakar, jajanan hingga berbagai macam minuman. Selain itu, terdapat pula

kegiatan servis lain seperti penyewaan permainan dan area bermain anak, serta terkait parkir.

- Aktifitas pengelolaan

Pengelolaan kawasan Pantai Ampenan saat ini dilaksanakan oleh masyarakat sekitar dan pemerintah ikut serta mengatur dalam pengelolaannya.

#### **b. Permasalahan Pada Pantai Ampenan**

Berdasarkan hasil survey dan identifikasi awal di lapangan, ditemukan beberapa permasalahan pada kawasan Pantai Ampenan sebagai berikut:

- Kurangnya kesadaran untuk memperhatikan kebersihan lingkungan. Masih banyak ditemui sampah-sampah yang berserakan di sekitar area, khususnya di area wisata kuliner. Berdasarkan pengamatan di lapangan, hal ini disebabkan oleh kurangnya pengadaan tempat sampah di area tersebut.
- Kurangnya perawatan infrastruktur yang ada sehingga beberapa bangunan dan fasilitas penunjang sudah mulai rusak.
- Kurangnya jumlah vegetasi di dalam kawasan wisata pantai, sehingga saat siang hari akan terasa sangat panas. Hal ini tentunya mempengaruhi kenyamanan pengunjung.
- Area penyedia jasa seperti area bermain anak dan sebagainya belum ditata secara optimal.

### **4.2 Wisata Pantai Tanjung Karang**

#### **a. Infrastruktur & Aktifitas Pada Pesisir Pantai Tanjung Karang**

Ditinjau dari fasilitas yang dimiliki, kawasan Pantai Tanjung Karang sudah dilengkapi dengan berbagai fasilitas penunjang, seperti gazebo, taman bermain, area parkir, serta berbagai fasilitas lainnya. Maka aktifitas di kawasan Pantai Tanjung Karang secara umum dikelompokkan menjadi:

- Aktifitas wisata

Didukung oleh area tepi pantai yang luas, wisata pantai menjadi daya tarik utama Pantai Tanjung Karang. Pengunjung dapat melakukan berbagai kegiatan sesuai minat masing-masing, mulai dari berenang, memancing, bersantai, atau sekedar bermain di pantai.

- Aktifitas servis

Kegiatan servis yang berlangsung di kawasan Pantai Tanjung Karang adalah keberadaan lapak-lapak yang menawarkan berbagai menu kuliner. Selain itu, terdapat pula kegiatan servis lain seperti penyewaan perahu nelayan bagi pengunjung yang berminat.

- Aktifitas pengelolaan

Pengelolaan kawasan Pantai Tanjung Karang saat ini dilaksanakan oleh masyarakat sekitar dan pemerintah ikut serta mengatur dalam pengelolaannya.

#### **b. Permasalahan Pada Pesisir Pantai Tanjung Karang**

- Kurangnya kesadaran untuk memperhatikan kebersihan lingkungan. Masih banyak terlihat sampah yang berserakan disebabkan kurangnya jumlah tempat sampah di dalam kawasan.
- Area parkir belum ditata secara optimal sehingga seringkali terlihat berantakan dan kurang indah dipandang.
- Kurangnya perawatan infrastruktur yang ada sehingga banyak fasilitas yang sudah rusak
- Kurangnya jumlah vegetasi di dalam kawasan wisata pantai, sehingga saat siang hari akan terasa sangat panas dan terik. Hal ini tentunya mempengaruhi kenyamanan pengunjung.
- Belum terdapat pengaman pantai, terlebih karena wilayah Pantai Tanjung Karang termasuk dalam daerah abrasi tinggi.

### **4.3 Wisata Pesisir Pantai Loang Baloq**

#### **a. Infrastruktur & Aktifitas Pada Pesisir Pantai Loang Baloq**

Aktifitas di kawasan Pantai Loang Baloq secara umum dikelompokkan menjadi :

- Aktifitas wisata

Secara umum, aktifitas wisata di Pantai Loang Baloq terbagi atas dua area utama, yaitu area pantai dan area danau buatan. Kegiatan di area pantai meliputi wisata pantai, berenang, memancing, bersantai dan menikmati pemandangan. Adapun kegiatan di area danau meliputi wisata kuliner, berolahraga, bersantai, dan bermain perahu bebek air.

- Aktifitas servis

Kegiatan servis yang berlangsung di kawasan Pantai Loang Baloq adalah keberadaan lapak-lapak yang menawarkan berbagai menu kuliner. Selain itu, terdapat pula kegiatan servis lain seperti penyewaan perahu bebek air bagi pengunjung.

- Aktifitas pengelolaan

Pengelolaan kawasan Pantai Loang Baloq saat ini dilaksanakan oleh masyarakat sekitar dan pemerintah ikut serta mengatur dalam pengelolaannya.



## **b. Permasalahan Pada Pesisir Pantai Loang Baloq**

- Kurangnya kesadaran untuk memperhatikan kebersihan lingkungan. Masih banyak terlihat sampah yang berserakan disebabkan kurangnya jumlah tempat sampah di dalam kawasan.
- Kurangnya perawatan infrastruktur yang ada sehingga banyak fasilitas yang sudah rusak
- Kondisi lansdcape kawasan yang kurang terawat. Terdapat cukup banyak pohon yang seharusnya dipangkas, namun dibiarkan tumbuh tidak teratur dan merusak keindahan kawasan wisata Loang Baloq.
- Sudah ada pengaman pantai berupa jetti, tetapi sudah rusak sehingga gelombang yang dating mejadi salah satu factor penyebab abrasi tinggi.

## **4.4 Wisata Pesisir Pantai Gading**

### **a. Infrastruktur & Aktifitas Pada Pesisir Pantai Gading**

Aktifitas di kawasan Pantai Gading secara umum dikelompokkan menjadi:

- Aktifitas wisata

Kegiatan di area pantai meliputi wisata pantai, berenang, memancing, bersantai dan menikmati pemandangan. Selain itu pengunjung juga dapat melakukan berbagai kegiatan lain meliputi wisata kuliner dan bermain bagi anak-anak.

- Aktifitas servis

Kegiatan servis yang berlangsung di kawasan Pantai Gading adalah keberadaan lapak-lapak yang menawarkan berbagai menu kuliner.

- Aktifitas pengelolaan

Pengelolaan kawasan Pantai Gading saat ini dilaksanakan oleh masyarakat sekitar dan pemerintah ikut serta mengatur dalam pengelolaannya.

### **c. Permasalahan Pada Pesisir Pantai Gading**

- Kurangnya kesadaran untuk memperhatikan kebersihan lingkungan. Masih banyak terlihat sampah yang berserakan disebabkan kurangnya jumlah tempat sampah di dalam kawasan. Akibatnya, kawasan terlihat kumuh.
- Lahan parkir dalam kawasan belum ditata secara optimal, sehingga kurang indah dipandang
- Kurangnya perawatan infrastruktur yang ada sehingga banyak fasilitas yang sudah rusak dan terlihat kurang terawat.
- Belum terdapat pengaman pantai, terlebih karena wilayah Pantai Gading termasuk dalam daerah abrasi tinggi

## **4.5 WISATA PESISIR PANTAI BATAS SENJA**

### **a. Infrastruktur & Aktifitas Pada Pesisir Pantai Batas Senja**

Aktifitas di kawasan Pantai Batas Senja secara umum dikelompokkan menjadi:

- Aktifitas wisata

Kegiatan di area pantai meliputi wisata pantai, berenang, memancing, bersantai dan menikmati pemandangan. Selain itu pengunjung juga dapat melakukan berbagai kegiatan lain meliputi wisata kuliner dan bermain bagi anak-anak.

- Aktifitas servis

Kegiatan servis yang berlangsung di kawasan Pantai Batas Senja adalah keberadaan lapak-lapak yang menawarkan berbagai menu kuliner.

- Aktifitas pengelolaan

Pengelolaan kawasan Pantai Batas Senja saat ini dilaksanakan oleh masyarakat sekitar dan pemerintah ikut serta mengatur dalam pengelolaannya.

### **b. Permasalahan Pada Pesisir Pantai Batas Senja**

- Kurangnya kesadaran untuk memperhatikan kebersihan lingkungan. Masih banyak terlihat sampah yang berserakan disebabkan kurangnya jumlah tempat sampah di dalam kawasan. Akibatnya, kawasan terlihat kumuh.
- Lahan parkir dalam kawasan belum ditata secara optimal, sehingga kurang indah dipandang
- Masih kurangnya vegetasi alami di dalam kawasan, sehingga kawasan menjadi sangat panas di siang hari.

## **5. Identifikasi Potensi Pengembangan Pesisir Pantai Kota Mataram**

Sesuai dengan identifikasi peta grid pemanfaatan kawasan pesisir sebelumnya, terdapat 2 (dua) lokasi potensial yang dapat dikembangkan sebagai tujuan destinasi wisata. Potensi pertama adalah Pantai Meninting, sedangkan potensi kedua adalah Pantai Penghulu Agung. Kegiatan survey yang dilakukan melalui penyisiran di sepanjang garis pesisir pantai Kota Mataram juga menemukan lokasi potensial ketiga, yaitu kawasan produksi produk perikanan rakyat yang tersebar di sekitar pantai Kecamatan Ampenan. Meskipun kurang sesuai sebagai potensi wisata, namun lokasi potensial ketiga ini memiliki potensi ekonomi yang cukup tinggi sehingga perlu mendapat perhatian.



Kondisi eksisting masing-masing lokasi potensial, baik itu Pantai Meninting, Pantai Penghulu Agung, serta kawasan produksi produk perikanan rakyat, dapat dilihat pada pembahasan berikut.

### **5.1 Potensi Wisata Pantai Meninting**

Hasil survey di lapangan menunjukkan bahwa kawasan Pantai Meninting dan sekitarnya cenderung belum dipadati oleh hunian penduduk maupun fasilitas wisata pantai. Selain itu, kawasan ini juga belum memiliki infrastruktur pelindung pantai. Kondisi ini tentunya sangat mendukung untuk perencanaan perencanaan pelindung pantai dan pemanfaatan lahan yang berwawasan kebencanaan dan lingkungan. Pembangunan rusunawa yang sedang berlangsung di area Bintaro juga diharapkan dapat menunjang fungsi Pantai Meninting sebagai area wisata. Rencana relokasi warga yang bermukim di sisi barat pemakaman Bintaro ke dalam rusunawa diharapkan dapat membuat kawasan ini semakin tertata dan dioptimalkan untuk kegiatan wisata.

Data dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) menunjukkan bahwa lahan di kawasan ini merupakan lahan milik pribadi bersertifikat. Oleh karena itu, pengembangan kawasan ini sebagai destinasi wisata menuntut sistem kerjasama dan pengelolaan antara masyarakat dan pemerintah.

### **5.2 Potensi Wisata Pantai Penghulu Agung**

Hasil survey di lapangan menunjukkan bahwa kawasan Pantai Penghulu Agung dan sekitarnya cenderung belum dipadati oleh hunian penduduk maupun fasilitas wisata pantai. Meskipun demikian, kawasan ini telah memiliki beberapa infrastruktur pelindung pantai, baik berupa jetty dengan konstruksi timbunan tetrapod, jetty dengan konstruksi timbunan batu alam, maupun krib (groin) dengan konstruksi timbunan batu alam. Letak infrastruktur pelindung pantai ini tersebar dari muara Sungai Gedur, sepanjang Pantai Penghulu Agung, hingga muara Sungai Ancar.

Ke depannya, pembangunan kawasan Pantai Penghulu Agung sebagai destinasi wisata perlu mempertimbangkan aspek kebencanaan dan lingkungan. Selain itu, data dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) menunjukkan bahwa lahan di kawasan ini merupakan lahan milik pribadi bersertifikat. Oleh karena itu, pengembangan kawasan ini sebagai destinasi wisata menuntut sistem kerjasama dan pengelolaan antara masyarakat dan pemerintah.

## **6. Potensi Ekonomi Kawasan Produksi Produk Perikanan Rakyat.**

Kawasan produksi produk perikanan rakyat yang tersebar di sekitar pantai Kecamatan Ampenan merupakan salah satu kawasan yang berpotensi untuk dikembangkan. Meskipun kurang sesuai sebagai potensi wisata, namun lokasi potensial ketiga ini memiliki potensi ekonomi yang cukup tinggi sehingga perlu mendapat perhatian. Pengembangan kawasan dan peningkatan kualitas SDM di kawasan ini diperlukan tidak hanya untuk meningkatkan pendapatan daerah, namun juga diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan nelayan di sekitar kawasan.

## 7. Analisis SWOT

<div style="text-align: center;"> <p>Analisis Internal</p> <p>Analisis eksternal</p> </div>	<b>Kekuatan (Strengths)</b>	<b>Kelemahan (Weaknesses)</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Potensi wisata yang cukup banyak, beragam, dan didukung oleh view yang menarik</li> <li>• Lokasi strategis dengan aksesibilitas tinggi</li> <li>• Tingginya minat masyarakat terhadap wisata pantai</li> <li>• Pengelolaan tiket masuk area wisata dan tiket parkir dapat menjadi potensi pendapatan daerah</li> <li>• Ekosistem pantai yang kaya</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kepemilikan lahan kawasan pesisir yang hampir semuanya merupakan milik pribadi bersertifikat</li> <li>• Kawasan yang kotor dan tidak terawat</li> <li>• Sistem penataan dalam kawasan yang belum optimal</li> <li>• Sarana dan prasarana penunjang yang belum memadai</li> <li>• Belum terdapat infrastruktur pengamanan pantai yang optimal</li> </ul>
<b>Peluang (Opportunities)</b>	<b>Strategi (S-O)</b>	<b>Strategi (W-O)</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tingginya dukungan pemerintah dalam pengembangan kawasan,</li> <li>• Area pesisir pantai diperuntukkan sebagai kawasan pariwisata sesuai RTRW Kota Mataram,</li> <li>• Peran masyarakat yang cukup signifikan dalam mendukung keberhasilan pengembangan kawasan</li> <li>• Potensi pengunjung yang datang, baik untuk wisata pantai maupun wisata kuliner</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perlunya koordinasi antar dinas-dinas terkait dalam penataan dan pengembangan area pesisir sebagai destinasi wisata</li> <li>• Menjalin kerjasama antara pemerintah dan masyarakat dalam pengelolaan kawasan wisata</li> <li>• Meningkatkan minat pengunjung melalui penataan kawasan wisata yang nyaman dan penyediaan infrastruktur dan fasilitas penunjang yang memadai</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menetapkan sistem kerjasama antara pemerintah dan pemilik lahan, baik berupa ganti rugi lahan maupun sistem lain yang disepakati</li> <li>• Melakukan pengembangan dan penataan kawasan yang berwawasan lingkungan, salah satunya melalui pengadaan sarana dan prasarana yang memadai</li> <li>• Menjalin kerja sama dengan CSR dalam rangka perawatan sarana dan prasarana penunjang</li> </ul>
<b>Ancaman (Threats)</b>	<b>Strategi (S-T)</b>	<b>Strategi (W-T)</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Keamanan kawasan pesisir</li> <li>• Hilangnya sumber mata pencaharian nelayan jika ekosistem laut tidak dijaga</li> <li>• Aktivitas pengunjung yang merusak &amp; potensi pencemaran laut yang disebabkan oleh aktifitas manusia</li> <li>• Pemanfaatan lahan pesisir secara berlebihan sehingga menurunkan daya dukung lingkungan</li> <li>• Laju abrasi pantai yang meningkat setiap tahun</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Melibatkan masyarakat sekitar dalam menciptakan kawasan yang aman dan nyaman</li> <li>• Menerapkan konsep wisata pantai yang berbasis lingkungan dengan melibatkan partisipasi pengunjung kawasan</li> <li>• Melakukan pengembangan kawasan secara bertanggung jawab dengan tetap memperhatikan fungsi lahan dan keberlanjutan lingkungan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengedukasi masyarakat dan pengunjung terkait pentingnya menjaga kebersihan lingkungan demi keberlanjutan ekosistem</li> <li>• Melakukan pelatihan bagi masyarakat sekitar untuk meningkatkan kompetensi dalam pengelolaan lingkungan wisata berbasis lingkungan</li> <li>• Membangun infrastruktur pelindung pantai</li> </ul>

## F. KESIMPULAN

Data dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) terkait kepemilikan lahan di kawasan pesisir 9 km Kota Mataram menunjukkan bahwa 110,14 Ha dari kawasan pesisir pantai merupakan lahan milik pribadi yang bersertifikat. Dari total lahan bersertifikat tersebut, sebanyak 40,24 Ha berada di dalam area sempadan pantai dengan jarak 100 meter. Adapun sisanya sebesar 69,90 Ha berada di luar area sempadan. Hal ini berarti 37% dari total lahan bersertifikat berada di dalam area sempadan, sedangkan 63% sisanya berada di luar area sempadan.

Kondisi 37% lahan yang berada di dalam area sempadan ini sudah sangat mengkhawatirkan karena terletak sangat dekat dengan garis bibir pantai. Hal ini terlihat dari hasil pemetaan yang telah dilakukan diperoleh data bahwa jarak permukiman penduduk dengan garis pantai bervariasi antara 16-58 meter. Dalam identifikasi kawasan sepanjang 9 km, Kelurahan Ampenan Tengah menjadi daerah dengan jarak terdekat ke bibir pantai, yaitu sejauh 18,3 meter. Di sisi lain, terminal BBM Pertamina yang terletak di sekitar Kawasan Kota Tua Ampenan berjarak sekitar 16 meter dari garis pantai. Kelurahan Banjar menjadi daerah dengan jarak terjauh ke bibir pantai, yaitu sejauh 58,2 meter. Kondisi ini tentunya sudah tidak sesuai dengan aturan sempadan pantai yang ditetapkan sejauh 100 (seratus) meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat.

Sisi lain sesuai identifikasi yang telah dilakukan, terdapat 2 (dua) lokasi potensial yang dapat dikembangkan sebagai tujuan destinasi wisata. Potensi pertama adalah Pantai Meninting, sedangkan potensi kedua adalah Pantai Penghulu Agung.

Terkait destinasi wisata eksisting, hasil identifikasi dan analisa menunjukkan bahwa sebagian besar area wisata di kawasan pesisir yang sudah ada sekarang belum dioptimalkan potensinya. Hal ini tercermin dari masih banyaknya terdapat permasalahan dalam kawasan, antara lain lingkungan yang terlihat kumuh karena tidak memiliki penataan yang jelas, sistem pengelolaan sampah dan lingkungan yang kurang baik, serta keberadaan fasilitas penunjang yang tidak terawat.

## **G. REKOMENDASI**

Secara umum, rekomendasi terkait implementasi tindak lanjut dari kegiatan Identifikasi Pemanfaatan Ruang Pesisir di Sepanjang Garis Pantai Sebagai Tujuan Destinasi Wisata di Wilayah Kota Mataram ini terbagi atas lima bagian, yaitu rekomendasi terkait abrasi, rekomendasi terkait permukiman penduduk, rekomendasi terkait infrastruktur kawasan pantai, rekomendasi terkait pertumbuhan kawasan wisata dan ekonomi, serta rekomendasi terkait peningkatan Pendapatan Asli daerah (PAD). Secara lebih detail, rekomendasi-rekomendasi tersebut meliputi:

### **1. Rekomendasi Terkait Abrasi**

Pembangunan infrastruktur pelindung pantai sebagai upaya untuk menekan laju abrasi ini sangat diperlukan. Namun, infrastruktur pelindung pantai ini harus dilakukan secara seksama dan berhati-hati dengan mempertimbangkan tipikal dan karakter setiap kawasan yang akan dibangun.

### **2. Rekomendasi Terkait Permukiman Penduduk**

Pendekatan yang dapat ditempuh adalah melalui pembebasan lahan milik penduduk (ganti rugi lahan) dan relokasi secara bertahap. Pembebasan lahan perlu dilakukan dengan mempertimbangkan nilai lahan secara adil agar tidak merugikan penduduk. Adapun opsi relokasi dapat dipertimbangkan dalam kasus pemukiman informal, dimana warga yang direlokasi dapat dipindahkan ke rusunawa. Namun, jika biaya yang diperlukan untuk relokasi terlalu besar, atau tidak dapat diterapkan seperti pada kasus pemukiman formal, maka perlu dilakukan pembangunan sejumlah infrastruktur pelindung pantai di sekitar kawasan permukiman eksisting.

### **3. Rekomendasi Terkait Infrastruktur Kawasan Pantai**

Sejumlah infrastruktur penting, seperti terminal BBM Pertamina, PLTGU Lombok Peaker, dan PLTD Ampenan, yang berada di kawasan pesisir pantai Kota Mataram perlu mendapat perhatian khusus terkait resiko abrasi. Salah satu cara yang dapat ditempuh adalah melalui pembangunan konstruksi pelindung pantai yang dapat menghentikan laju erosi disekitar infrastruktur terkait. Pembangunan konstruksi pelindung pantai ini harus dilakukan secara

seksama dan berhati-hati dengan mempertimbangkan tipikal dan karakter pantai disekitar infrastruktur vital tersebut.

#### **4. Rekomendasi Terkait Pengembangan Kawasan Wisata dan Ekonomi**

Pantai Meninting dan Pantai Penghulu Agung merupakan dua lokasi yang direkomendasikan untuk dikembangkan sebagai area destinasi wisata. Berdasarkan hasil survey di lapangan, kedua lokasi ini memiliki potensi karena menawarkan *view* yang menarik, menawarkan potensi wisata kuliner, serta mudah dijangkau dari Kota Mataram. Meski demikian, kondisi saat ini masih perlu dioptimalkan melalui pengembangan dan penataan kawasan yang berwawasan lingkungan, salah satunya melalui pengadaan sarana dan prasarana yang memadai. Kawasan ini berpotensi menjadi penyumbang pemasukan ekonomiyang lebih besar jika penataannya dilakukan secara intensif. Oleh karena itu, koordinasi antardinas-dinas terkait sangat diperlukan dalam penataan dan pengembangan area pesisir sebagai destinasi wisata.

#### **5. Rekomendasi Terkait Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

Pemerintah perlu menjalin kerjasama secara sistematis, adil, dan transparan dengan masyarakat sekitar kawasan pesisir dalam pengelolaan kawasan. Kerjasama ini tidak hanya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, namun juga untuk meningkatkan Pendapatan Asli daerah (PAD) Kota Mataram. Salah satu cara yang direkomendasikan adalah melalui regulasi pembagian hasil pendapatan yang diperoleh dari pengelolaan tiket masuk dan tiket parkir di rea wisata. Selain itu, perlu dilakukan optimalisasi potensi wisata kuliner di area pesisir pantai. Perlu dibangun tenant-tenant kuliner pada area yang belum memiliki fasilitas tersebut, misalnya di pantai Tanjung Karang, Pantai Gading, dan Pantai Meninting. Selain untuk meningkatkan daya tarik wisata, tenant-tenant tersebut juga dapat disewakan sehingga dapat berkontribusi untuk meningkatkan PAD Kota Mataram. Sedangkan untuk area yang sudah memiliki tenant kuliner seperti di Pantai Loang Baloq, Pantai Ampenan, dan Pantai Penghulu Agung, perlu dilakukan optimalisasi pendapatan daerah.

### **DAFTAR PUSTAKA**

Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Mataram, 2021, Laporan Akhir Kajian Identifikasi Pemanfaatan Ruang Pesisir Di Sepanjang Garis Pantai Sebagai Tujuan Destinasi Wisata Di Wilayah Kota Mataram. Mataram

# KAJIAN EFEKTIVITAS PROGRAM SATU RUMAH SATU JUMANTIK DAN PEMANFAATAN *FOGGING* DALAM RANGKA MENGURANGI PENYEBARAN DEMAM BERDARAH GUNA MENINGKATKAN KESEHATAN MASYARAKAT KOTA MATARAM

## Abstrak

Kasus DBD di Provinsi NTB, hampir di semua Kabupaten Kota termasuk Kota Mataram, angka kejadian DBD tahun 2019 mencapai 149,33 per 100.000 penduduk dan tahun 2020 turun menjadi 136,98 per 100.000 penduduk. Sedangkan angka kematian atau *Case Fatality Rate* (CFR) tahun 2019 sejumlah 0,21 dan pada tahun 2020 tidak ada kasus (Dikes Kota Mataram, 2021). Upaya penanggulangan DBD dilakukan melalui Program Satu Rumah Satu Juru Pantau Jentik (Jumantik). Tujuan penelitian melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan 1R1J dan pemanfaatan fogging dengan mengambil pada sampel kasus tertinggi yaitu di kecamatan selaparang dan kasus terendah di kecamatan sekarbela. Adapun metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian deskriptif analitik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan 1R1J dinilai cukup efektif serta pemanfaatan fogging 100% baik, namun pelaporan 1R1J dan fogging dilakukan masih manual. Sehingga diperlukan dalam rekomendasinya diperlukan system pelaporan berbasis IT dan pengoptimalan dalam sosialisasi, gerakan peduli lingkungan untuk dapat mendukung program 1R1J dan Pemanfaatan Fogging.

*Kata Kunci : Efektivitas, Program 1R1J, Fogging, Demam Berdarah, Kesehatan Masyarakat.*

## A. Latar Belakang

Demam Berdarah *Dengue* (DBD) merupakan tantangan kesehatan global. Setiap tahun diperkirakan terjadi 50 juta infeksi dan secara global terdapat 2.5 miliar penduduk berisiko yang mendiami daerah endemis. Negara-negara di kawasan Asia Tenggara termasuk Indonesia merupakan kawasan endemis karena beriklim tropis (World Health Organization, 2009). Provinsi Nusa Tenggara Barat merupakan salah satu daerah yang terdampak wabah DBD. Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Provinsi NTB terdapat peningkatan kasus DBD dari tahun 2019 sebanyak 2971 kasus, kemudian pada tahun 2020 sebanyak 4377 kasus dan meninggal sebanyak 13 kasus (Dikes Provinsi NTB, 2021). Kejadian DBD di Provinsi NTB, hampir di semua Kabupaten Kota termasuk Kota Mataram. Angka kejadian DBD tahun 2019 mencapai 149,33 per 100.000 penduduk dan tahun 2020 turun menjadi 136,98 per 100.000 penduduk. Sedangkan angka kematian atau *Case Fatality Rate* (CFR) tahun 2019 sejumlah 0,21 dan pada tahun 2020 tidak ada kasus (Dinkes Kota Mataram, 2021).

## B. Permasalahan

Data kasus DBD di Kota Mataram sebelum terlaksananya program Jumantik pada tahun 2018 sejumlah 95 kasus dan pada saat program telah terlaksana kasus DBD mengalami kenaikan yaitu pada tahun 2019 sejumlah 718 kasus dan mengalami penurunan pada tahun 2020 menjadi 672 kasus (Dinkes Kota Mataram, 2021). Upaya penanggulangan DBD dilakukan melalui Program Satu Rumah Satu Juru Pantau Jentik (Jumantik), dilaksanakan dalam mengendalikan Demam Berdarah di Kota Mataram sesuai dengan SK Walikota Mataram No. 117/I/2020 tentang Pembentukan Tim Gerakan Satu Rumah Satu Jumantik Kota Mataram Tahun 2020. Upaya pengendalian tersebut tidak mencapai target dan sasaran seperti pada lingkungan yang tidak terawat (Gudang, lahan kosong tempat membuang sampah, tempat genangan air), disatu sisi pemanfaatan fogging menjadi pilihan utama masyarakat dibandingkan dengan 1R1J yang menjadi langkah awal sebelum proses fogging.

## C. Tujuan

1. Evaluasi pelaksanaan program gerakan 1R1J di tingkat masyarakat.
2. Evaluasi pelaksanaan *Fogging* dalam penanggulangan kasus Demam Berdarah.
3. Pengembangan aplikasi daring dalam sistem pelaporan program Jumantik.

## D. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif analitik. Metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis Efektivitas Program 1R1J dan Kegiatan *Fogging* dalam rangka mengurangi penyebaran demam berdarah guna meningkatkan kesehatan masyarakat kota mataram.

## E. Pokok – Pokok Hasil Analisa

Hasil penelitian Kajian Efektivitas Program 1R1J dan pemanfaatan *Fogging* dalam Mengurangi Penyebaran Demam Berdarah Guna Meningkatkan Kesehatan Masyarakat di Kota Mataram menggunakan pendekatan sistem yakni penerapan suatu prosedur yang logis dan rasional dalam merancang suatu rangkaian komponen- komponen yang berhubungan sehingga dapat berfungsi sebagai satu kesatuan mencapai tujuan yang telah ditetapkan dengan menguraikan aspek input, proses dan output dari program 1R1J di Kota Mataram. Sampel dalam pelaksanaan 1R1J terdiri dari kader jumantik dengan kasus tertinggi yaitu di Kecamatan Selaparang sejumlah 50 kader jumantik, 2 petugas Puskesmas dan kasus terendah di Kecamatan Sekarbela sebanyak 55 kader jumantik, 3 petugas Puskesmas dan 1 petugas Dinas Kesehatan. Adapun hasil dalam efektifitas program 1R1J dan pemanfaatan Fogging di Kota Mataram diantaranya sebagai berikut ;

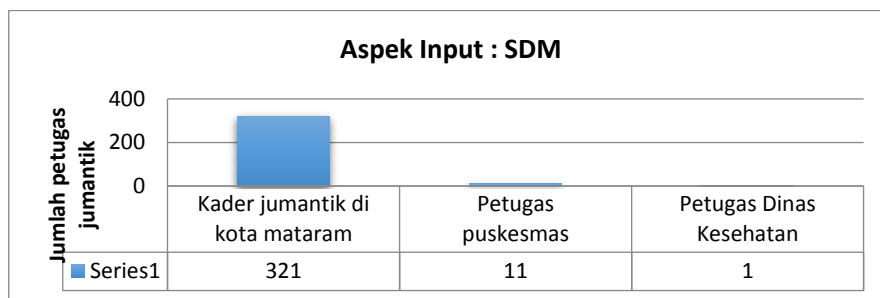
### 1. Program 1R1J

**a. Input**

**1) Sumber Daya Manusia**

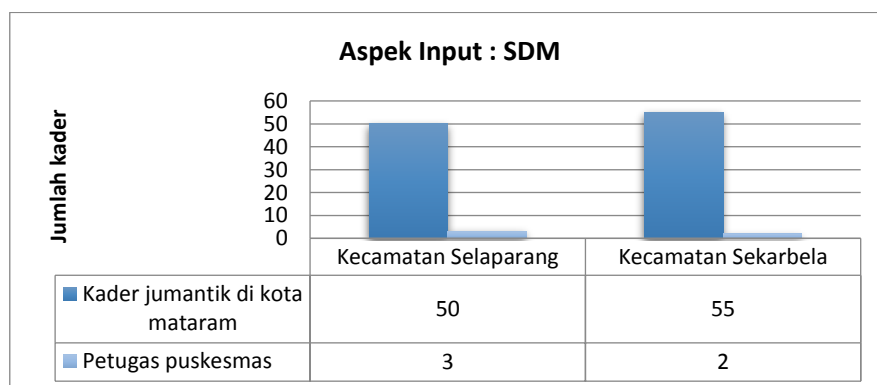
Aspek input dari program 1R1J terdiri dari ketersediaan sumber daya manusia dan sarana yang mendukung berjalannya program. Sumber daya manusia dalam pelaksanaan 1R1J di Kota Mataram sejumlah 321 kader jumantik yaitu terdiri dari 1 kader jumantik pada setiap lingkungan, 11 petugas jumantik pada 11 puskesmas dan 1 petugas Dinas Kesehatan. Jumlah kader dan petugas 1R1J dapat dilihat pada gambar berikut:

**Diagram 1 Aspek input : SDM Program 1R1J di Kota Mataram**



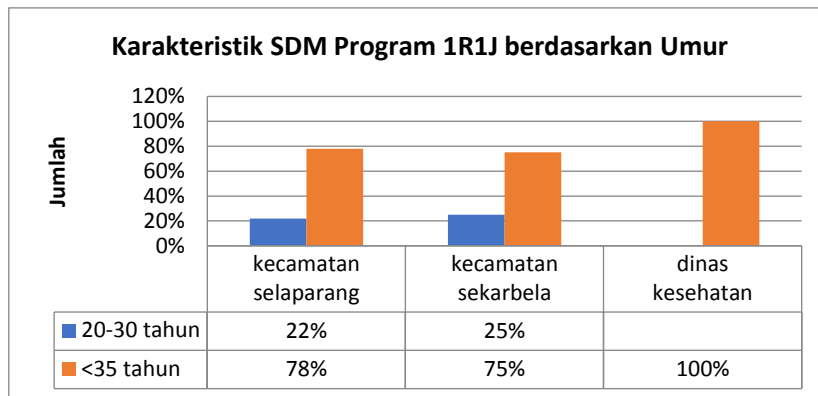
Namun dari semua sumber daya manusia, sampel dalam pelaksanaan 1R1J terdiri dari kader jumantik dengan kasus tertinggi yaitu di Kecamatan Selaparang sejumlah 50 kader jumantik, 2 petugas Puskesmas dan kasus terendah di Kecamatan Sekarbela sebanyak 55 kader jumantik, 3 petugas Puskesmas dan 1 petugas Dinas Kesehatan. Jumlah sample kader dan petugas 1R1J dapat dilihat pada gambar berikut:

**Diagram 2 Aspek input : SDM Sampel Program 1R1J di Kota Mataram**



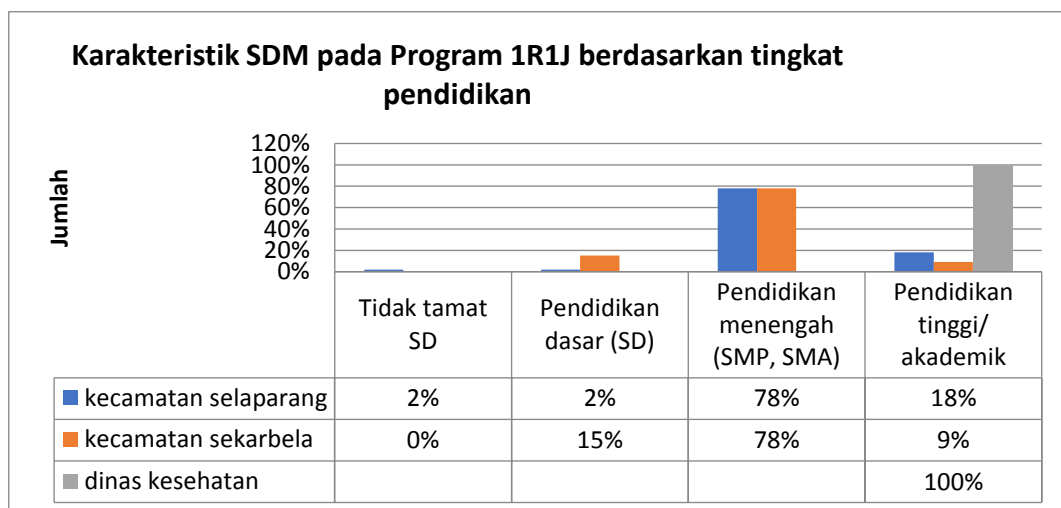
## 2) Karakteristik Responden

**Diagram 3** Gambaran Karakteristik SDM pada Program 1R1J berdasarkan umur



Berdasarkan diagram 3 sebagian besar pelaksana program 1R1J berada pada rentang usia >35 tahun yakni kader 1R1J di Kecamatan Selaparang sebanyak 39 kader (78%), Kecamatan Sekarbela sebanyak 41 kader (75%) dan 1 (100%) petugas di Dinas Kesehatan.

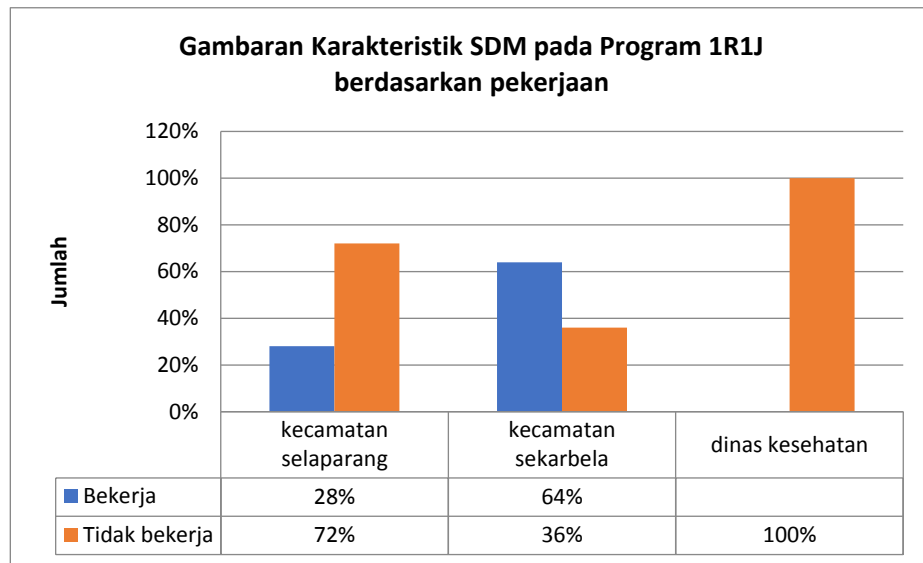
**Diagram 4** Gambaran Karakteristik SDM pada Program 1R1J berdasarkan tingkat pendidikan



Berdasarkan diagram 4 sebagian besar pelaksana program 1R1J berada pada tingkat pendidikan menengah yaitu sebesar 78% pada kecamatan Selaparang dan kecamatan Sekarbela.

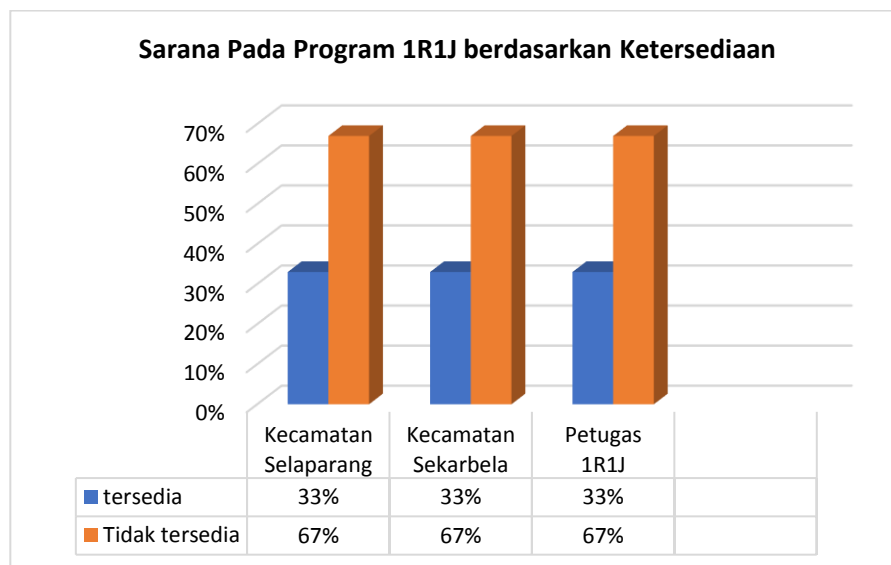


**Diagram 5 Gambaran Karakteristik SDM pada Program 1R1J berdasarkan pekerjaan**



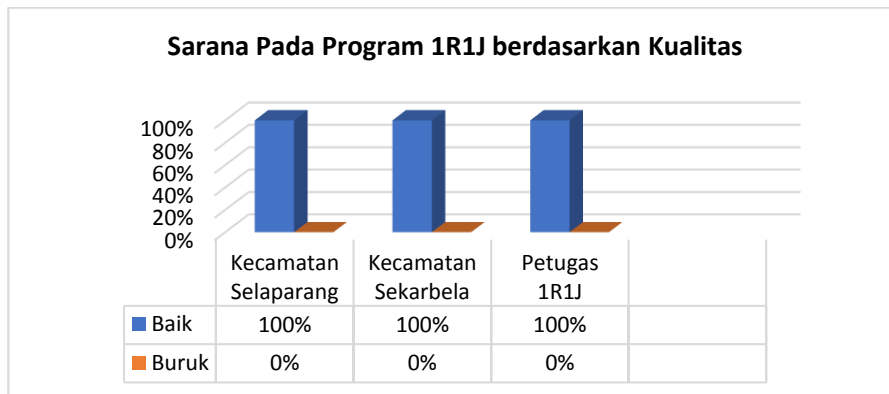
Berdasarkan diagram 5 sebagian besar pelaksana program 1R1J di kecamatan Selaparang pada pategori tidak bekerja yaitu sebanyak 72% dan di kecamatan Sekarbela pada kategori bekerja yaitu sebanyak 64% kader.

**Diagram 6 Gambaran Program 1R1J berdasarkan ketersediaan sarana**



Berdasarkan diagram 6 sebagian besar sarana dalam pelaksana program 1R1J tidak tersedia yaitu sebanyak 67% pada setiap kecamatan dan senada dengan jawaban dari dinas kesehatan yaitu sarana hanya tersedia 33%. Skala rata-rata untuk distribusi ini adalah 1.00 yang termasuk kategori tidak efektif pada dua kecamatan.

**Diagram 7 Gambaran Program 1R1J berdasarkan kualitas sarana**

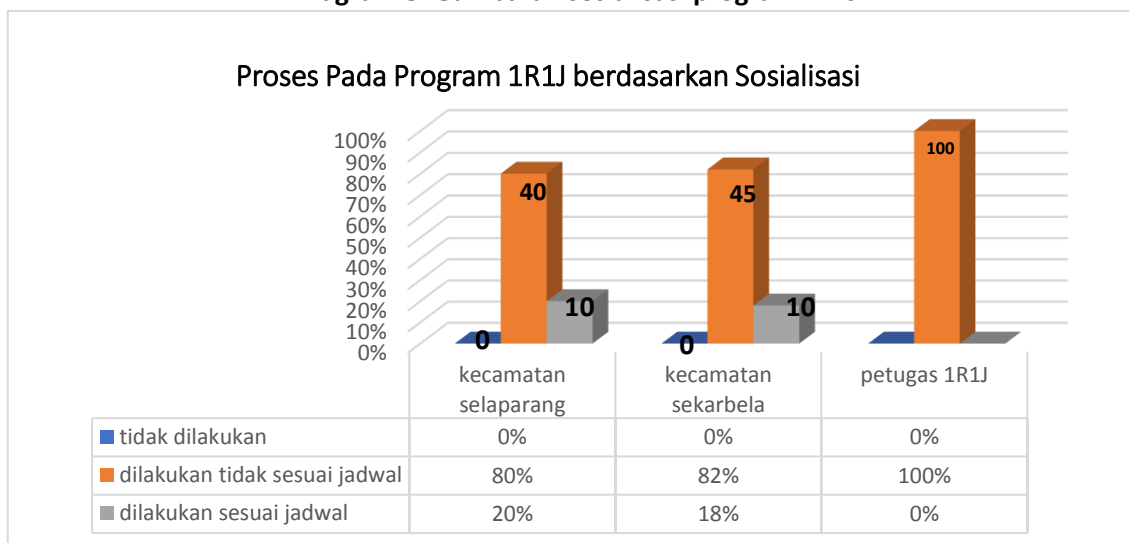


Berdasarkan diagram 7 dapat dilihat bahwa 33% dari sarana yang tersedia dalam pelaksanaan program 1R1J 100% dengan kualitas baik. Akan tetapi skala rata-rata untuk distribusi ini adalah 1.00 termasuk kategori tidak efektif pada dua kecamatan dikarenakan ketersediaan sarana yang tidak lengkap menyebabkan ketidakefektifan sarana pada program 1R1J.

**b. Proses**

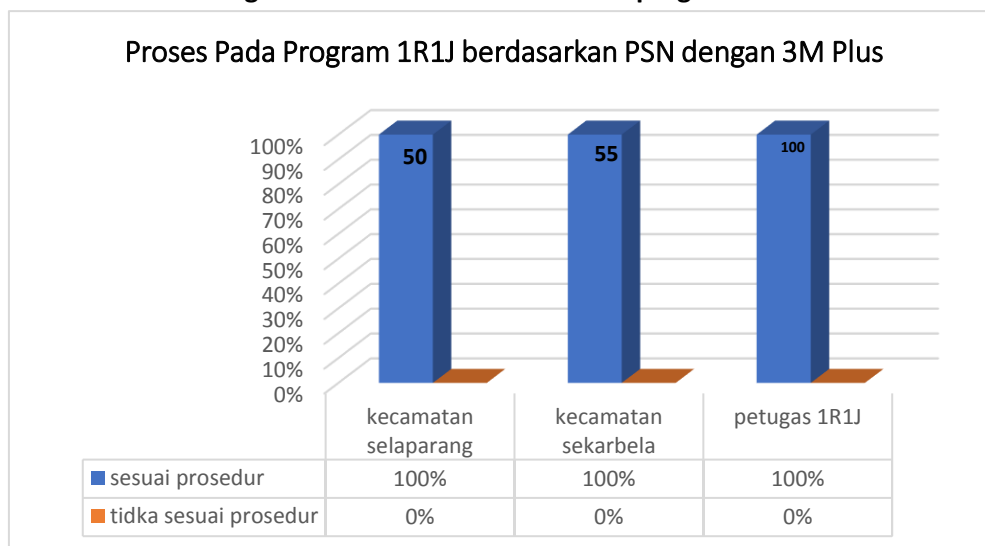
Aspek proses dari program 1R1J terdiri dari pelaksanaan, pengawasan, penilaian dan pelaporan program. Perencanaan program 1R1J dibuat oleh pencetus program yaitu Dinas Kesehatan Kabupaten Kota Mataram, yang lebih difokuskan pada seksi pemberantasan penyakit. Pelaksanaan program 1R1J terdiri dari pembentukan pokjnal DBD, sosialisasi penanggulangan DBD, PSN 3M Plus, dan pertemuan lintas sektor. Berdasarkan hasil penelitian didapatkan bahwa Pokjnal DBD didalam pelaksanaan program 1R1J sudah terbentuk namun peran pokjnal dalam kegiatan program PSN masih belum aktif.

**Diagram 8 Gambaran sosialisasi program 1R1J**



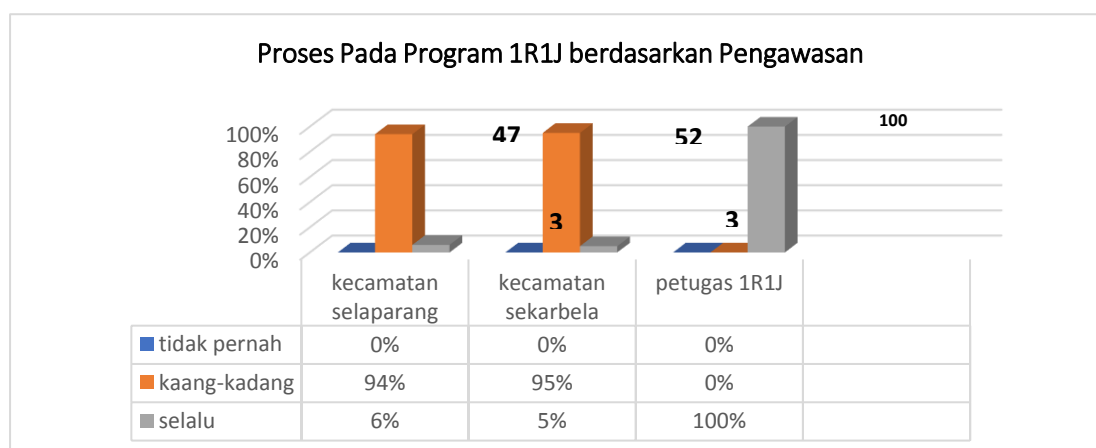
Sosialisasi/penyuluhan mengenai DBD yang dilakukan oleh petugas program 1R1J sebagian besar berjalan namun kegiatan sosialisasi tersebut tidak dilakukan secara terjadwal, dengan nilai skala rata-rata untuk distribusi ini yaitu sebanyak 2.18 termasuk kategori efektif pada kecamatan sekarbela dan skala rata-rata untuk distribusi sebanyak 2.20 untuk kategori efektif pada kecamatan selaparang.

**Diagram 9 Pelaksanaan PSN 3 Plus program 1R1J**



Berdasarkan diagram 9 dapat dilihat bahwa pelaksanaan 1R1J selanjutnya yaitu PSN dengan metode 3M plus. Kegiatan ini dilaksanakan sesuai dengan prosedur sebagaimana yang telah ditetapkan dalam buku petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis pemeriksaan jentik, dengan nilai skala rata-rata distribusi ini yaitu 2.00 termasuk kategori cukup efektif pada dua kecamatan kota mataram.

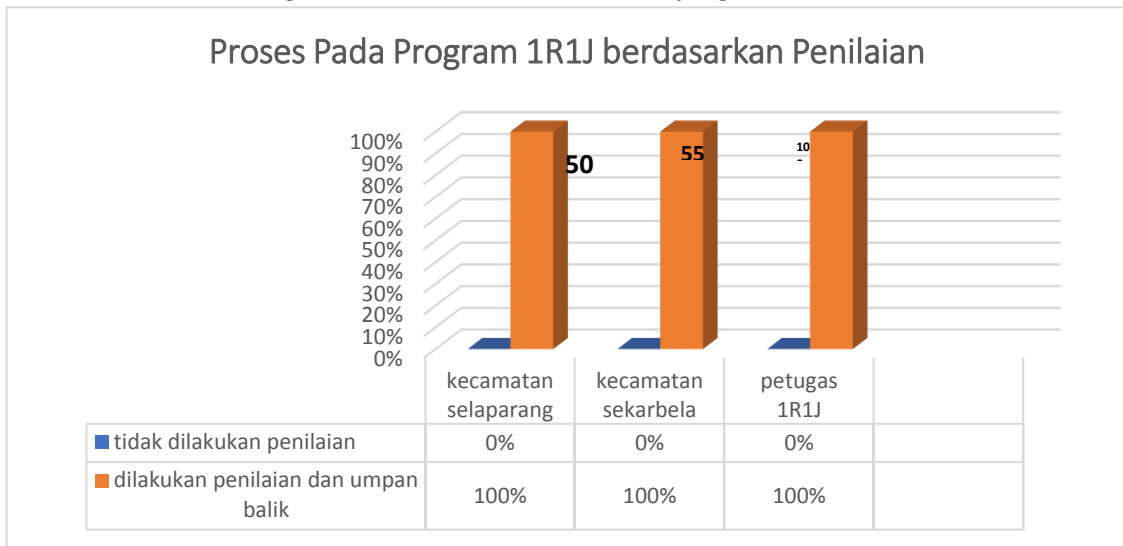
**Diagram 10 Pelaksanaan Pengawasan Program 1R1J**



Berdasarkan hasil penelitian didapatkan bahwa pengawasan yang dilakukan pada program 1R1J oleh petugas Dinas Kesehatan sebagian besar menjawab kadang-kadang sejumlah 52 (95%) oleh kader kecamatan Sekarbela dengan nilai skala rata-rata distribusi 2.05 termasuk kategori cukup efektif, sebanyak 47 (94%) oleh kader kecamatan selaparang dengan nilai skala rata-rata distribusi 2.06 kategori cukup efektif, akan tetapi petugas dinas kesehatan mengatakan bahwa kegiatan pengawasan program 1R1J selalu dilakukan sesuai jadwal

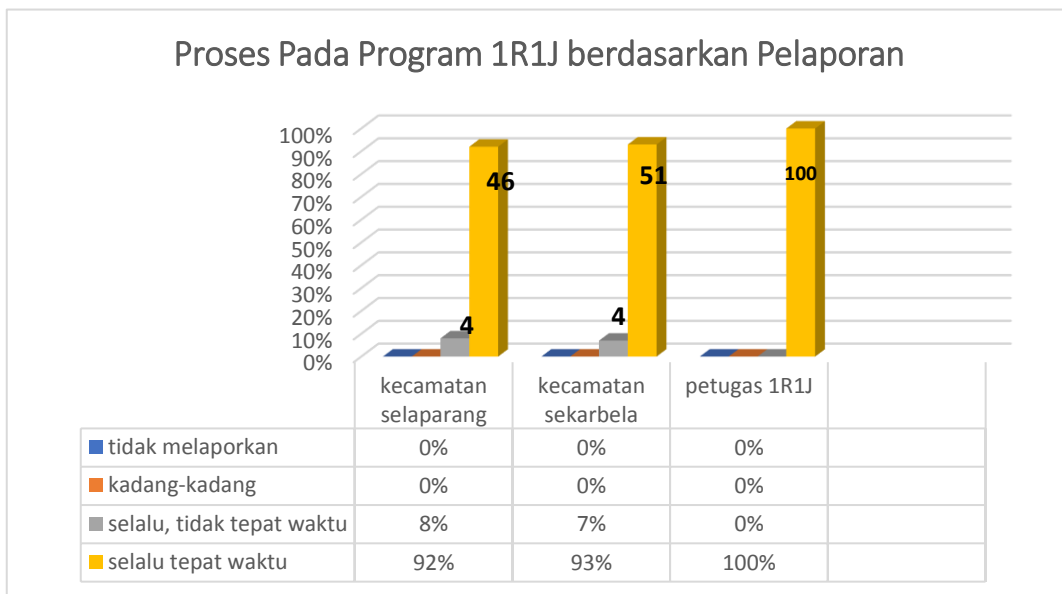
yang telah ditetapkan sebanyak 1 (100%).

**Diagram 11 Pelaksanaan Penilaian program 1R1J**



Berdasarkan hasil penelitian didapatkan bahwa pelaksanaan penilaian program 1R1J oleh puskesmas terhadap kader program 1R1J telah dilakukan evaluasi sesuai prosedur dan adanya umpan balik yang diberikan petugas puskesmas terhadap kader jumentik, dengan nilai skala rata-rata distribusi ini yaitu 2.00 termasuk kategori cukup efektif di dua kecamatan.

**Diagram 12 Pelaksanaan Pelaporan program 1R1J**

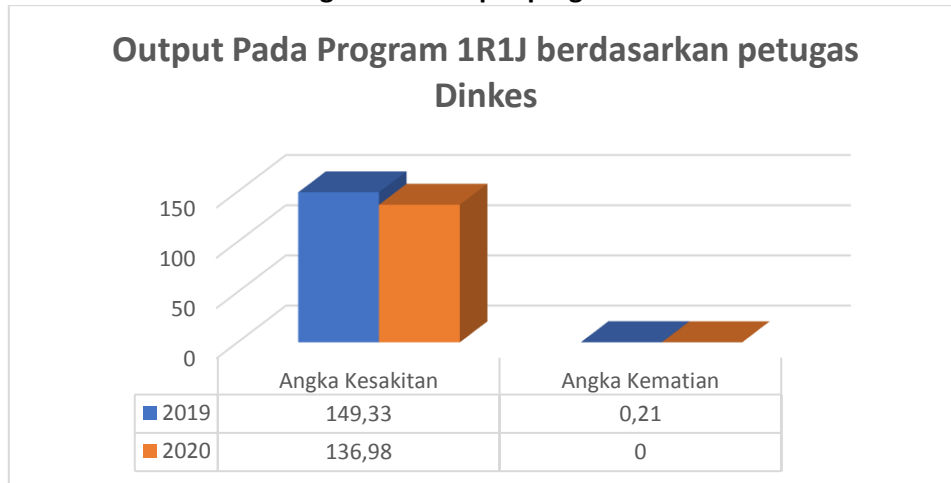


Berdasarkan hasil penelitian pelaporan program 1R1J oleh kader jumentik telah dilakukan secara rutin setiap bulan kepada puskesmas, dengan nilai skala rata-rata distribusi ini yaitu 2.93 termasuk kategori efektif di Kecamatan Sekarbela dan skala rata-rata distribusi lainnya adalah 2.92 termasuk kategori efektif di Kecamatan selaparang. Pelaporan juga dilakukan oleh petugas dinas kesehatan yang menjadi penanggung jawab atas program 1R1J bahwa setiap 3 bulan rutin menyampaikan rekapitulasi hasil PJB kepada Dinas Kesehatan Kota.

**c. Output**

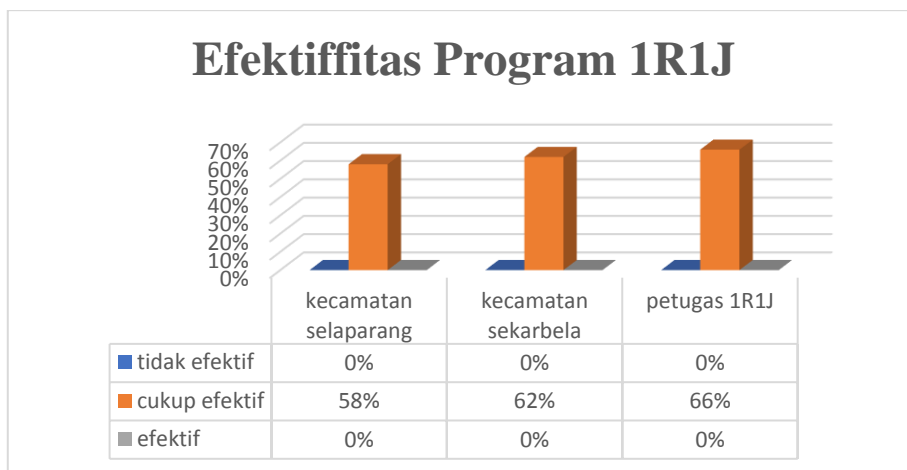
Output program 1R1J terdiri dari angka kasus kesakitan dan angka kematian akibat DBD di Kota Mataram.

**Diagram 13 Output program 1R1J**



Berdasarkan tabel diatas, angka bebas jentik meningkat dari tahun 2019-2020 pada dua kecamatan bahkan hampir memenuhi target 95%. Tingginya ABJ diiringi dengan menurunnya kasus DBD, kejadian angka kesakitan DBD pada tahun 2020 mengalami penurunan dari angka kejadian tahun sebelumnya dengan selisih 12,35, sedangkan pada angka kematian akibar DBD pada tahun 2020 telah mencapai target dengan total kematian 0 dari tahun sebelumnya.

**Diagram 14 Output program 1R1J**



Penilaian efektivitas program 1R1J berdasarkan aspek input, proses dan output pada kedua kecamatan masing-masing termasuk dalam kategori cukup efektif sebesar 62% di kecamatan sekarbela dan 58% dikecamatan selaparang. Sedangkan penilaian efektivitas pada petugas 1R1J Dinas Kesehatan sebesar 66% dalam kategori cukup efektif.

## 2. Efektifitas Pemanfaatan Program *Fogging*

Pemanfaatan fogging telah sesuai dengan ketentuan, namun masih ada yang tidak sesuai yaitu pada aspek persyaratan *fogging*, sehingga presentasi efektifitas program fogging sebesar 81% termasuk dalam kategori efektif, dikarenakan dari aspek persyarikat yang belum terpenuhi, serta sarana program yang masih 50% tersedia.

- **Program Fogging**

**a. Input**

**Tabel 1 Aspek SDM dalam program *Fogging***

<b>SDM</b>	<b>1 orang petugas <i>fogging</i></b>
Jenis kelamin	Laki-laki
Usia	>35 tahun
Pendidikan terakhir	Perguruan tinggi
<b>Sarana</b>	<b>Kualitas</b>
50% tersedia	50% baik 50% buruk

Berdasarkan tabel 1 sarana dalam pelaksanaan *fogging* terdapat 50% dari sarana yang harus ada. Sarana yang ada adalah alat yang dipakai *swing fog* SN 1 untuk bangunan dengan kondisi baik dan mesin ULV (*Ultra Low Volume*) untuk perumahan dengan kondisi buruk.

**b. Proses**

**Tabel 2 Distribusi Frekuensi Pelaksanaan *Fogging***

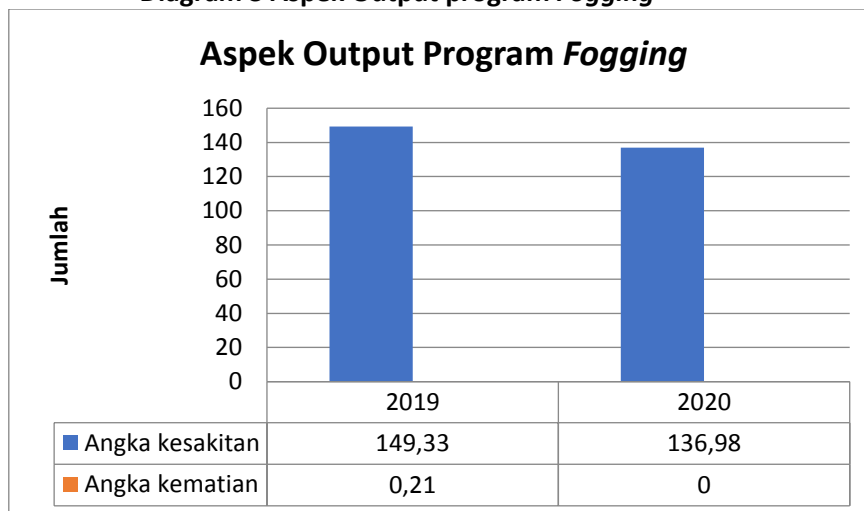
Pelaksanaan kegiatan	Jumlah ( $\Sigma$ )	(%)
Persyaratan Penggunaan Fogging		
Sesuai prosedur	1	100%
Tidak sesuai prosedur	0	0%
Pelaksanaan fogging		
Sesuai prosedur	1	100%
Tidak sesuai prosedur	0	0%
Hal yang dipertimbangkan dalam melakukan fogging		
Selalu	1	100%
Kadang-kadang	0	0%
Tidak pernah	0	0%
Pertemuan evaluasi		
Dilakukan sesuai jadwal	1	100%
Dilakukan tidak sesuai jadwal	0	0%

Berdasarkan hasil yang didapatkan dari table diatas, bahwa pelaksanaan kegiatan program fogging terlaksana dengan baik sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dengan presentasi sebesar 100%.

### c. Output

Output program *Fogging* terdiri dari angka kasus kesakitan dan angka kematian akibat DBD di Kota Mataram.

Diagram 3 Aspek Output program *Fogging*



Berdasarkan diagram 4.14 dapat dilihat bahwa pada tahun 2019 Angka kesakitan akibat DBD sejumlah 149,33 dan turun pada tahun 2020 menjadi 136,98. Sedangkan pada untuk angka kematian akibat DBD pada tahun 2019 sejumlah 0,21 dan tahun 2020 tidak ada kematian.

### H. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa penelitian yang berjudul “Kajian Efektivitas Program Satu Rumah Satu Jumentik Dan Pemanfaatan Fogging Dalam Rangka Mengurangi Penyebaran Demam Berdarah Guna Meningkatkan Kesehatan Masyarakat Kota Mataram”, meliputi ;

1. Evaluasi pelaksanaan program gerakan 1R1J di tingkat masyarakat meliputi aspek input, proses dan output dalam kategori efektif yaitu **80%** artinya program 1R1J1 *telah terlaksana dengan baik dan efektif* yaitu dengan menurunkan angka kematian akibat DBD pada tahun 2019 sejumlah 0,21 dan tahun 2020 tidak ada kematian, meskipun angka kesakitan akibat DBD mengalami penurunan dari tahun 2019 sebanyak 149,33 per 100.000 penduduk dan 2020 turun menjadi 136,98 per 100.000 penduduk, angka tersebut tetap menunjukkan tingginya angka kesakitan akibat DBD.
2. Evaluasi pelaksanaan *Fogging* dalam penanggulangan kasus Demam Berdarah meliputi aspek input, proses dan output yaitu sebanyak 80% pemanfaatan program fogging sudah sesuai dengan ketentuan. Artinya pelaksanaan fogging dapat dilaksanakan baik oleh pemerintah maupun dilaksanakan secara mandiri oleh masyarakat setelah kegiatan pencegahan PSN dilakukan, namun peningkatan angka DBD di suatu wilayah tetap naik karena jentik nyamuk sudah menjadi nyamuk dewasa dan berkembang biak dengan cepat dan meningkatnya jumlah kasus kesakitan DBD.

## I. Rekomendasi

1. Diperlukan program gerak bersama masyarakat melalui kebijakan atau peraturan pemerintah maupun SK walikota guna melakukan Gerakan Bersih Lingkungan secara bersama dan serentak.
2. Melakukan kampanye atau publikasi media secara terus menerus dan berkesinambungan sebagai bahan sosialisasi yang penting untuk melaksanakan upaya menggencarkan program kesehatan dalam penanggulangan DBD dengan memperkenalkan program 1R1J kepada masyarakat.
3. Melaksanakan bimbingan teknis dan evaluasi program 1R1J secara berkala kepada kader-kader kesehatan yang menjadi ujung tombak pemerintah dalam penanganan kasus DBD merupakan hal yang harus menjadi program prioritas sehingga program kerja dan penanganan pada daerah dengan kasus tinggi dapat ditingkatkan.
4. Pelaksanaan PSN Menjadi prioritas masyarakat dan pemerintah yang dilakukan berkala dan berkesinambungan.
5. Sebagai bentuk dukungan inovasi di bidang teknologi, Pemerinta Kota Mataram dapat mengembangkan aplikasi daring sebagai media dalam memberikan informasi dan pelaporan terhadap kasus DBD, yang dapat diakses langsung dari phone cell masing-masing orang langsung terpantau oleh pusat pelaporan di Dinas Kesehatan Kota Mataram sehingga lebih efektif dan efisien serta tertangani dengan cepat.

## DAFTAR PUSTAKA

Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Mataram, 2021, Laporan Akhir Kajian Efektivitas Program Satu Rumah Satu Jumantik Dan Pemanfaatan *Fogging* Dalam Rangka Mengurangi Penyebaran Demam Berdarah Guna Meningkatkan Kesehatan Masyarakat Kota Mataram. Mataram



# KETERSEDIAAN SUMBER DAYA AIR DALAM MENDUKUNG KEBUTUHAN AIR BERSIH MASYARAKAT KOTA MATARAM

## Abstrak

Tingkat pertumbuhan dan kepadatan penduduk yang tinggi tentunya dapat berimplikasi terhadap akses untuk memperoleh air bersih. Hal ini juga terjadi pada Kota Mataram dimana penambahan jumlah penduduk semakin meningkat setiap tahunnya. Ketersediaan dan pemanfaatan sumber daya air merupakan komponen yang harus mendapatkan perhatian baik dari pemerintah maupun masyarakat setempat agar keberlangsungannya tetap terjaga. Tujuan penelitian adalah untuk mengidentifikasi, menganalisis serta mengetahui potensi dan kebutuhan air bersih di Kota Mataram. Metode penelitian digunakan pendekatan kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan kebutuhan air bersih Kota Mataram dapat terpenuhi secara keseluruhan melalui air permukaan, sedangkan potensi sumber daya air tanah dapat memenuhi kebutuhan domestik dan non-domestik hingga 2040 mendatang. Sedangkan dari kualitas sumber daya air permukaan tidak masuk kategori kelas I, sedangkan sumber daya air berupa mata air masuk kategori Kelas I. Sehingga rekomendasi kedepan perlu dilakukan pengukuran debit dan kualitas air secara berkala di mata air yang berpotensi untuk dijadikan sumber daya air kelas I, selain itu Pemanfaatan air tanah perlu dilakukan secara hati-hati, terutama di daerah sekitar pesisir.

*Kata Kunci : Sumber Daya Air, Kebutuhan Air Masyarakat, Kota Mataram*

## A. Latar Belakang

Keberadaan air bagi manusia dan makhluk hidup lainnya merupakan hal yang mutlak dibutuhkan. Sehingga sumber daya air mempunyai peranan yang sangat penting dalam pemenuhan air baku, tidak hanya berdasarkan kuantitas saja tetapi juga berdasarkan kualitas. Masalah air telah mendapat perhatian yang tinggi baik pada skala lokal, nasional, regional dan global. Hal ini ditunjukkan dengan dimasukkannya masalah air ini dalam program tujuan pembangunan berkelanjutan dunia (*Sustainable Development Goal's/SDG'S*).

Air merupakan salah satu komponen lingkungan hidup yang sangat penting untuk perkembangan dan pertumbuhan tidak hanya bagi manusia, tetapi juga bagi makhluk hidup lainnya. Kebutuhan air di kota-kota besar, khususnya ibukota semakin hari semakin meningkat seiring bertambahnya jumlah penduduk. Ketersediaan dan pemanfaatan sumber daya air sebagai suplay penduduk merupakan komponen yang harus mendapatkan perhatian baik dari pemerintah maupun masyarakat setempat agar keberlangsungannya tetap terjaga. Hal ini terjadi juga pada Pemerintah Kota Mataram mengidentifikasi serta menganalisis ketersediaan Air bersih Kota Mataram dengan tujuan untuk mengurangi ketergantungan air bersih dari Pemerintah Kabupaten Lombok Barat. Sampai saat ini, suplai kebutuhan air bersih di Kota Mataram sebagian besar diambil dari mata air di

Kabupaten Lombok Barat, antara lain mata air Sarasuta, Ranget, Saraswaka, dan Sesaot Kecamatan Narmada yang didistribusikan melalui PT Air Minum Giri Menang.

## B. Permasalahan

Laju pertumbuhan penduduk yang positif menunjukkan kebutuhan akan air bersih akan meningkat setiap tahunnya. Tingkat pertumbuhan dan kepadatan penduduk yang tinggi tentunya dapat berimplikasi terhadap akses untuk memperoleh air bersih. Hal ini juga terjadi pada Kota Mataram dimana penambahan jumlah penduduk semakin meningkat setiap tahunnya. Tabel 1 dan Grafik 1 memperlihatkan peningkatan jumlah penduduk kota mataram dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir. Jika kebutuhan air untuk penduduk perkotaan adalah 120 L/hari/kapita (SNI 19-678.1-2002), maka kebutuhan air untuk penduduk Kota Mataram tahun 2020 adalah sebesar 51.558.120 L/hari. Tentunya jumlah tersebut akan semakin meningkat seiring bertambahnya penduduk. Hal ini menjadi masalah sekaligus tugas besa pemerintah Kota Mataram dalam memnuhi kebutuhan air bersih Kota Mataram.

Tabel 1. Jumlah penduduk Kota Mataram lima tahun terakhir

No	Kecamatan	2016	2017	2018	2019	2020
1	Ampenan	89.421	91.099	92.714	94.363	88.022
2	Sekarbela	67.431	69.989	72.571	75.254	58.786
3	Mataram	85.491	87.527	89.522	91.568	77.465
4	Selaparang	75.027	75.235	75.370	75.509	68.657
5	Cakranegara	67.395	67.791	68.119	68.455	67.826
6	Sandubaya	74.549	76.868	79.180	81.566	68.895
<b>Kota Mataram</b>		<b>459.314**</b>	<b>468.509**</b>	<b>477.476**</b>	<b>486.715**</b>	<b>429.651*</b>

Sumber: BPS Kota Mataram. \*Hasil Sensus Penduduk 2020 (September). \*\*Data dari Hasil Proyeksi Penduduk Indonesia 2010-2035.



Grafik 1 Jumlah Penduduk Kota Mataram Tahun 2016-2020.

Sampai saat ini, suplai kebutuhan air bersih di Kota Mataram Sebagian besar diambil dari mata air di Kabupaten Lombok Barat, antara lain mata air Sarasuta, Ranget, Saraswaka, dan

Sesaot Kecamatan Narmada yang didistribusikan melalui PT Air Minum Giri Menang. Rincian sumber mata air PT Air Minum Giri Menang.

### C. Tujuan

Tujuan umum dari kegiatan ini adalah mengetahui cadangan/ketersediaan air bersih di Kota Mataram, baik air permukaan (*surface water*) maupun air tanah (*ground water*). Disamping itu tercapainya sasaran melalui teridentifikasinya kondisi dan potensi sumber daya air di Kota Mataram.

### D. Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kuantitatif dalam melakukan analisis ketersediaan sumber daya air yang terdiri dari volume dan debit air. Tahap ini meliputi studi kepustakaan, persiapan Teknik survei, dan mobilisasi. Studi kepustakaan berdasarkan hasil penelitian, buku-buku, laporan, peta geologi, geomorfologi, peta hidrogeologi atau dokumen lain yang dapat memberikan gambaran umum mengenai keadaan daerah penelitian.

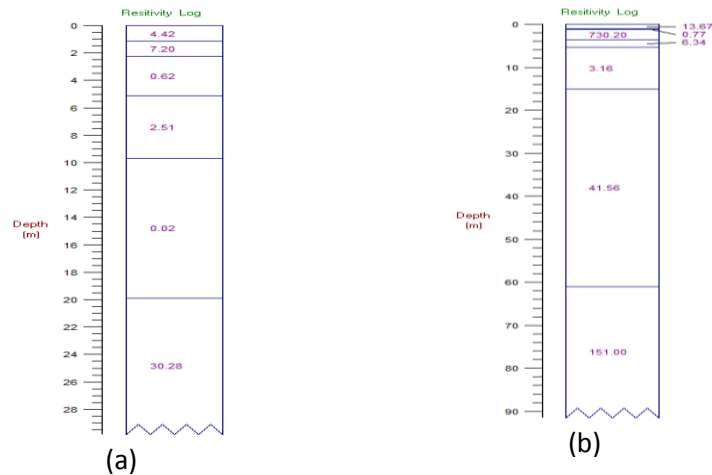
### E. Pokok – Pokok Hasil Analisa

#### Potensi Air Tanah Kota Mataram

Potensi air tanah Kota Mataram diperkirakan berdasarkan data hasil pengukuran geolistrik. Pemodelan 3D hasil pengukuran geolistrik memberikan informasi litologi bawah permukaan, kedalaman dan volume masing-masing lapisan, serta potensi lapisan yang dapat berperan sebagai lapisan akuifer. Selain itu, potensi debit air tanah juga ditentukan dari hasil pengukuran ini. Berikut disajikan hasil pengukuran geolistrik di setiap lokasi.

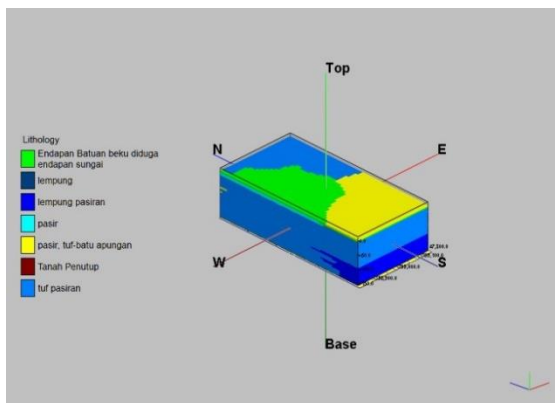
#### Hasil pengukuran geolistrik daerah Ampenan

Hasil pengukuran titik BNT-1 menunjukkan adanya lapisan yang terintrusi air laut. Jika lapisan batuan terintrusi air asin, maka respon nilai resistivitasnya akan menjadi kecil, biasanya kurang dari 3 Ohm.m. nilai resistivitas air laut yaitu 0.2 Ohm.m. (Telford, 1990). Intrusi air laut terjadi pada kedalaman 2-5 m dan 9.5-20 m dengan nilai resistivitas berturut 0.62 Ohm.m dan 0.02 Ohm.m. Pada titik pengukuran BNT-2 masih terlihat adanya intrusi di permukaan yaitu pada lapisan dengan nilai resistivitas 0.77 Ohm.m. Lapisan ini memang sangat tipis akan tetapi mengindikasikan adanya intrusi air laut hingga pada titik pengukuran ini. Oleh karena itu tidak disarankan eksploitasi air tanah dalam skala besar di wilayah ini. Hasil pengukuran titik BNT-1 dan BNT-2 disajikan dalam bentuk log resistivitas pada Gambar 1 sebagai berikut ;



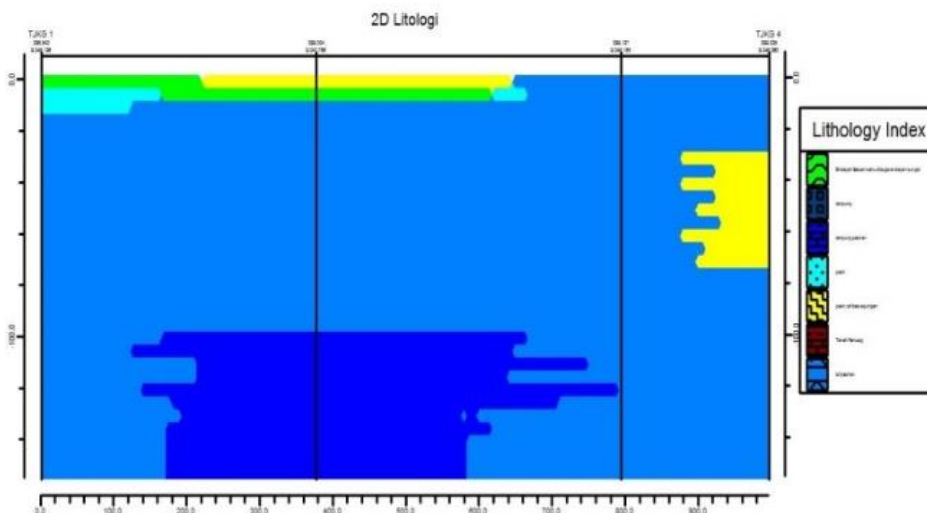
Gambar 1 Log Resistivitas titik pengukuran BNT-1 dan BNT-2.

### 1.1 Hasil pengukuran geolistrik daerah Sekarbela.

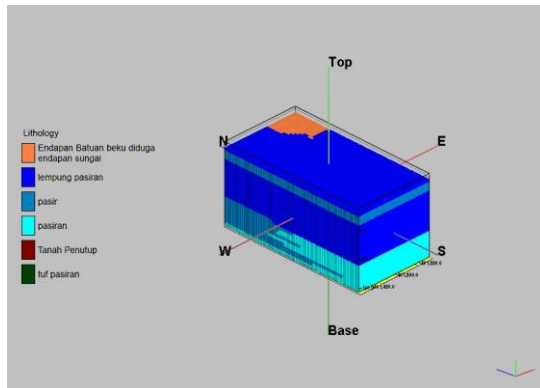


Hasil pengukuran geolistrik menunjukkan tidak ada intrusi air laut. Untuk mempermudah interpretasi, hasil pengukuran geolistrik kemudian dimodelkan ke dalam bentuk 3D dan penampang 2D.

Litologi bawah permukaan daerah pengukuran dikelompokkan menjadi 7 lapisan, yaitu: lapisan tanah penutup, endapan batuan beku, lempung, lempung pasiran, pasir, pasir tuf-batu apungan, dan tuf pasiran. Daerah ini didominasi oleh lapisan tuf pasiran, dimana lapisan ini diinterpretasikan sebagai lapisan akuifer dengan kualitas air baik. Lapisan ini berada pada kedalaman 19 – 122 m. sebaran litologi bawah permukaan lokasi pengukuran ini dapat dilihat pada Gambar 2 (diatas) dan Gambar 3 (Samping).



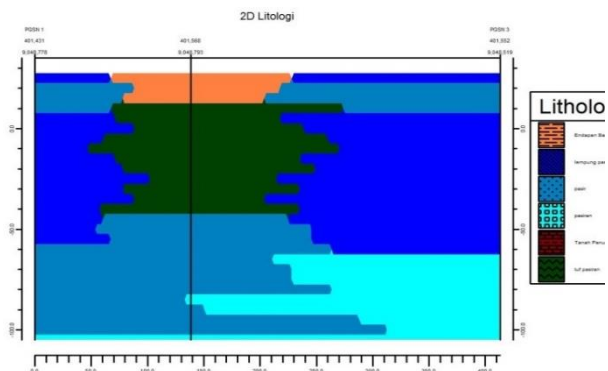
## 1.2 Hasil pengukuran geolistrik daerah Pagesangan



Hasil Pengukuran di daerah ini dilakukan sebanyak 3 titik. Interpretasi litologi bawah permukaan daerah pengukuran dapat dilihat pada Gambar 4 (disamping) dan Gambar 5 (disamping) litologi bawah permukaan terdiri dari lapisan tanah penutup, endapan batuan beku, lempung pasir, pasir, dan tuf pasir. Lapisan yang diinterpretasikan sebagai lapisan akuifer dengan kualitas air baik adalah lapisan pasir. Lapisan pasir berada pada kedalaman 9 –

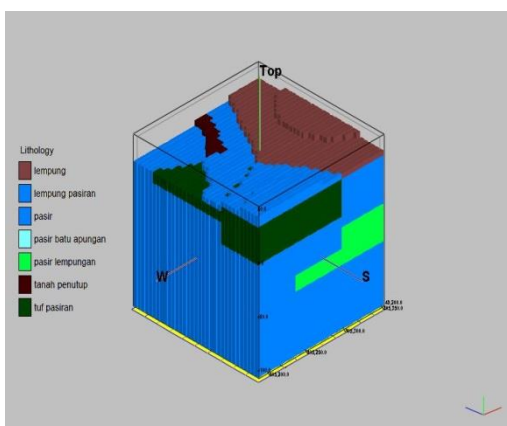
22 m (terletak di antara lapisan lempung pasir) dan kedalaman 88 – 136 m (terletak di bawah lapisan lempung pasir). Lapisan lempung pasir pada daerah ini cukup tebal, meskipun air tanah dapat diekstrak dari lapisan ini, akan tetapi kualitas airnya kurang baik. Selain itu, lapisan tuf pasir juga diduga sebagai lapisan akuifer, kedalaman.

Gambar disamping merupakan penampang 2D bawah permukaan pengukuran geolistrik (arah Timur – Barat) wilayah Pagesangan. Lapisan pasir, pasir tuf-batu apungan, dan tuf pasir diinterpretasikan sebagai lapisan akuifer.



## 1.3 Hasil pengukuran geolistrik daerah Babakan

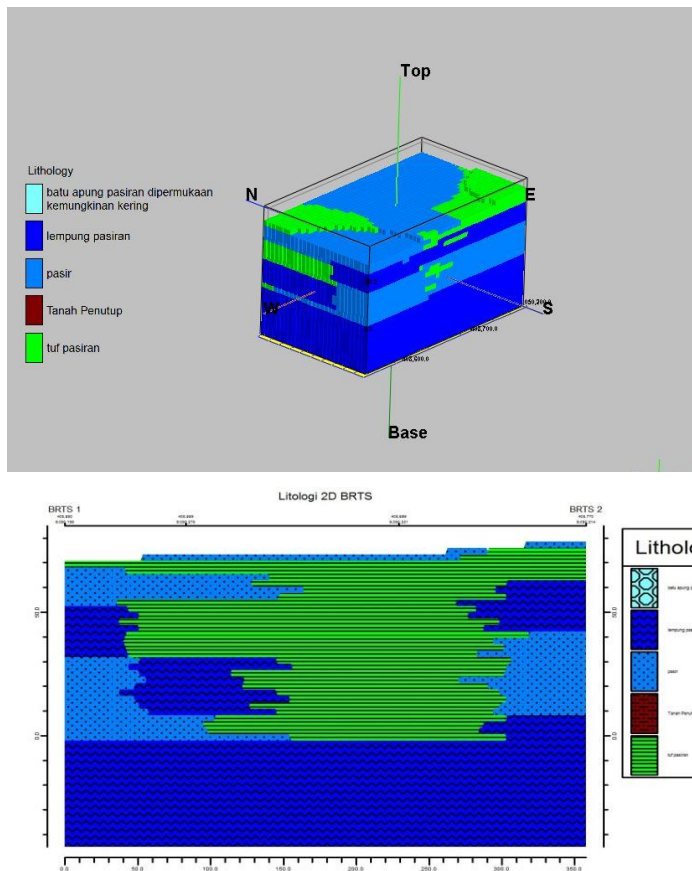
Pengukuran dilakukan sebanyak 4 titik, 2 titik diantaranya dilakukan di area pemukiman penduduk, dan 2 titik lainnya di areal persawahan. Interpretasi litologi bawah permukaan daerah pengukuran dapat dilihat pada Gambar 6 (dibawah).



Litologi daerah pengukuran terdiri dari lapisan tanah penutup, lempung, lempung pasir, pasir, pasir batu-apungan, pasir lempungan dan tuf pasir. Litologi batuan di daerah ini didominasi oleh lapisan lempung pasir, sehingga kualitas air tanah relative rendah. Hasil pengukuran terdapat lapisan pasir dan tuf pasir yang diinterpretasikan sebagai lapisan akuifer yang terletak di antara lapisan lempung pasir. Ketebalan lapisan akuifer bervariasi antara 30 – 70 m dengan kedalaman bervariasi antara 17 – 80 m.

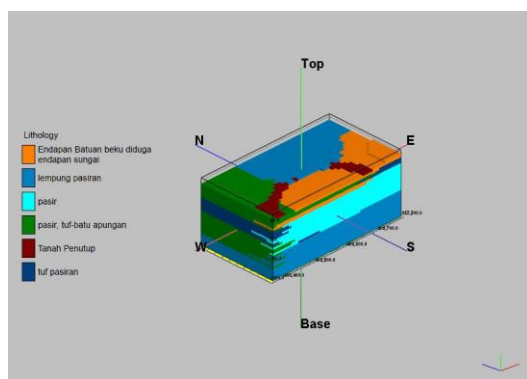
Kedalaman lebih dari 80 m merupakan lapisan lempung pasir.

### 1.5 Hasil pengukuran geolistrik daerah Bertais



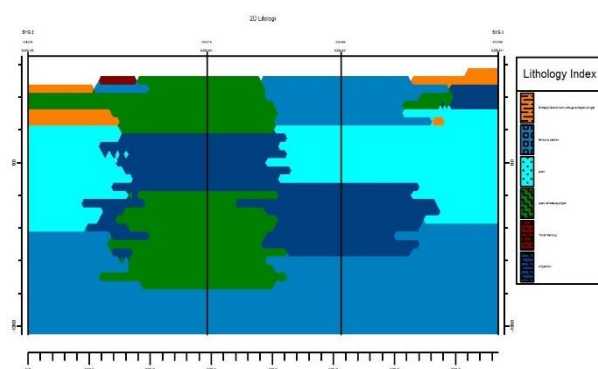
Pengukuran dilakukan sebanyak 4 titik di areal persawahan berbatasan dengan kabupaten Lombok Barat. Interpretasi litologi bawah permukaan daerah pengukuran dapat dilihat pada Gambar 7 (disamping) dan Gambar 8 (dibawah). Lapisan pasir dan tuf pasir diinterpretasikan sebagai lapisan akuifer. Lapisan ini terletak di dekat permukaan pada kedalaman 3 – 80 m diselingi oleh lapisan lempung pasir pada kedalaman 19 – 40 m di beberapa tempat. Kedalaman lebih dari 80 m merupakan lapisan lempung pasir. Kondisi ini hampir mirip dengan kondisi bawah permukaan di daerah Babakan.

### 1.4 Hasil pengukuran geolistrik daerah Sayang-Sayang



Pengukuran dilakukan sebanyak 4 titik di area persawahan yang berbatasan dengan Kabupaten Lombok Barat. Interpretasi litologi bawah permukaan daerah pengukuran dapat dilihat pada Gambar 9 (disamping) dan Gambar 10 (dibawah). Litologi batuan daerah ini terdiri dari tanah penutup, endapan batuan beku/breksi, lempung pasir, pasir, pasir tuf-batu apungan, dan tuf pasir.

pasir tuf-batu apungan dan tuf pasir diinterpretasikan sebagai lapisan akuifer yang tersebar di seluruh lokasi terletak dekat permukaan pada kedalaman bervariasi antara 2 – 132 m. Kedalaman 90 – 142 m didominasi oleh lapisan lempung pasir. Lapisan lempung pasir juga berada pada kedalaman 8 – 36 m di bagian utara area pengukuran.



## 2. Ketersediaan Air Tanah Kota Mataram

Cadangan air tanah Kota Mataram dari hasil perhitungan yaitu sebesar **2.232.781.250 m<sup>3</sup>**.

**Tabel 2. Perhitungan Cadangan Air Tanah Kota Mataram.**

No	Jenis Lapisan	Volume Lapisan (V <sub>ak</sub> ) (m <sup>3</sup> )	Porositas efektif (S) (%)	Cadangan air tanah (m <sup>3</sup> )
1	Endapan batuan beku, batu apung pasir	885.000.000	20	177.000.000
2	Lempung pasir	6.933.125.000	10	693.312.500
3	Pasir	2.493.125.000	25	623.281.250
4	Pasir lempungan	383.750.000	20	76.750.000
5	Pasir tuf-batu apungan	943.125.000	20	188.625.000
6	Tuf pasir	4.738.125.000	10	473.812.500
<b>Volume Total</b>				<b>2.232.781.250</b>

Sumber: Analisa data, 2021

## 3. POTENSI AIR PERMUKAAN

Sumber air permukaan utama di Kota Mataram berupa Sungai dan mata air. Sungai yang melintasi Wilayah Kota Mataram yaitu Sungai Midang, Sungai Brenyok, Sungai Jangkuk dan Sungai Unus (RTRW Kota Mataram), berikut rincian lebih jelasnya tabel 3;

Table 3 Nama Sungai yang melintasi Wilayah Kota Mataram

No	Wilayah Sungai	DAS	Nama Sungai	Panjang (Km)	Luas (Ha)
1	WS Lombok Sub WS Dodokan	DAS Jangkuk	Jangkuk	9,65	1.671,42
		DAS Ancar	Ancar	17,64	667,78
		DAS Unus	Unus-Brenyok	34,02	3.123,89
		DAS Midang	Midang	10,10	546,81

Potensi/cadangan air sungai dapat dihitung jika debit sungai diketahui. Pada penelitian ini, potensi air sungai diambil dari data RISPAM Pulau Lombok. Pemanfaatan sumber air sungai dan neraca air dapat dilihat pada tabel 5 berikut ;

Tabel 4 Pemanfaatan sumber air sungai dan neraca air

No	Uraian	Nama DAS			
		DAS Jangkuk	DAS Brenyok	DAS Ancar	DAS Midang
1	Kode DAS	178	176	177	179
2	Luas DAS (km <sup>2</sup> )	167.917	25.542	22.739	33.069
3	Potensi air andalan (juta m <sup>3</sup> /tahun)	100.216	14.084	16.364	17.901
4	Status Utilitas	Utilitas Tinggi	Utilitas Tinggi	Utilitas Tinggi	Utilitas Tinggi
5	RKI	10.581	5.984	3.308	1.577
6	Kebutuhan air (juta m <sup>3</sup> /tahun):				
	- Pertanian	81.310	14.130	7.410	

	- Peternakan	0,294	0,084	0,166	0,121
	- Perikanan	3.226	0,217	3.064	0,502
	- Lain-lain	2.116	1.197	0,662	11.881
7	Kebutuhan air total (juta m <sup>3</sup> /tahun)	97.529	21.616	14.610	11.881
8	Selisih (juta m <sup>3</sup> /tahun)	2.687	7.632	1.751	6.020

Sedangkan mata air yang terdata di Kota Mataram sebanyak 20 mata air (DLH Kota Mataram, 2020). Belum terdapat informasi terkait debit mata air yang berada di wilayah Kota Mataram, sehingga tidak dimasukkan dalam perhitungan neraca air pada penelitian ini. Air dari mata air di wilayah Kota Mataram saat ini sebagian besar digunakan untuk keperluan mandi dan mencuci. Secara kualitas air, terdapat beberapa mata air yang memenuhi standar Bakumutu Air Kelas I baik secara Fisik, Kimia, maupun Biologi. Mata air tersebut yaitu: mata air Lingkok Mas (Sayang-sayang), Mata air Babakan (Turide), Mata Air Taker Direk (Dasan Cermen), mata air Sekarbela, dan mata air Pengempokan (Timrah, Pagesangan Barat).

#### 4. Neraca Sumber Daya Air Kota Mataram

Proses penyusunan neraca sumber daya air dilakukan dengan cara inventarisasi potensi air baik air permukaan dan air bawah tanah kemudian dikurangi dengan jumlah volume penggunaannya. Ketersediaan air permukaan dan air tanah dapat dilihat pada Tabel 5.2, sedangkan perhitungan proyeksi kebutuhan air disajikan pada Tabel 5.3.

Tabel. 6 Ketersediaan Sumber Daya Air Kota Mataram

No	Sumber Daya Air	Ketersediaan (m <sup>3</sup> )
1	Air tanah*	2.232.781.250
2	Air Permukaan**	
	- DAS Jangkok	100.216.000.000
	- DAS Unus-Brenyok	14.084.000.000
	- DAS Ancar	16.364.000.000
	- DAS Midang	17.901.000.000
	<b>Total</b>	<b>150.797.781.250</b>

Sumber: \*Analisa data, 2021; \*\*RISPAM Pulau Lombok

Analisa neraca sumber daya air menunjukkan bahwa, ketersediaan air jauh lebih besar dibandingkan dengan kebutuhan air per tahun. Ketersediaan air yang besar ini dikarenakan volume air sungai yang sangat besar sehingga mampu menutupi semua kebutuhan air masyarakat Kota Mataram. Akan tetapi ketersediaan air sungai tersebut hanya dapat memenuhi kebutuhan air Kelas II. Jika melihat kebutuhan air domestik dan non domestik untuk pemenuhan air kelas I, kebutuhan tersebut dapat terpenuhi oleh ketersediaan air tanah.



## F. KESIMPULAN

Kesimpulan dari hasil penelitian ketersediaan sumber daya air dalam mendukung kebutuhan air bersih masyarakat Kota Mataram ini adalah sebagai berikut ;

1. Kebutuhan air bersih masyarakat Kota Mataram untuk kebutuhan domestik, non-domestik, pertanian, peternakan, perikanan, dan lain-lain dapat terpenuhi dari sumber daya air berupa air permukaan (Sungai Jangkok, sungai Unus-Brenyok, Sungai Ancar, dan Sungai Midang) dan sumber daya air tanah.
2. Potensi sumber daya air tanah di Kota Mataram cukup besar untuk memenuhi kebutuhan domestik dan kebutuhan non-domestik masyarakat kota Mataram hingga tahun 2040.
3. Kualitas sumber daya air permukaan berupa sungai tidak dapat digunakan sebagai sumber daya air Kelas I dikarenakan nilai uji parameter biologi yang jauh melebihi ambang batas.
4. Kualitas sumber daya air permukaan berupa Mata Air, terdapat beberapa mata air yang dapat dijadikan sebagai sumber daya air Kelas I, yaitu: mata air Lingkok Mas (Sayang-sayang), Mata air Babakan (Turide), Mata Air Taker Direk (Dasan Cermen), mata air Sekarbela, dan mata air Pengempokan (Timrah, Pagesangan Barat).

## G. REKOMENDASI

1. Perlu dilakukan pengukuran debit dan kualitas air secara berkala di mata air yang berpotensi untuk dijadikan sumber daya air kelas I.
2. Potensi sumber daya air sungai sangat besar, sehingga perlu dilakukan pengolahan air lebih lanjut agar dapat digunakan sebagai sumber daya air kelas I.
3. Pemanfaatan air tanah perlu dilakukan secara hati-hati, terutama di daerah sekitar pesisir. Untuk itu perlu dilakukan kajian lebih lanjut mengenai cadangan air tanah karena pada kajian ini cadangan air tanah hanya sampai kedalaman 140 m. selain itu kajian terkait teknis dan dampak pemanfaatan air tanah untuk kebutuhan air bersih masyarakat Kota Mataram.

## DAFTAR PUSTAKA

Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Mataram, 2021, Laporan Akhir Kajian Ketersediaan Sumber Daya Air Dalam Mendukung Kebutuhan Air Bersih Masyarakat Kota Mataram. Mataram

# IDENTIFIKASI SARANA DAN PRASARANA KEBAKARAN PADA WILAYAH PADAT PENDUDUK DI KOTA MATARAM

## Abstrak

Kedepan kepadatan penduduk Kota Mataram akan terus meningkat seiring dengan pertumbuhan naiknya laju pertumbuhan penduduk. Sehingga tingkat resiko kebakaran kedepan juga bakal bertambah seiring dengan padatnya penduduk. Di satu sisi, kepadatan penduduk wilayah perkotaan terus mengalami peningkatan setiap tahun, tetapi di sisi lain tidak diimbangi dengan prasarana dan sarana penanganan pemadam kebakaran yang memadai. Tujuan penelitian teridentifikasi data sarana dan prasarana penanganan kebakaran di Kota Mataram di wilayah permukiman padat penduduk. Hasil penelitian Sebagian besar penduduk (41 persen) kategori sedang, sebesar 26 persen tinggal kategori tinggi, sebesar 21 persen kategori rendah, dan lainnya 12 persen tinggal kategori sangat tinggi dengan Tingkat resiko kebakaran di Kota Mataram Sebagian besar penduduk (45 persen) tinggal wilayah kategori sedang; 27 persen tinggal dalam wilayah dengan kategori tinggi, 17 persen tinggal dalam wilayah kategori rendah; sedangkan 11 persen tinggal pada wilayah dengan kategori sangat tinggi. Sarana dan prasarana penanganan kebakaran yang ada di Kota Mataram meliputi APAR kebutuhan ideal sebesar 17,23 persen, hidran/tandon air sebesar 2,23 persen, personil pemadam kebakaran 14,71 persen, mobil pemadam sebesar 20,41 persen, pos pemadam kebakaran sebesar 11,76 persen. Hasil kondisi tersebut dalam rekomendasi yang perlu dilakukan adalah pelatihan pengoperasionalan APAR, pemeriksaan dan pemeliharaan paling sedikit 2 (dua) kali ; pengadaan APAR dilakukan dalam 5 tahun sekali,

Kata Kunci : Sarana dan Prasaranan, Kebakaran, Padat Penduduk

## A. LATAR BELAKANG

Masalah kebakaran merupakan suatu bencana atau musibah yang mengancam kehidupan manusia karena kehadirannya tidak pernah diduga, kapan dan dimana akan terjadi dan siapa saja yang akan menjadi korban. Untuk itu semua pihak harus melakukan upaya mengantisipasi dalam arti mencegah untuk tidak terjadi ataupun meluasnya kebakaran sedini mungkin. Umumnya, semakin tinggi kepadatan penduduk suatu kota semakin sering kebakaran terjadi (NFPA, 2018; Rijanto, 2018).

Jumlah kebakaran di Kota Mataram sebanyak 41 kasus baik pada tahun 2016 maupun 2017 kemudian meningkat menjadi 90 kasus pada tahun 2018. Jumlah kasus kebakaran yang terjadi pada tahun 2019 dan 2020 masing-masing sebanyak 50 dan 42 kasus. Semua kecamatan (6 kecamatan) di Kota Mataram pernah mengalami kebakaran. Pada tahun 2016 dan 2017 dimana kasus kebakaran terbanyak terjadi di Kecamatan Sandubaya yakni

sebanyak 13 kasus; sedangkan kasus kebakaran paling sedikit terjadi di Kecamatan Sekarbela. Pada tahun 2018 kasus kebakaran terbanyak terjadi di Kecamatan Cakranegara yakni sebanyak 23 kasus dan paling sedikit di Kecamatan Sekarbela yakni sebanyak 8 kasus. Dalam pada itu, pada tahun 2019 dimana kasus kebakaran terbanyak terjadi di Kecamatan Selaparang dan Cakranegara masing-masing sebanyak 11 kasus dan paling sedikit di Kecamatan Ampenan yaitu sebanyak 4 kasus. Pada tahun 2020 kasus kebakaran terbanyak terjadi di Kecamatan Mataram yakni sebanyak 10 kasus dan paling sedikit di Kecamatan Sandubaya yaitu sebanyak 4 kasus. Oleh karenanya dengan jumlah kasus tersebut menjadi ukuran dari sarpras damkar yang dapat menekan tinggi angka kasus tersebut diatas.

## B. PERMASALAHAN

Berdasarkan data BPS Kota Mataram (2020) bahwa kepadatan penduduk Kota Mataram mengalami peningkatan dari 7.789 jiwa/Km<sup>2</sup> pada tahun 2018 menjadi 7.940 jiwa/Km<sup>2</sup> pada tahun 2019 dan 8.086 jiwa/Km<sup>2</sup> pada tahun 2020. kepadatan penduduk Kota Mataram akan terus meningkat seiring dengan pertumbuhan naiknya laju pertumbuhan penduduk. Sehingga tingkat resiko kebakaran kedepan juga bakal bertambah seiring dengan padatnya penduduk (NFPA, 2018; Furnes & Mucket, 2017). Di satu sisi, kepadatan penduduk wilayah perkotaan terus mengalami peningkatan setiap tahun, tetapi di sisi lain tidak diimbangi dengan prasarana dan sarana penanganan pemadam kebakaran yang memadai. Pelayanan pemadam kebakaran dibangun dengan merujuk pada konsep Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) dimana WMK merupakan sistem penanganan kebakaran pada wilayah padat penduduk di perkotaan yang dirancang guna mendukung tercapainya sistem penanggulangan kebakaran yang efektif yang ditentukan melalui waktu tanggap (response-time) dan bobot serangan (weight of attack) (NFPA, 2018).

## C. TUJUAN

Tujuan dari kegiatan ini adalah teridentifikasi data sarana dan prasarana penanganan kebakaran di Kota Mataram guna memberikan gambaran pelayanan penanggulangan kebakaran khususnya di wilayah permukiman padat penduduk.

## D. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini digunakan metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif dan kualitatif (Neuman L., 2018). Dalam pada itu, kegiatan penelitian ini meliputi penelitian kepustakaan (library research) dan penelitian lapangan (field research) untuk survei pengumpulan data melalui observasi, wawancara, diskusi kelompok terarah (Focus Group Discussion).

## E. POKOK – POKOK HASIL ANALISA

### 1. Wilayah Padat Penduduk

Hasil analisis data sebaran kawasan padat penduduk pada 6 (enam) kecamatan di Kota Mataram ditampilkan pada tabel 1 sebagai berikut ;

Tabel 1 Kawasan Padat Penduduk di Kota Mataram

No	Kecamatan	Kepadatan Penduduk dan Jumlah responden (n)			
		Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi
1.	Ampenan	3	7	4	2
2.	Sekarbela	5	10	6	3
3.	Mataram	4	6	5	2
4.	Selaparang	2	4	2	1
5.	Cakranegara	2	5	3	2
6.	Sandubaya	5	9	6	2
	<b>Total</b>	<b>21</b>	<b>41</b>	<b>26</b>	<b>12</b>

Sumber : Data primer (diolah)

Berdasarkan tabel 1 dimana sebagian besar responden yakni sebanyak 41 orang (41 persen) tinggal di wilayah padat penduduk dengan kategori sedang, sebanyak 26 orang (26 persen) tinggal di wilayah padat penduduk dengan kategori tinggi, sebanyak 21 orang (21 persen) di wilayah kategori rendah, dan lainnya sebanyak 12 orang (12 persen) tinggal di wilayah kategori sangat tinggi.

## 2. Tingkat Risiko Kebakaran

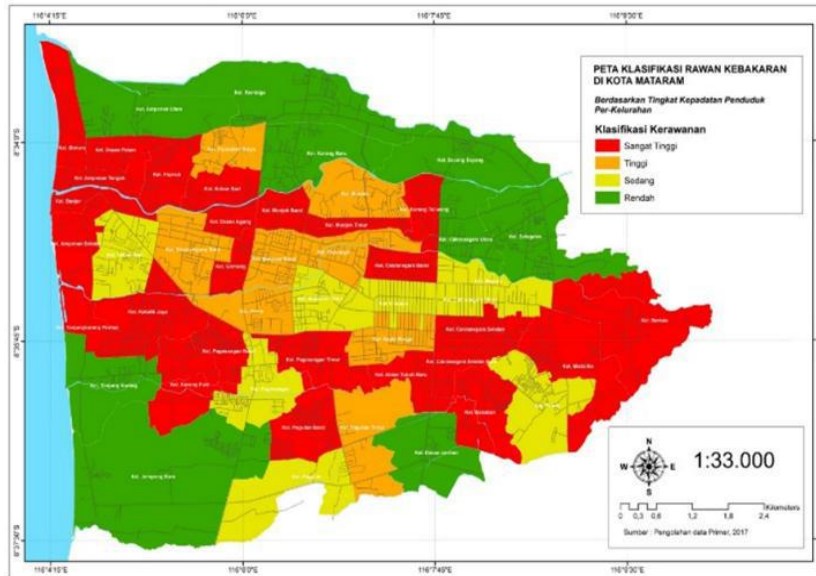
Tingkat resiko terjadinya kebakaran di Kota mataram diantaranya sebagai berikut ;

Tabel 2 Tingkat Resiko Kebaran di Kota Mataram

No	Kecamatan	Tingkat Risiko Kebakaran dan Jumlah responden (n)			
		Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi
1.	Ampenan	3	6	5	2
2.	Sekarbela	4	11	5	4
3.	Mataram	4	7	4	2
4.	Selaparang	1	5	2	1
5.	Cakranegara	1	6	4	1
6.	Sandubaya	4	10	7	1
	<b>Total</b>	<b>17</b>	<b>45</b>	<b>27</b>	<b>11</b>

Sumber : Data primer (diolah)

Berdasarkan tabel 2 diatas dimana sebagian besar responden yakni sebanyak 45 orang (45 persen) tinggal dalam wilayah yang tergolong dalam kategori tingkat risiko kebakaran sedang kemudian sebanyak 27 orang (27 persen) tinggal dalam wilayah dengan kategori tingkat risiko kebakaran tinggi dan lainnya sebanyak 17 orang (17 persen) tinggal dalam wilayah dengan kategori tingkat risiko kebakaran rendah; sedangkan sebanyak 11 orang (11 persen) tinggal pada wilayah dengan kategori tingkat risiko kebakaran sangat tinggi. Disisi lain, sebaran tingkat risiko kebakaran ditampilkan pada gambar 1 berikut ;



Gambar 1 Peta Sebaran Tingkat Risiko Kebakaran

### 3. Analisis Regresi: Kepadatan Penduduk dan Tingkat Risiko Kebakaran

Dari tabel 3 diperoleh nilai koefisien determinasi (*Adjusted R Square*) sebesar 0,697 artinya kontribusi variabel bebas X yakni kepadatan penduduk terhadap variabel terikat Y yakni tingkat risiko kebakaran sebesar 69,70 persen; sedangkan lainnya sebesar 30,30 persen ditentukan oleh faktor-faktor lain diluar variabel X (kepadatan penduduk). Disisi lain, hasil analisis regresi sebagaimana ditampilkan pada tabel 3 harus memenuhi asumsi klasik yaitu uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi.

Tabel 3 Hasil Analisis Regresi

Variabel	<i>Unstandardized Coefficients</i> ( $\beta$ )	t hitung	Sig.	Ket.
<i>Constant</i>	0,361			
Kepadatan penduduk (X)	0,683	2,202	0,003	Sig.
R	= 0,857			
<i>R Square</i>	= 0,734			
<i>Adjusted R Square</i>	= 0,697			
F hitung	= 21,645			
Sig.F	= 0,001			
Signifikansi ( $\alpha$ )	= 0,05			

Berdasarkan uji normalitas diperoleh nilai Kolmogorov-Smirnov untuk dua variabel yakni sebesar 0,642 untuk variabel bebas X (kepadatan penduduk) dan sebesar 0,489 untuk variabel terikat Y (tingkat risiko kebakaran). Ini berarti bahwa nilai Kolmogorov-Smirnov untuk kedua variabel tersebut lebih dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa data kedua variabel tersebut berdistribusi normal. Berdasarkan uji multikolinearitas diperoleh nilai Variance Inflation Factor (VIF) untuk variabel bebas X (kepadatan penduduk) sebesar 6,189 atau kurang dari 10 ( $VIF < 10$ ), sehingga dengan demikian dapat disimpulkan tidak terjadi multikolinearitas.

Berkaitan dengan heteroskedastisitas dengan uji Glejser untuk variabel bebas X (kepadatan penduduk) diperoleh nilai t hitung sebesar 1,721 dengan taraf signifikansi 0,176 ( $0,176 > 0,05$ ) dimana taraf signifikansi yang diperoleh lebih dari 0,05 sehingga dengan demikian tidak terjadi heteroskedastisitas. Dalam pada itu, berdasarkan uji autokorelasi diperoleh nilai Durbin-Watson sebesar 1,974 dimana nilai ini terletak pada kisaran -2 dan 2 atau ( $-2 < 1,974 < 2$ ) sehingga dengan demikian tidak terjadi autokorelasi.

#### 4. Sarana dan Prasarana

##### a. Alat Pemadam Kebakaran Ringan (APAR)

Di Kota Mataram terdapat 31.439 rumah tangga, sehingga kebutuhan ideal APAR mencapai 1.886,34 unit atau dibulatkan menjadi 1.886 unit. Sedangkan APAR yang tersedia saat ini (*existing*) sebanyak 325 unit. Ini menggambarkan bahwa tingkat capaian APAR terhadap kebutuhan ideal APAR baru mencapai 17,23 persen. Berdasarkan hasil *check-list* pada waktu observasi lapangan diperoleh lebih dari separuh APAR yang ada yakni sebanyak 184 (56,61 persen) dalam kondisi kurang baik yakni isi tabung kosong, diletakkan dilantai, dan tidak terawat; sedangkan lainnya sebanyak 141 (43,39 persen) dalam kondisi baik. Sebagian besar responden sampel yakni sebanyak 75 orang (75 persen) menyatakan tidak bisa mengoperasikan APAR dan lainnya 25 orang (25 persen) bisa mengoperasikan APAR.

##### b. Hidran/Tandon Air

Kebutuhan ideal hidran tergantung pada kelas bangunan meliputi bangunan Kelas A, B, C, dan D. Bangunan Kelas A yakni bangunan yang komponen utamanya harus tahan terhadap api sekurang-kurangnya 3 jam (hotel, pertokoan, pasar, perkantoran, rumah sakit dan perawatan, bangunan industri, tempat hiburan, museum), Kelas B yakni bangunan yang komponen utamanya harus tahan terhadap api sekurang-kurangnya 2 jam (perumahan bertingkat, asrama, sekolah, tempat ibadah), Kelas C yakni bangunan yang komponen utamanya harus tahan terhadap api sekurang-kurangnya 1/2 jam (gedung/perumahan tak bertingkat, dan bangunan sederhana), Kelas D yakni bangunan yang tidak termasuk dalam Kelas A, B, dan C (industri nuklir, bangunan yang digunakan sebagai tempat penyimpanan, bahan-bahan mudah meledak).

Tabel 4 Jumlah Alat Hidran dan Tandon Air di Kota Mataram

No	Nama Alat	Lokasi	Kondisi Alat
1.	Hidran	Kelurahan Pagutan Tengah	Alat tertanam perlu digali dan perbaikan
2.	Hidran	Depan Pasar Pagutan	Rusak
3.	Hidran	Dasan Cermen	Normal
4.	Tandon Air Milik Provinsi	Belakang Lurah Dasan Cermen	Perbaikan pipa pembuangan tandon
5.	Tandon Air Milik Damkar	Kecamatan Sandubaya	Mesi Air Hilang
6.	Hidran	Perempatan Sweta	Normal
7.	Tandon Air Milik Damkar	Kecamatan Sekarbela	Mesin Air Hilang
8.	Hidran	Karang Taliwang	Rusak

No	Nama Alat	Lokasi	Kondisi Alat
9.	Hidran	Samping Taman Sangkareang	Normal
10.	Hidran	Depan Pendopo	Rusak
11.	Hidran	Kampung Jawa	Rusak
12.	Hidran	Depan MGM Cakranegara	Rusak
13.	Hidran	Jl.Langko	Debit Air Kecil
14.	Hidran	Psr Dasan Agung	Rusak

Sumber : Dinas Pemadam Kebakaran Kota Mataram

Berdasarkan hasil analisis data dari 100 responden sampel diperoleh total luas lantai sebesar 1.125,3 m<sup>2</sup>. Dengan demikian, maka total kebutuhan ideal hidran untuk 100 orang responden sampel yakni sebanyak 2,25 unit atau dibulatkan menjadi 2 unit. Di Kota Mataram terdapat 31.439 rumah tangga, sehingga kebutuhan ideal hidran mencapai 628,78 unit atau dibulatkan menjadi 629 unit. Sedangkan hidran/tendon air yang tersedia saat ini (*existing*) sebanyak 14 unit. Artinya tingkat capaian hidran terhadap kebutuhan ideal hidran baru mencapai 2,23 persen.

### c. Personil Pemadam Kebakaran

Kebutuhan ideal personil personil pemadam kebakaran di Kota Mataram adalah sebanyak 1.217 orang. Jumlah personil pemadam kebakaran yang tersedia saat ini (*existing*) sebanyak 179 orang, artinya tingkat capaian personil pemadam kebakaran terhadap kebutuhan ideal mencapai 14,71 persen. Sistem kerja personil pemadam kebakaran tersebut terbagi menjadi 3 shift masing-masing 59 sampai 60 orang untuk 1 kali jaga selama 24 jam penuh. Untuk mencapai kebutuhan ideal menurut 75 orang responden sampel (75 persen) sebaiknya direkrut dari warga masyarakat dan difungsikan sebagai tenaga relawan dimana mereka tidak diberikan honor tetap tiap bulan tetapi hanya sekedar insentif dan lainnya sebanyak 25 orang responden sampel (25 persen) menyatakan mereka hendaknya diberikan honor setiap bulannya. Lebih jelasnya pada tabel 5 berikut dibawah ;

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Kebutuhan ideal personil pemadam kebakaran
1.	Ampenan	94.363	236
2.	Sekarbela	75.254	188
3.	Mataram	91.568	229
4.	Selaparang	75.509	189
5.	Cakranegara	68.455	171
6.	Sandubaya	81.566	204
	<b>Total</b>	<b>486.715</b>	<b>1.217</b>

Sumber: BPS Kota Mataram 2020 (diolah)

#### d. Mobil Pemadam Kebakaran

Kebutuhan ideal mobil pemadam kebakaran di Kota Mataram adalah sebanyak 49 unit. Jumlah mobil pemadam kebakaran yang tersedia saat ini (*existing*) sebanyak 10 unit, artinya tingkat capaian personil pemadam kebakaran terhadap kebutuhan ideal baru mencapai 20,41 persen. Berdasarkan hasil *chek-list* pada waktu observasi lapangan sebanyak 7 unit dalam kondisi baik dan 3 unit dalam kondisi rusak berat. Untuk memenuhi kebutuhan ideal mobil pemadam kebakaran di Kota Mataram sebagian besar responden yakni 79 orang (79 persen) menyatakan sebaiknya tidak hanya didanai dari APBD, tetapi dicarikan pendanaan dari pihak swasta berupa dana *Corporate Sosial Responsibility* (CSR) dan lainnya sebanyak 21 orang (21 persen) menyatakan sepenuhnya dari APBD. Jelasnya pada tabel 6 kebutuhan ideal mobil pemadam kebakaran dikota Mataram sebagai berikut;

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Kebutuhan ideal mobil pemadam kebakaran
1.	Ampenan	94.363	9
2.	Sekarbela	75.254	8
3.	Mataram	91.568	9
4.	Selaparang	75.509	8
5.	Cakranegara	68.455	7
6.	Sandubaya	81.566	8
	<b>Total</b>	<b>486.715</b>	<b>49</b>

Sumber: BPS Kota Mataram 2020 (diolah)

#### e. Pos Pemadam Kebakaran

Kebutuhan ideal pos pemadam kebakaran di Kota Mataram adalah sebanyak 17 unit. Di Kota Mataram terdapat 50 kelurahan, sehingga jumlah Pos Pemadam Kebakaran yang dibutuhkan pada setiap kelurahan adalah 2 sampai 3 unit. Jumlah pos pemadam kebakaran yang ada saat ini (*existing*) sebanyak 2 unit yakni Pos Induk Pemadam Kebakaran (PIPK) yang terletak di Kelurahan Cilinaya di Jl.Bung Hatta No.2 Mataram. Ini berarti bahwa tingkat capaian pos pemadam kebakaran terhadap kebutuhan ideal baru mencapai 11,76 persen. Sehingga masih perlu dibangun 15 unit Pos Pemadam Kebakaran (88,23 persen) untuk mencapai kebutuhan ideal. Disisi lain, struktur organisasi (PIPK) terdiri dari Kepala Pemadam Kebakaran, Teknis sekaligus juru mudi, Komandan regu lapangan, dan Anggota.



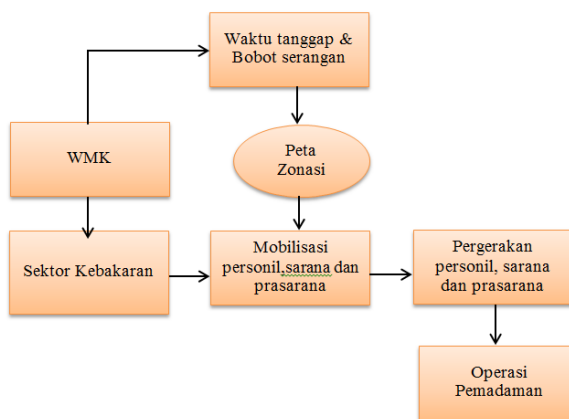
**Tabel 7 Kebutuhan Ideal Pos Pemadam Kebakaran di Kota Mataram**

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Kebutuhan ideal pos pemadam kebakaran
1.	Ampenan	94.363	3
2.	Sekarbela	75.254	3
3.	Mataram	91.568	3
4.	Selaparang	75.509	3
5.	Cakranegara	68.455	2
6.	Sandubaya	81.566	3
	<b>Total</b>	<b>486.715</b>	<b>17</b>

Sumber: BPS Kota Mataram 2020 (diolah)

**5. Model Pengembangan Penanganan Kebakaran.**

**a. Model Sistem Pelayanan**



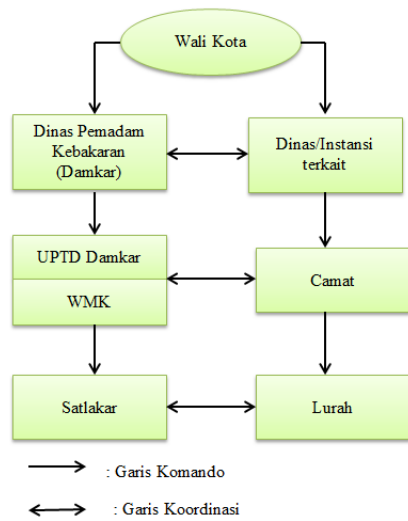
Model Sistem Pelayanan penanganan kebakaran yang direkomendasikan ditampilkan pada gambar 2 disamping dengan Waku Manajemen Kebakaran sebagaimana ditampilkan pada tabel 8 dibawah sebagai berikut ;

**Tabel 8 Rekomendasi Wilayah Manajemen Kebakaran di Kota Mataram**

No	Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	Jumlah Pos Pemadam Kebakaran
1.	Ampenan	3
2.	Sekarbela	3
3.	Mataram	3
4.	Selaparang	3
5.	Cakranegara	2
6.	Sandubaya	3
	<b>Total</b>	<b>17</b>

Sumber : Dinas Pemadam Kebakaran Kota Mataram

## b. Model Kelembagaan



Dalam konteks kelembagaan, partisipasi dan rasa tanggungjawab masyarakat dalam penanganan kebakaran dikembangkan melalui konsep manajemen berbasis masyarakat (*community based management*) dimana masyarakat pada tingkat kelurahan diorganisir dalam Satuan Relawan Kebakaran (Satlakar). Satlakar inilah yang dijadikan sebagai “barisan terdepan” dalam melakukan pemadam api dini ketika terjadi kebakaran. Model kelembagaan penanganan kebakaran yang direkomendasikan ditampilkan pada gambar

3 sebagai berikut (disamping).

## F. KESIMPULAN

1. Sebagian besar penduduk masyarakat Kota Mataram (41 persen) tinggal di kawasan kategori sedang, sebesar 26 persen tinggal di kawasan kategori tinggi, sebesar 21 persen di kawasan kategori rendah, dan lainnya 12 persen tinggal di kawasan kategori sangat tinggi.
2. Sebagian besar penduduk masyarakat Kota Mataram (45 persen) tinggal dalam wilayah kategori sedang; 27 persen tinggal dalam wilayah dengan kategori tinggi, 17 persen tinggal dalam wilayah kategori rendah; sedangkan 11 persen tinggal pada wilayah dengan kategori sangat tinggi.
3. Sarana dan prasarana penangananan kebakaran yang ada di Kota Mataram meliputi APAR dengan tingkat capaian terhadap kebutuhan ideal sebesar 17,23 persen, hidran/tandon air dengan tingkat capaian terhadap kebutuhan ideal sebesar 2,23 persen, personil pemadam kebakaran dengan tingkat capaian terhadap kebutuhan ideal sebesar 14,71 persen, mobil pemadam kebakaran dengan tingkat capaian terhadap kebutuhan ideal sebesar 20,41 persen, pos pemadam kebakaran dengan tingkat capaian terhadap kebutuhan ideal sebesar 11,76 persen.

## G. REKOMENDASI

1. Harus dilakukan pemeriksaan paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun terhadap keberadaan APAR yang masih ada dan kemudian dilakukan pemeliharaan.
2. Tingkat capaian APAR terhadap kebutuhan ideal APAR baru mencapai 17,23 persen, artinya masih dibutuhkan sebanyak 1.561 unit (82,77 persen) untuk mencapai kebutuhan ideal. Dalam pada itu, pengadaan APAR sebanyak 1.561 unit tersebut sebaiknya dilakukan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dengan jumlah pengadaan rata-rata setiap tahunnya sebanyak 520 unit.

3. Diperlukan perbaikan baik untuk hidran maupun tandon air yang mengalami kerusakan dan untuk tandon air yang mesinnya hilang perlu diganti.
4. Tingkat capaian hidran/tandon air terhadap kebutuhan ideal hidran baru mencapai 2,23 persen, artinya masih terdapat sebanyak 615 unit (97,77 persen) untuk mencapai kebutuhan ideal. Disisi lain, pengadaan hidran/tandon air sebanyak 615 unit tersebut sebaiknya dilakukan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dengan jumlah pengadaan rata-rata setiap tahunnya sebanyak 123 unit.
5. Tingkat capaian personil pemadam kebakaran terhadap kebutuhan ideal mencapai 14,71 persen, artinya masih diperlukan 1.038 orang personil (85,29 persen) untuk mencapai kebutuhan ideal. Untuk memenuhi sebanyak 1.038 orang personil tersebut sebaiknya digunakan model manajemen berbasis masyarakat (*community based management*).
6. Tingkat capaian personil pemadam kebakaran terhadap kebutuhan ideal baru mencapai 20,41 persen, artinya masih dibutuhkan 39 unit mobil pemadam kebakaran (79,59 persen) untuk mencapai kebutuhan ideal.

## DAFTAR PUSTAKA

Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Mataram, 2021, Laporan Akhir Kajian Identifikasi Sarana Dan Prasarana Kebakaran Pada Wilayah Padat Penduduk Di Kota Mataram. Mataram

# INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP KETERSEDIAAN INFRASTRUKTUR DAN PELAYANAN PUSKEMAS di KOTA MATARAM

## Abstrak

Puskemas sebagai salah satu unit penyelenggara pelayanan publik dalam bidang kesehatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik wajib melakukan survei kepuasan masyarakat secara berkala minimal 1 (satu) kali setahun. Survei dilakukan untuk memperoleh Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). Ruang lingkup survei meliputi 9 (sembilan) unsur layanan yaitu: (1) persyaratan, (2) sistem, mekanisme, prosedur, (3) waktu penyelesaian, (4) biaya/tarif, (5) produk spesifikasi jenis layanan, (6) kompetensi pelaksana, (7) perilaku pelaksana, (8) penanganan, pengaduan, saran, dan masukan, (9) saranan dan prasarana (infrastruktur). Tujuan diadakannya penelitian terciptanya pelayanan yang sesuai dengan IKM dan terpenuhinya infrastruktur yang memadai. Metode penelitian menggunakan diskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan dari masing-masing puskesmas memiliki capaian tersendiri dalam IKM, terdapat 11 puskesmas di Kota Mataram memperoleh mutu pelayanan dan kinerja BAIK, dengan rata-rata IKM 77,23. Rekomendasi dalam kondisi tersebut Sehingga untuk meningkat pelayanan puskesmas di Kota Mataram harus mengoptimalkan pelayanan pada standar IKM, untuk itu unsur layanan yang memiliki nilai IKM terendah pertama sebagai prioritas 1, IKM terendah kedua sebagai prioritas 2, dan IKM terendah ketiga sebagai prioritas 3.

*Kata Kunci ; Indeks Kepuasan Masyarakat, Infrastruktur, Pelayanan Puskesmas.*

## A. Latar Belakang

Dalam Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada pasal 12 butir 10 disebutkan bahwa kesehatan merupakan pelayanan dasar yang menjadi urusan wajib pemerintah daerah. Unit penyelenggara pelayanan publik pada bidang kesehatan di tingkat kecamatan adalah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskemas). Merujuk pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Puskemas disebutkan bahwa Puskemas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif di wilayah kerjanya. Di Kota Mataram terdapat 11 Puskemas yang tersebar di 6 (enam) kecamatan.

Puskemas sebagai salah satu unit penyelenggara pelayanan publik dalam bidang kesehatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik wajib melakukan survei kepuasan masyarakat secara berkala minimal 1 (satu) kali setahun. Survei dilakukan untuk memperoleh Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). Ruang lingkup survei meliputi 9 (sembilan) unsur layanan yaitu: (1) persyaratan, (2) sistem, mekanisme, prosedur, (3) waktu penyelesaian, (4) biaya/tarif, (5) produk spesifikasi jenis layanan, (6) kompetensi pelaksana, (7) perilaku pelaksana, (8) penanganan, pengaduan, saran, dan masukan, (9)

saranan dan prasarana (infrastruktur). Berdasarkan hal tersebut untuk mengukur pelayanan kesehatan di puskesmas di Kota Mataram melalui survey.

## B. Permasalahan

Keterbatasan sumber daya manusia juga menjadi masalah di era desentralisasi. Kewenangan pusat untuk mengatur sumber daya ke daerah lebih terbatas, sehingga di daerah tertentu dijumpai sumber daya tidak optimal untuk melaksanakan pembangunan kesehatan. Selain itu ketersediaan sarana dan prasarana, sasaran, metode atau cara juga menjadi kendala dalam pelayanan kesehatan. Mempertimbangkan kenyataan tersebut, diperlukan perencanaan upaya pembangunan kesehatan yang akurat agar tujuan pembangunan kesehatan yang seimbang antara kuantitas dan kualitas dapat dicapai.

Analisis dan penentuan prioritas masalah kesehatan yang tepat diperlukan supaya pembangunan kesehatan yang dilakukan memiliki daya ungkit yang besar secara kuantitas dan kualitas terhadap penurunan kesakitan, kecacatan dan kematian. Penyelesaian masalah kesehatan berdasarkan perencanaan wilayah atau evidence based planning, yaitu perencanaan yang dibuat secara terpadu dan benar-benar didasarkan pada besarnya masalah kesehatan, kondisi daerah serta kemampuan sumber daya yang ada dengan program yang mempunyai daya ungkit tinggi dan dapat dilaksanakan dengan efektif dan efisien. Studi ini bertujuan untuk mengetahui gambaran masalah kesehatan yang merupakan prioritas di Kota Mataram.

Kelompok yang menjadi sasaran dalam pembangunan kesehatan Kota Mataram adalah seluruh masyarakat khususnya masyarakat Kota Mataram dengan perhatian khusus pada kelompok rentan / resiko tinggi seperti misalnya ibu hamil, ibu nifas / menyusui, bayi, anak balita dan masyarakat miskin. Sampai dengan tahun 2015 data yang tersedia perkembangan jumlah kunjungan ke puskesmas di Kota Mataram sebanyak 497765 jiwa. Disaat ini untuk masyarakat menengah kebawah yang ada di Kota Mataram, Puskesmas dan jaringannya merupakan sarana pelayanan kesehatan terdepan yang memberikan pelayanan kesehatan baik yang bersifat promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif.

## C. Tujuan

Tujuan penelitian ini adalah mengukur tingkat kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan Puskemas serta memberikan rekomendasi dalam upaya meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik.

## D. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini digunakan metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif (Kathori, C.R., 2019). Kegiatan penelitian meliputi penelitian kepustakaan (*library research*) dan penelitian lapangan (*field research*) yakni survei. Dalam pada itu, survei adalah penelitian kuantitatif dengan menggunakan pertanyaan terstruktur pada setiap orang kemudian semua jawaban yang diperoleh peneliti dicatat, diolah, dan dianalisis.

## E. Pokok – Pokok Hasil Analisa

### 1. IKM dan Kinerja Puskesmas

Dalam mengukur Pelayanan puskesmas yang berlandaskan pada 9 IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) di 11 puskesmas di Kota Mataram mendapatkan hasil nilai Indeks Kesehatan Masyarakat (IKM) masing-masing Puskesmas, mutu pelayanan masing-masing Puskesmas dan kinerja masing-masing Puskesmas ditampilkan pada tabel 2.

Tabel 1  
IKM dan Kinerja Puskesmas di Kota Mataram

No	Puskemas	IKM	Mutu Pelayanan	Kinerja Puskesmas
1.	Puskemas Ampenan	77,08	B	Baik
2.	Puskemas Tanjung Karang	77,35	B	Baik
3.	Puskemas Karang Pule	77,63	B	Baik
4.	Puskemas Pejeruk	77,37	B	Baik
5.	Puskemas Pagesangan	77,12	B	Baik
6.	Puskemas Mataram	77,54	B	Baik
7.	Puskemas Dasan Agung	77,02	B	Baik
8.	Puskemas Selaparang	77,00	B	Baik
9.	Puskemas Karang Taliwang	77,15	B	Baik
10.	Puskemas Cakranegara	77,05	B	Baik
11.	Puskemas Babakan	77,18	B	Baik
	Rata-rata	77,23	B	Baik

Sumber : Data Primer (diolah)

Berdasarkan tabel 2 bahwa semua Puskesmas di Kota Mataram (11 Puskesmas) memiliki mutu pelayanan "B" dan kinerja **Baik**. Dalam pada itu, Puskesmas di Kota Mataram memiliki nilai rata-rata IKM sebesar 77,23 dengan mutu pelayanan "B" dan kinerja **Baik**. Adapun nilai IKM untuk masing-masing Puskesmas yaitu Puskesmas Ampenan sebesar 77,08; Puskesmas Tanjung Karang sebesar 77,35; Puskesmas Karang Pule sebesar 77,63; Puskesmas Pejeruk sebesar 77,37; Puskesmas Pagesangan sebesar 77,12; Puskesmas Mataram sebesar 77,54; Puskesmas Dasan Agung sebesar 77,02; Puskesmas Selaparang sebesar 77,00; Puskesmas Karang Taliwang sebesar 77,15; Puskesmas Cakranegara sebesar 77,05; Puskesmas Babakan sebesar 77,18.

### 2. IKM dan Status Akreditasi

Dari 11 Puskesmas di Kota Mataram, nilai Indeks Kesehatan Masyarakat (IKM) masing-masing Puskesmas dan Status Akreditasi masing-masing Puskesmas ditampilkan pada tabel 3.

Tabel 2  
IKM dan Status Akreditasi Puskesmas di Kota Mataram

No	Puskemas	IKM	Kinerja Puskesmas	Status Akreditasi
1.	Puskemas Ampenan	77,08	Baik	Madya (50)
2.	Puskemas Tanjung Karang	77,35	Baik	Madya (50)
3.	Puskemas Karang Pule	77,63	Baik	Utama (75)
4.	Puskemas Pejeruk	77,37	Baik	Paripurna (100)
5.	Puskemas Pagesangan	77,12	Baik	Utama (75)
6.	Puskemas Mataram	77,54	Baik	Utama (75)
7.	Puskemas Dasan Agung	77,02	Baik	Utama (75)
8.	Puskemas Selaparang	77,00	Baik	Dasar (25)
9.	Puskemas Karang Taliwang	77,15	Baik	Madya (50)
10.	Puskemas Cakranegara	77,05	Baik	Paripurna (100)
11.	Puskemas Babakan	77,18	Baik	Utama (75)
	Rata-rata	77,23	Baik	

Sumber : Data Primer (diolah)

Merujuk pada tabel 3 bahwa semua Puskesmas di Kota Mataram (11 Puskesmas) memiliki kinerja sama yakni **Baik**, tetapi status akreditasinya tidaklah sama dimana dari 11 Puskesmas sebanyak 1 Puskesmas terakreditasi **Dasar**, 3 Puskesmas terakreditasi **Madya**, 5 Puskesmas terakreditasi **Utama**, dan 2 Puskesmas terakreditasi **Paripurna**. Hal ini menggambarkan bahwa kinerja Puskesmas tidak memiliki korelasi dengan status akreditasi Puskesmas. Disisi lain, mengenai tidak adanya korelasi antara kinerja Puskesmas dan status akreditasi ditunjukkan oleh nilai **Korelasi Pearson** sebesar 0,267 pada taraf signifikansi sebesar 0,428 ( $0,428 > 0,050$ ) atau "non signifikan". Mengenai tidak adanya korelasi antara kinerja Puskesmas dengan status akreditasi juga ditunjukkan oleh **Korelasi Spearman** sebesar 0,290 pada taraf signifikansi 0,388 ( $0,388 > 0,05$ ) atau "non signifikan". Dengan demikian, baik Korelasi Pearson maupun Korelasi Spearman yang "non signifikan" menggambarkan bahwa nilai kedua korelasi tersebut adalah sama dengan 0 (nol); artinya tidak ada korelasi. Dengan perkataan lain, kinerja Puskesmas tidak memiliki korelasi dengan status akreditasi Puskesmas.

Status akreditasi Puskesmas meliputi Dasar, Madya, Utama, dan Paripurna. Dalam analisis korelasi, keempat status akreditasi tersebut diberikan skor dalam skala *Likert*, sehingga Dasar memiliki skor 1, Madya memiliki skor 2, Utama memiliki skor 3, dan Paripurna memiliki skor 4. Selanjutnya dikalikan dengan 25 untuk dikonversi kedalam rentang skor 25 hingga 100; sehingga Dasar memiliki skor 25, Madya memiliki skor 50, Utama memiliki skor 75, dan Paripurna memiliki skor 100 sebagaimana ditampilkan pada tabel 3.

## F. Kesimpulan

Nilai rata-rata IKM Puskesmas di Kota Mataram sebesar 77,23 dengan mutu pelayanan "B" dan kinerja **Baik**. Semua Puskesmas (11 Puskesmas) di Kota Mataram memiliki mutu

pelayanan "B" dan kinerja **Baik**. Semua Puskesmas (11 Puskesmas) di Kota Mataram memiliki kinerja sama yakni **Baik**, tetapi status akreditasinya tidaklah sama dimana dari 11 Puskesmas sebanyak 1 Puskesmas terakreditasi **Dasar**, 3 Puskesmas terakreditasi **Madya**, 5 Puskesmas terakreditasi **Utama**, dan 2 Puskesmas terakreditasi **Paripurna**. Hal ini menggambarkan bahwa kinerja Puskesmas tidak memiliki korelasi dengan status akreditasi Puskesmas. Disisi lain, mengenai tidak adanya korelasi antara kinerja Puskesmas dan status akreditasi ditunjukkan oleh nilai **Korelasi Pearson** sebesar 0,267 pada taraf signifikansi sebesar 0,428 ( $0,428 > 0,050$ ) atau "non signifikan" dan **Korelasi Spearman** sebesar 0,290 pada taraf signifikansi 0,388 ( $0,388 > 0,05$ ) atau "non signifikan". Baik Korelasi Pearson maupun Korelasi Spearman yang "non signifikan" menggambarkan bahwa nilai kedua korelasi tersebut adalah sama dengan 0 (nol); artinya tidak ada korelasi.

## G. Rekomendasi

Dari semua Puskesmas (11Puskesmas) di Kota Mataram dimana masing-masing Puskesmas memiliki nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) untuk setiap unsur layanan. Dari 9 (sembilan) unsur layanan dimana masing-masing Puskesmas memiliki 3 (tiga) nilai IKM terendah yaitu terendah pertama, terendah kedua, dan terendah ketiga dapat di lihat pada table 4 berikut ;

Tabel 3  
IKM dan Status Akreditasi Puskesmas di Kota Mataram

No.	Pusekmas	Rekomendasi
1.	Puskemas Ampenan	Penanganan Pengaduan, Saran, Masukan (1), Infrastruktur (2), Waktu layanan (3)
2.	Puskemas Tanjung Karang	Infrastruktur (1), Prosedur layanan (2), Waktu Layanan (3)
3.	Puskemas Karang Pule	Penanganan Pengaduan, Saran, Masukan (1), Prosedur layanan (2), Waktu layanan (3)
4.	Puskemas Pejeruk	Infrastruktur (1), Prosedur layanan (2), Waktu layanan (2), Biaya layanan (3)
5.	Puskemas Pagesangan	Infrastruktur (1), Penanganan Pengaduan, Saran, Masukan (2), Prosedur layanan (3)
6.	Puskesmas Mataram	Infrastruktur (1), Penanganan Pengaduan, Saran, Masukan (1), Prosedur layanan (2), Waktu layanan (2), Biaya layanan (3)
7.	Puskemas Dasan Agung	Penanganan Pengaduan, Saran, Masukan (1), Biaya layanan (2), Infrastruktur (3)
8.	Puskemas Selaparang	Penanganan Pengaduan, Saran, Masukan (1), Infrastruktur (2), Prosedur layanan (3)
9.	Puskesmas Karang Taliwang	Penanganan Pengaduan, Saran, Masukan (1), Infrastruktur (2), Prosedur layanan (3)
10.	Puskesmas Cakranegara	Penanganan Pengaduan, Saran, Masukan (1), Infrastruktur (2), Prosedur layanan (2), Waktu layanan (3)
11.	Puskesmas Babakan	Penanganan Pengaduan, saran, Masukan (1), Infrastruktur (2), Prosedur layanan (3)



## DAFTAR PUSTAKA

Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Mataram, 2021, Laporan Akhir Kajian Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Ketersediaan Infrastruktur Dan Pelayanan Puskesmas Di Kota Mataram. Mataram

# IDENTIFIKASI KAWASAN YANG BERPOTENSI SEBAGAI DESTINASI WISATA BARU DI WILAYAH KOTA MATARAM

## Abstrak

Pengembangan pariwisata sangat erat kaitannya dengan pengelolaan potensi yang ada di suatu wilayah untuk dioptimalisasi sehingga membawa manfaat terutama bagi masyarakat sekitar. Pemerintah Kota Mataram menyadari perlu adanya variasi destinasi wisata di Kota Mataram yang dapat menjadi tujuan destinasi wisata alternatif dan dapat mendongkrak PAD (pendapatan asli daerah). Untuk itu menjadi tujuan utama teridentifikasi sejumlah pariwisata di Kota Mataram serta terciptanya strategi pengembangan pariwisata di Kota Mataram. Metode digunakan untuk mendapatkan hasil pekerjaan yang optimal dilakukan dengan pengumpulan data, analisis data, dan pengambilan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan teridentifikasi pariwisata di Kota Mataram sebanyak 26 di Kota Mataram dengan terbagi menjadi 4 zonasi yang diberikan istilah zona 1 Heritage, Zona 2 City Walk, Zona 3 Shopping, dan Zona 4 Nature. Zona tersebut dilakukan dengan beberapa strategi pengembangan diantaranya Zona 1 masuk dalam kategori kuadran **Defensive Strategy**, Zona 2 dan zona 4 masuk dalam kuadran **Conservative Strategy**, Zona 3 masuk dalam kuadran **Competitive Strategy**. Oleh karenanya Strategi prioritas ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan dalam memilih arah pengembangan yang paling ideal untuk setiap zona wisata. Integrasi antar zona wisata perlu direncanakan dalam sebuah paket wisata.

*Kata Kunci : Identifikasi, Destinasi Wisata, Pariwisata.*

## A. Latar Belakang

Komitmen Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat ini didukung dengan ditetapkannya 10 (sepuluh) destinasi wisata prioritas (10 Bali Baru) oleh Pemerintah Indonesia, yang mana salah satu dari 10 daerah tersebut adalah Pulau Lombok. Destinasi wisata Pulau Lombok mencakup 5 (lima) kabupaten / kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat, yaitu Kabupaten Lombok Tengah, Lombok Barat, Lombok Timur, dan Lombok Utara serta Kota Mataram. Dengan adanya kebijakan tersebut, Kota Mataram terus berupaya berbenah diri dan melakukan kajian terhadap wilayah yang dianggap berpotensi untuk dikembangkan sebagai daerah wisata sehingga dapat bersaing dengan kabupaten lain di Pulau Lombok. Pengembangan pariwisata sangat erat kaitannya dengan pengelolaan potensi yang ada di suatu wilayah untuk dioptimalisasi sehingga membawa manfaat terutama bagi masyarakat sekitar.

Dalam hal ini, pemerintah Kota Mataram menyadari perlu adanya variasi destinasi wisata di Kota Mataram yang dapat menjadi tujuan destinasi wisata alternatif dan dapat mendongkrak PAD (pendapatan asli daerah). Berdasarkan hal tersebut, maka perlu dilakukan kajian secara mendalam serta indentifikasi kawasan yang memiliki potensi untuk dikembangkan. Kegiatan ini diharapkan mampu menghasilkan suatu kajian awal guna mengetahui kelayakan beberapa kawasan di Kota Mataram.

## B. Permasalahan

Pengembangan pariwisata sangat erat kaitannya dengan pengelolaan potensi yang ada di suatu wilayah untuk dioptimalisasi sehingga membawa manfaat terutama bagi masyarakat sekitar.

Dalam hal ini, pemerintah Kota Mataram menyadari perlu adanya variasi destinasi wisata di Kota Mataram yang dapat menjadi tujuan destinasi wisata alternatif dan dapat mendongkrak PAD (pendapatan asli daerah). Dengan wilayah sebesar 61,3 km<sup>2</sup>, diyakini masih banyak potensi tersembunyi yang tersebar diberbagai wilayah Kota Mataram, salah satu contohnya ada di kawasan Kamasan. Kawasan ini memiliki potensi yang cukup menarik, secara geografis pada kawasan ini terdapat sungai membentang yang berpotensi dikembangkan dengan jembatan gantungnya. Selain itu, masyarakat Kamasan juga memiliki SDM yang potensial untuk diberdayakan. Sebagian masyarakat Kamasan berprofesi sebagai pengrajin perak, emas dan keris.

Untuk melakukan pengembangan kawasan wisata kota, perlu adanya identifikasi 8 elemen perancangan kota yang dimiliki untuk menilai kesiapan kota tersebut jika urban tourism dikembangkan. Selain tentu saja, setiap titik yang akan dikembangkan tersebut haruslah memenuhi kriteria dan syarat tujuan wisata. Menurut Cooper dkk (1995: 81), terdapat 4 (empat) komponen yang harus dimiliki oleh sebuah objek wisata, yaitu; 1) *Attraction* (atraksi), modal atraksi yang menarik kedatangan wisatawan itu ada tiga, yaitu *natural resources* (alami), atraksi wisata budaya, dan atraksi buatan manusia; 2) *Accessibility* (akses), berkaitan dengan transferabilitas, yaitu kemudahan untuk bergerak dari daerah yang satu ke daerah yang lain, termasuk segala macam transportasi ataupun jasa transportasi menjadi akses penting dalam pariwisata; 3) *Amenity* (fasilitas), segala macam sarana dan prasarana yang diperlukan oleh wisatawan selama berada di daerah tujuan wisata; dan 4) *Ancillary* (pelayanan tambahan), berupa hal-hal yang mendukung sebuah kepariwisataan.

## C. Tujuan

Untuk mengidentifikasi potensi wisata baru di Kota Mataram; mengkaji kelayakan potensi kawasan untuk dikembangkan sebagai destinasi wisata; menyusun arahan pengembangan kawasan yang memiliki potensi sebagai destinasi wisata baru di kota mataram, dan mensinergikan kawasan wisata yang telah ada dengan kawasan wisata yang baru.

## D. Metode Penelitian

Metodologi penelitian untuk mendapatkan hasil pekerjaan yang optimal dilakukan dengan pengumpulan data, analisis data, dan pengambilan kesimpulan.

## E. Pokok –Pokok Hasil Analisa

Pembagian Zonasi Wisata Terdiri Dari Empat Zona Yang Terdiri Dari ZONA 1 : Heritage yang memiliki bangunan dengan tema sejarah sehingga harapan ke depan pariwisata kota di Kota Mataram Metro memiliki kebudayaan yang dapat menjadi daya tarik wisata, ZONA 2: CITY WALK yang mana memiliki memiliki area RTH yang luas, jalur pedestrian yang baik, dan pusat perbelanjaan yang besar sehingga memungkinkan untuk ke arah city walk, ZONA 3: SHOPPING yang mana memiliki memiliki area pertokoan dan area souvenir yang tersebar sehingga arah pengembangan wisata ke wisata belanja (shopping), ZONA 4: NATURE memiliki memiliki potensi wisata alam yang memukau, baik berupa pantai ataupun alam. Zona 4 banyak diperuntukkan untuk area pemukiman, tetapi dapat dikembangkan untuk wisata. Dari masing –masing zona tersebut dapat di uraikan dengan analisis pendekatan SWOT diantaranya sebagai berikut ;

**Tabel 1 Zona 1 (Heritage) Analisis SWOT**

No	Kekuatan	No	Kelemahan
1	Objek vital yang menjadi saksi sejarah berada di zona 1	6	Tidak semua koridor di zona 1 mewakili tema heritage
2	Memiliki atraksi wisata pantai yang berbeda dari yang lain (pacuan kuda)	7	Sistem penanda kawasan masih kurang
3	Variasi wisata yang dimiliki sangat menarik	8	Sebaran akomodasi sekitar magnet wisata masih kurang dibanding zona yang lain
4	Pusat pasar ikan terbesar ada di zona ini	9	Penataan koridor belum optimal
5	Memiliki magnet wisata yang memiliki langgam khusus pada fasad bangunan	10	Area parkir terpusat belum ada

No	Peluang	No	Ancaman
1	Adanya sirkuit Mandalika beserta event Internasional yang diselenggarakan dapat mendatangkan banyak wisatawan datang ke Pulau Lombok	6	Ketersediaan area parkir yang terbatas pada magnet wisata
2	Dukungan penuh pemerintah untuk pengembangan wisata Kota Mataram Metro	7	Penataan spasial area pertokoan belum optimal
3	Popularitas tempat sejarah di tengah kota yang semakin meningkat	8	Ketidaksiapan zona 1 untuk menampung lonjakan pariwisata ke depan
4	Kewajiban sekolah-sekolah untuk mengenakan pakaian adat dan berbahasa daerah agar anak-anak mengenal tradisi budaya	9	Kurangnya kesadaran masyarakat untuk menjaga kebersihan objek wisata
5	Zona 1 akan selalu dilalui untuk mencapai Pantai Senggigi sehingga berpotensi untuk menarik wisatawan luar apabila diberdayakan	10	Besarnya anggaran yang diperlukan untuk pengembangan wisata, sementara pendapatan daerah masih belum pulih di kondisi pandemi seperti saat ini

**Tabel 2 Zonasi 2 CITY WALK Analisis SWOT**

No	Kekuatan	No	Kelemahan
1	Landmark Pulau Lombok berada di kawasan ini	6	Magnet wisata yang satu dan yang lainnya belum terintegrasi
2	Memiliki potensi pengembangan wisata pagi hingga malam hari	7	Penataan spasial belum optimal
3	Terdapat magnet wisata yang benar-benar menawarkan suasana <i>urban tourism</i> , seperti berjalan-jalan, menikmati kuliner, berbelanja.	8	Koridor yang menjadi magnet wisata di koridor ini belum memiliki tema khusus
4	Memiliki beberapa titik lokasi wisata pendukung magnet utama	9	Belum ada konektivitas sistem parkir dan transportasi khusus antar magnet wisata yang memadai
5	Berada di pusat Kota Mataram	10	Peran dan kesadaran masyarakat dalam mengembangkan wisata di zona 2 masih kurang
No	Peluang	No	Ancaman
1	Adanya sirkuit mandalika beserta event Internasional yang diselenggarakan dapat mendatangkan banyak wisatawan datang ke Pulau Lombok	6	Persaingan dengan potensi wisata yang dimiliki kabupaten lain
2	Dukungan penuh pemerintah untuk pengembangan wisata Kota Mataram Metro	7	Kurangnya kesadaran masyarakat untuk menjaga kebersihan objek wisata
3	Banyak pendukung aktivitas wisata yang diminati muda-mudi yang menjamur di Kota Mataram	8	Ketersediaan area parkir yang terbatas di beberapa magnet wisata
4	Akses informasi yang mudah dapat membantu masyarakat berperan aktif dalam pengembangan pariwisata	9	Jumlah dan rute city tour bus terbatas
5	Ketersediaan moda transportasi umum khusus wisata seperti city tour bus ada di Kota Mataram	10	Besarnya anggaran yang diperlukan untuk pengembangan wisata, sementara pendapatan daerah masih belum pulih di kondisi pandemi seperti saat ini

**Tabel 3 Zonasi SHOPPING 3 Analisis SWOT**

No	Kekuatan	No	Kelemahan
1	Banyak pengrajin souvenir khas Lombok	6	Tidak ada transportasi umum
2	Banyak area pertokoan dalam satu jalur (konektivitas)	7	Tidak adanya jalur pedestrian terintegrasi
3	Atraksi wisata yang ada di zona 3 sangat beragam: pengrajin, industri, dan pusat belanja	8	RTH di kawasan ini belum diberdayakan sebagai ruang rekreatif
4	Fasilitas umum di zona 3 lebih bervariasi dari zona lain karena ada rumah sakit besar, tempat belanja, arena hiburan, dan sebagainya.	9	Penanda kawasan pengrajin tidak terlihat jelas
5	Jalan kendaraan di zona 3 lebar dan dalam kondisi baik	10	Tidak ada sistem parkir terpusat pada zona magnet wisata yang sudah ada

No	Peluang	No	Ancaman
1	Jalur akses yang dilalui wisatawan menuju Lombok Barat untuk wisata alam	6	Persaingan dengan potensi wisata yang dimiliki kabupaten lain
2	Adanya sirkuit mandalika beserta event Internasional yang diselenggarakan dapat mendatangkan banyak wisatawan datang ke Pulau Lombok	7	Besarnya anggaran yang diperlukan untuk pengembangan wisata, sementara pendapatan daerah masih belum pulih di kondisi pandemi seperti saat ini
3	Banyak pendukung aktivitas wisata yang diminati muda-mudi yang menjamur di Kota Mataram terutama di tempat kuliner	8	Fasilitas akomodasi tidak banyak di zona ini sehingga akan mengurangi jumlah wisatawan
4	Satu-satunya kawasan yang paling banyak menjual kerajinan tangan khas Lombok	9	Tidak ada integrasi antar pengrajin di dalam zona (konektivitas keterhubungan wisata)
5	Sering dikunjungi karena area pusat perbelanjaan grosir	10	Kurangnya minat wisatawan untuk berlama-lama di zona 3

**Table 4 ZONA 4: NATURE Analisis SWOT**

No	Kekuatan	No	Kelemahan
1	Satu-satunya kawasan di Kota Mataram yang menawarkan banyak pilihan wisata alam	6	Koridor jalan yang menjadi akses utama ke magnet wisata masih belum tertata dengan baik
2	Lokasi magnet wisata sebagian besar saling berdekatan sehingga memudahkan konektivitas	7	Banyak sampah di magnet wisata sehingga menurunkan daya tarik wisatawan
3	Pusat oleh-oleh mutiara emas terbesar ada di zona ini (berbatasan dengan zona 1)	8	Pantai di zona 4 belum populer di kalangan wisatawan
4	Pengembangan taman wisata loang baloq sebagai pendukung magnet utama sedang berjalan	9	Lapak kuliner belum tertata dengan baik
5	Memiliki potensi untuk menjadi pusat kuliner makanan laut terbesar di Kota Mataram	10	Area parkir terpusat terbatas
No	Peluang	No	Ancaman
1	Adanya sirkuit mandalika beserta event Internasional yang diselenggarakan dapat mendatangkan banyak wisatawan datang ke Pulau Lombok	6	Persaingan pelaku wisata cukup tinggi jika lokasi magnet wisata saling berdekatan
2	Dukungan penuh pemerintah untuk pengembangan wisata Kota Mataram Metro	7	Apabila atraksi wisata yang ditawarkan hampir sama, dapat memicu rasa bosan wisatawan
3	Ketertarikan wisatawan terhadap wisata alam yang masih alami sangat besar	8	Fasilitas akomodasi terbaik berada di pusat kota, bukan di zona ini
4	Banyak referensi water sport yang dapat dikembangkan sebagai atraksi wisata	9	Perlu lahan yang luas sebagai wadah parkir terpusat
5	Kegiatan camping dan outbond mulai populer	10	Kurangnya kerjasama masyarakat untuk menjaga kebersihan kawasan wisata

Dari hasil analisa swot di atas didapatkan kesimpulan bahwa zona 1 masuk dalam kategori kuadran **Defensive Strategy** (melakukan strategi dengan cara mempertahankan diri dengan menahan ancaman yang mungkin akan menghadang). Kemudian zona 2 dan zona 4 masuk dalam kuadran **Conservative Strategy** (mendukung strategi yang konservatif yang menekan kelemahan dan melakukan tindakan yang memperbesar peluang). Sementara zona 3 masuk dalam kuadran **Competitive Strategy** (mendukung strategi yang kompetitif dengan memaksimalkan kekuatan untuk meminimalkan ancaman). Sesuai hasil analisis swot, peluang pengembangan zona 2 dan 4 sangat besar.

Untuk itu diperlukan strategi pengembangan yang dapat diuraikan dalam bentuk table sebagai berikut ;

**Tabel 5 Strategi Pengembangan**

ZONA	STRATEGI PRIORITAS
1	<p><b>Defensive Strategy</b> : melakukan strategi dengan cara mempertahankan diri dengan menahan ancaman yang mungkin akan menghadang</p> <p>Menjadikan zona 1 sebagai pengembangan kawasan <b>wisata sejarah</b> yang memuat nilai-nilai budaya sehingga zona 1 memiliki karakter khusus yang dapat dipertahankan</p> <p>Melakukan integrasi antar magnet wisata dan konektivitas jalur-jalur utama yang dilalui wisatawan. Konektivitas diperlukan untuk memperkuat citra kawasan sejarah sehingga tidak pudar oleh perkembangan kota</p> <p>Memanfaatkan kalender festival budaya dan sarana magnet wisata yang telah ada (Museum NTB dan Taman Budaya NTB) agar dapat meramaikan kegiatan wisata di zona 1</p> <p>Memasukkan toko-toko souvenir di zona 1 untuk menambah kegiatan wisata</p> <p>Memaksimalkan anggaran pengembangan kawasan wisata untuk memperbaiki kekurangan di zona 1 dan menghadapi ancaman yang datang sehingga resiliensi zona 1 akan terwujud</p> <p>Mempertahankan RTH yang telah ada untuk kebutuhan wisatawan dalam wisata kota</p> <p>Pengaturan spasial ruang yang terintegrasi agar citra kawasan heritage atau sejarah dapat tergambarkan dengan jelas</p>
2	<p><b>Conservative Strategy</b> : menekan kelemahan dan melakukan tindakan yang memperbesar peluang</p> <p>Menjadikan zona 2 sebagai kawasan <b>wisata citywalk</b> karena terdapat magnet wisata yang benar-benar menawarkan suasana <i>urban tourism</i>, seperti berjalan-jalan, menikmati kuliner, berbelanja</p> <p>Melakukan Integrasi antar magnet wisata di zona 2 agar saling terkoneksi satu dan lainnya dalam paket wisata (perlu pengadaan <i>route city tour bus</i> yang melewati masing-masing magnet wisata)</p> <p>Melakukan optimalisasi pada penataan spasial magnet wisata dan koridor jalan yang menjadi akses utama.</p> <p>Memanfaatkan kunjungan wisatawan akibat event internasional yang diselenggarakan di sirkuit mandalika sebagai ajang promosi</p> <p>Meningkatkan kerjasama antara pemerintah, masyarakat dan swasta dalam upaya pengembangan kawasan wisata</p> <p>Mengalokasikan anggaran yang fokus dalam menekan kelemahan yang ada pada zona 2, misalnya dengan melakukan penataan spasial yang terintegrasi, termasuk menata koridor dengan tema khusus sesuai fungsi dan atraksi wisata yang ditawarkan, menyediakan lahan parkir yang terintegrasi dengan sistem transportasi (misal : <i>park and ride, park and bike, park and walk</i>)</p>
3	<p><b>Competitive Strategy</b> : memaksimalkan kekuatan untuk meminimalkan ancaman</p> <p>Keberagaman atraksi wisata yang ditawarkan di zona 3 dalam hal <b>wisata belanja</b> perlu dimaksimalkan dengan menyediakan fasilitas, sarana dan prasarana pendukung, penataan spasial yang optimal, integrasi antara area parkir terpusat dan transportasi umum.</p> <p>Fasilitas pendukung wisata di Zona 3 dapat dikembangkan dengan menggali titik-titik potensi baru di sekitar kawasan untuk memperkuat potensi yang telah ada sebelumnya</p> <p>Meningkatkan promosi dan pengenalan produk kerajinan, souvenir, dan oleh-oleh yang dimiliki masyarakat zona 3 pada event-event internasional yang akan dilaksanakan di mandalika</p> <p>Alokasi anggaran difokuskan untuk meningkatkan potensi yang dimiliki, memperbaiki kualitas, dan pengelolaan magnet wisata</p>

4	<p><b>Conservative Strategy</b> : <i>menekan kelemahan dan melakukan tindakan yang memperbesar peluang</i></p> <p>Memaksimalkan potensi alam yang dimiliki zona 4 dengan menjadikan kawasan ini sebagai pusat <b>wisata alam (nature)</b> di Kota Mataram serta meningkatkan kualitas atraksi wisata yang ditawarkan</p> <p>Melakukan penataan spasial di koridor jalan utama penghubung magnet wisata untuk mempermudah aksesibilitas wisatawan serta meningkatkan daya tarik wisata</p> <p>Memberikan edukasi dan mengajak masyarakat untuk bekerjasama dalam menjaga serta mengelola kawasan wisata di zona ini, terutama dalam aspek pengelolaan limbah di sekitar magnet wisata</p> <p>Meningkatkan kerjasama dengan berbagai pihak, sebagai ajang promosi dan pengenalan kawasan wisata yang ada di zona 4</p> <p>Meningkatkan dan melakukan evaluasi kelayakan fasilitas akomodasi di sekitar magnet wisata di zona 4</p> <p>Menyediakan lahan parkir terpusat pada magnet wisata beserta sistem transportasi yang memadai.</p>
---	--

## F. Kesimpulan

Potensi Pariwisata di Kota Mataram dengan luasan 61.3 Km dengan potensi baru pariwisata sejumlah 26 wisata baru maupun lama yang menjadi pertimbangan revitalisasi dan sekaligus strategi pengembangan wisata baru. Dalam jumlah tersebut di bagi menjadi 4 zonasi yang terdiri dari Heritage, Citi Walk, dan Shopping serta Nature. Zonasi tersebut dianalisis dalam pendekatan analisis swot yang rata-rata perlu pengembangan strategi untuk mengatasi ancaman, peluang dan potensi pariwisata di kota Mataram untuk dapat dikembangkan.

## G. Rekomendasi

Strategi prioritas ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan dalam memilih arah pengembangan yang paling ideal untuk setiap zona wisata. Integrasi antar zona wisata perlu direncanakan dalam sebuah paket wisata. Misal, pengembangan paket wisata alam di zona 4 dapat dikombinasikan dengan wisata heritage di zona 1. kemudian paket wisata zona 2 yang menawarkan atraksi wisata citywalk dapat dikombinasikan dengan paket wisata zona 3 yang identik dengan wisata belanja (*shopping*). Selain itu, ketersediaan city tour bus dengan rute yang melewati setiap zona wisata akan memudahkan akses wisatawan ke titik-titik wisata secara merata. Namun demikian, perlu disediakan sistem parkir terpusat yang akan mendukung aktivitas tersebut. Contohnya dengan mengadopsi sistem parkir yang terintegrasi dengan transportasi umum, seperti *park and ride*, *park and bike* hingga *park and walk*, sesuai kebutuhan dan pilihan wisatawan. Penggunaan sistem ini tentu juga perlu didukung dengan fasilitas yang memadai serta penataan spasial yang matang, baik pada koridor jalan, maupun bangunan.

## DAFTAR PUSTAKA

Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Mataram, 2021, Laporan Akhir Kajian Identifikasi Kawasan Yang Berpotensi Sebagai Destinasi Wisata Baru Di Wilayah Kota Mataram. Mataram